



Pemerintah Kabupaten Barito Timur

LKPj

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur

Tahun 2022



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2023



BUPATI BARITO TIMUR

Tamiang Layang, 21 Maret 2023

Nomor : 050/ 105/I/Bapplitbangda Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indosesia
Sifat : Penting di-
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Jakarta
Perihal : Pengantar LKPJ Tahun 2022

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7/1548/OTDA tanggal 10 Maret 2023, maka dengan ini disampaikan :

1. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 (Softcopy)
2. Berita Acara Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2022 (Softcopy)

Demikian disampaikan, atas perhatian disampaikan terima kasih



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa oleh karena penyertaan dan bimbingan-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 04 Tahun 2021 dengan visi daerah “Mewujudkan Barito Timur yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah”.

Tahun 2022 merupakan tahun keempat untuk Pemerintahan Kabupaten Barito Timur periode Tahun 2018-2023 dengan arah kebijakan menitikberatkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara layak.

Adapun tema pembangunan Tahun 2022 yaitu **“Pemulihian Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun.

Kami menyadari dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2022 masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangannya, terlebih dengan masih diperlukannya penanganan dampak pandemi Covid-19, namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur bersama-sama dengan masyarakat akan terus berupaya dan bekerja keras untuk melakukan langkah-langkah perbaikan demi mewujudkan harapan berbagai pihak secara khusus untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Barito Timur.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini disusun dan disampaikan sebagai bahan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 dan perbaikan-perbaikan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barito Timur di tahun-tahun mendatang demi "***Terwujudnya Barito Timur yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah***".

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita.

Tamiang Layang, 21 Maret 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum	3
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	5
1.3 Data Umum Daerah	11
1. Data Geografis Wilayah.....	11
2. Jumlah Penduduk.....	12
3. Pertumbuhan Penduduk.....	14
4. Jumlah PNS	15
5. Realiasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	18
6. Realiasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	19
7. Realiasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	20
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	22
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	30
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	30
A. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	30
B. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar.....	60
C. Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	113
D. Pelaksanaan Urusan Pendukung, Penunjang, Pengawas Urusan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum.....	161
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	175
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021	183
3.4 Prestasi	198
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	200
BAB V PENUTUP	201

DAFTAR TABEL

Nomor	Uraian	Halaman
1.3.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa per Kecamatan Kabupaten Barito Timur	11
1.3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022	12
1.3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.....	13
1.3.4	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.....	14
1.3.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2022	15
1.3.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2022	16
1.3.7	Perincian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 Setelah Perubahan dan Realisasi Tahun 2021	17
1.3.8	Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 Setelah Perubahan dan Realisasi Tahun 2021	19
1.3.9	Pembiayaan Daerah di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Setelah Perubahan dan Realisasi Tahun 2021.....	21
2.1.1	Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022.....	24
3.1.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	31
3.1.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar ..	61
3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	114
3.1.4	Pelaksanaan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum	130
3.2.1	Produk Hukum sebagai Kebijakan strategis di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.....	176
3.3.1	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021	184

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Uraian	Halaman
1	Realisasi Anggaran TA. 2022.....	203
2.	Risalah Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian LKPJ Tahun 2022.....	279
3.	Risalah Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Rekomendasi LKPJ Tahun 2022.....	285
4.	Rekomendasi DPRD Kabupaten Barito Timur atas LKPJ Tahun 2022.....	295

BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Barito Timur dibentuk secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur. Kabupaten Barito Timur dengan ibukota Tamiang Layang ini sejak lahirnya 10 Juni 2002 telah dipimpin oleh 3 orang bupati/Pejabat sampai saat ini.

Pemerintahan ini merupakan hasil pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang dimenangkan pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur periode 2018-2023 yaitu Ampera A.Y. Mebas dan Habib Said Abdul Saleh. Pemerintah Kabupaten Barito Timur saat ini disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.62-5912 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa :

Pasal 69 ayat (1) : Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 71 ayat (2) : Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 71 ayat (3) : Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LKPJ dimaknai sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan

program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

LKPJ Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan progres report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Ruang lingkup LKPJ dijelaskan pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Agenda penyampaian LKPJ diharapkan mampu menjadi sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. LKPJ yang disusun memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan yakni untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan program-program pembangunan. Melalui mekanisme ini, progress dan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembangunan dapat dicermati dan dilakukan penilaian sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengambil kebijakan melakukan perubahan RPJMD akibat perubahan kebijakan nasional yang telah terbit setelah penetapan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. Kebijakan tersebut mempengaruhi kebijakan pembangunan yang diatur dalam RPJMD, dan bersifat wajib untuk diterapkan oleh pemerintah daerah. Alasan lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur adalah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 dan telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam. Penyebaran Covid-19 yang melanda dunia telah berdampak negatif pada kesehatan, aspek sosial dan ekonomi dan telah merambat ke berbagai aspek kehidupan manusia. Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia telah dan masih terus melakukan berbagai upaya untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi dan sosial. LKPJ Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 ini adalah laporan yang memuat hasil pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur di tahun pertama sekaligus

menjelang berakhirnya penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah mengalami perubahan RPJMD Periode 2018-2023.

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 didasarkan atas:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 2021 Nomor 89);
15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 (Berita Daerah 2022 Nomor 123)

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi bupati dan wakil bupati terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Barito Timur sehat, cerdas, dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah”**

Visi Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 memiliki pengertian sebagai berikut:

1. **Sehat** adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial yang dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan aktifitas secara produktif baik ekonomi maupun sosial.
2. **Cerdas** adalah kemampuan untuk belajar dengan keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya.
3. **Sejahtera** adalah keadaan atau kondisi masyarakat yang baik, dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dapat diartikan juga terpenuhinya segala sesuatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.
4. **Pemerintahan Yang Amanah** adalah pemerintah yang mampu memberikan pelayanan dengan maksimal dan sebesar-besarnya prioritas pembangunan untuk kemakmuran dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas, makna dari visi Kabupaten Barito Timur adalah Kabupaten Barito Timur ingin mewujudkan daerah yang mensejahterakan masyarakat melalui perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang (bisnis) disertai dan didukung oleh nilai-nilai budaya yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, akan tercipta daerah dengan masyarakat yang kuat, mandiri, handal, tangguh dan nyaman serta sejahtera.

Dalam upaya mengoperasionalkan visi “Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah”, dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional, provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Barito Timur pada masa yang akan datang maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Barito Timur beserta penjelasannya, sebagai berikut:

1. Misi pertama: Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan

Peningkatan ekonomi kerakyatan Kabupaten Barito Timur dikembangkan melalui kearifan lokal masyarakat dengan memerhatikan kemampuan dan tradisi masyarakat yang baik sehingga sejumlah strategi dan arah kebijakan meliputi penelitian dan pengembangan teknologi, inovasi teknologi tepat guna, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kerakyatan serta penyediaan alat-alat pertanian, peternakan dan perkebunan dapat terselenggara dengan baik. Selain itu kemajuan koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri. Ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan turunannya maupun dalam pengembangan koperasi dan UMKM merupakan cikal bakal perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

2. Misi kedua: Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia

Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan yang dikembangkan melalui kesehatan dan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Barito Timur diperlukan sarana dan prasarana bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menunjang kinerja. Dalam upaya meningkatkan penataan kesehatan masyarakat perlu strategi dan arah kebijakan yaitu dengan meningkatkan kapasitas kinerja tenaga kesehatan, pemenuhan tenaga medis dan paramedis, melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga kesehatan, perbaikan standarisasi pelayanan kesehatan, penyediaan puskesmas rawat inap, Puskesdes dan Polindes. Sedangkan dari segi pendidikan, peningkatan sarana prasarana pendidikan sehingga proses belajar mengajar dapat terlayani dengan baik sehingga standar mutu pendidikan secara maksimal.

3. Misi ketiga: Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan

Ketersediaan infrastuktur yang layak adalah bagian dari nilai kesejahteraan sekaligus menjadi prasyarat dasar bagi pengembangan ekonomi masyarakat, baik yang berbasis ekonomi kerakyatan maupun sektor-sektor ekonomi modern. Peningkatan infrastruktur dasar yaitu jalan, jembatan, sumber daya air, air bersih maupun kelitrikan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur. Demi

memperlancar akses mobilitas masyarakat, jalan dan jembatan perlu mendapat perbaikan baik dari kecamatan ke desa, antar desa, bahkan dari desa ke akses jalan utama. Pemanfaatan sumber daya air untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik melalui pengembangan irigasi teknis juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk air bersih. Sedangkan infrastruktur kelistrikan diharapkan seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur dapat terlayani listrik dengan baik. Selain infrastruktur dasar, kelestarian lingkungan perlu dijaga untuk masa yang panjang sehingga dapat termanfaatkan bagi pariwisata yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Barito Timur.

4. Misi keempat: Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga

Pembinaan umat beragama merupakan suatu kewajiban di wilayah Republik Indonesia, terlebih di wilayah Kabupaten Barito Timur yang memiliki keberagaman sehingga tercipta kondisi yang kondusif. Dengan, terpeliharanya kebudayaan di wilayah Barito Timur, budaya leluhur tetap lestari dan dapat dikembangkan menjadi objek-objek wisata kebudayaan. Pembinaan pemuda dan olahraga menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menghasilkan pemuda yang berprestasi dan olahragawan handal.

5. Misi kelima: Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab

Dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah yang baik maka Pemerintah harus terus berupaya menyempurnakan aparaturnya dari segi organisasi, manajemen, sistem dan prosedur, termasuk pembinaan pegawai (ASN). Strategi dan arah kebijakan yang diterapkan dalam melaksakan pemerintahan daerah yang baik dengan memberikan penghargaan kepada aparatur yang berprestasi, memberikan sanksi teguran lisan dan tertulis, meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan, penyediaan fasilitas kerja dengan perangkat kerja yang memadai, optimalisasi analisis jabatan dengan penempatan aparatur, perencanaan dan informasi, menyediakan fasilitas teknologi informasi, penerapan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang tepat, jelas, dan terukur, penguatan regulasi kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemerintah daerah.

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Barito Timur dijabarkan atau implementasi kedalam tujuan dan sasaran. Tujuan menunjukkan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Barito Timur dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan. Oleh karena itu, sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Timur selama periode pembangunan daerah tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Mewujudkan perekonomian daerah yang merata dan tangguh berbasis ekonomi kerakyatan

Salah satu wujud kesejahteraan dari suatu daerah adalah tingkat perekonomian yang baik dan konsisten. Karena itu Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus berusaha menciptakan upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah serta mengembangkan tatanan perekonomian daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing serta berkeadilan, melalui optimalisasi potensi sumber daya alam secara umum dan sistem perdagangan yang adil untuk menopang kemajuan industri, mengembangkan pariwisata yang tangguh, pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal lainnya, melibatkan seluruh masyarakat secara partisipatif dalam kerangka peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan inti Kabupaten Barito Timur. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud adalah semakin terbukanya berbagai akses hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh penjuru wilayah sehingga masyarakat dapat hidup sehat, sejahtera, dan berdaya saing. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran:

- a. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah.
- b. Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah.
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat.
- d. Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran.

2. Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM

Peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia merupakan kunci sukses terwujudnya setiap tujuan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang berarti penduduk Kabupaten Barito Timur merupakan pelaksana pembangunan daerah sekaligus yang menikmati hasil-hasil pembangunan daerah. Selain itu, pembangunan Kabupaten Barito Timur harus memperhatikan nilai-nilai budaya dalam pembangunan, karena nilai budaya sesungguhnya merupakan aset dalam pembangunan melalui aktualisasi aspek sosial budaya masyarakat Kabupaten Barito Timur yang tidak terpisahkan dari penguatan martabat dan kemandirian dalam memberikan sumbangsih optimal dan kesempatan yang lebih terbuka bagi penduduk Kabupaten Barito Timur dalam mengembangkan kesejahteraan hidupnya di masa mendatang. Guna mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

3. Tujuan 3: Meningkatkan infrastruktur pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan perlu memperhatikan tata ruang yang disusun dalam rencana tata ruang agar dapat berdayaguna. Pembangunan pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah, sekaligus tangguh terhadap potensi bencana yang ada. Peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur daerah akan juga ikut mendorong produktifitas masyarakat dan pembangunan daerah. maka sasaran pembangunan yang harus dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

4. Tujuan 4: Terwujudnya masyarakat yang beragama dan berbudaya

Masyarakat yang beragama dan berbudaya merupakan masyarakat yang mempunyai perilaku/akhlak yang berbudi luhur. Masyarakat yang seperti ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah. Dengan masyarakat yang beragama, maka segala kebaikan dalam unsur keagamaan akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akan mampu menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman. Kemudian kehidupan berbudaya perlu diterapkan oleh masyarakat karena budaya merupakan kekayaan sejati daerah. Dengan mengembangkan budaya daerah maka masyarakat akan mengikuti aturan segala norma yang berlaku dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian tujuan diatas, sasaran pembangunan ini adalah:

- a. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan.
- c. Meningkatnya prestasi olahraga.
- d. Meningkatnya kelestarian adat dan budaya daerah.

5. Tujuan 5: Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Good and clean governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
- b. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- c. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dikelompokkan kedalam 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Indikator kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah. Indikator-indikator kinerja pada aspek ini merupakan indikator kinerja tingkat dampak (impact) baik berupa indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, maupun indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Indikator kinerja pada aspek pelayanan umum. Indikator-indikator kinerja pada aspek ini adalah indikator kinerja tingkat hasil (outcome) yang merupakan indikator kinerja program.

1.3 Data Umum Daerah

Data umum Kabupaten Barito Timur memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi data geografis wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah PNS, realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan, realisasi belanja menurut jenis belanja, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan. Data umum Kabupaten Barito Timur disajikan sebagai berikut:

1. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Barito Timur yang beribukota di Tamiang Layang terletak antara $1^{\circ}2'$ Lintang Utara dan $2^{\circ}5'$ Lintang Selatan, $114^{\circ} - 115^{\circ}$ Bujur Timur. Kabupaten Barito Timur diapit oleh Kabupaten Barito Selatan di sebelah Utara dan Barat, Kabupaten Tabalong di Propinsi Kalimantan Selatan di sebelah Timur, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong di sebelah Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Barito Timur sebesar 3.834 km² yang terdiri dari 10 kecamatan. Kecamatan Dusun Timur dan Paju Epat merupakan dua kecamatan terluas, masing-masing 867,70 km² dan 664,30 km². Apabila kedua kecamatan ini dijumlahkan, luasnya mencapai 39,96% dari seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur. Luas wilayah Kabupaten Barito Timur menurut Kecamatan disajikan pada Tabel 1.3.1 berikut ini:

Tabel 1.3.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa per Kecamatan Kabupaten Barito Timur

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap luas kabupaten (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1.	Benua Lima	Taniran	258,00	6,73	7
2.	Dusun Timur	Tamiang Layang	867,70	22,63	17
3.	Paju Epat	Telang	664,30	17,33	9
4.	Awang	Hayaping	203,00	5,29	11
5.	Patangkep Tutui	Bentot	255,00	6,65	10
6.	Dusun Tengah	Ampah Kota	371,00	9,68	8
7.	Raren Batuah	Unsum	186,00	4,85	9
8.	Paku	Tampa	272,00	7,09	12
9.	Karusen Janang	Dayu	178,00	4,64	7
10.	Pematang Karau	Bambulung	579,00	15,10	13
Jumlah Total			3.834	100,00	103

Sumber Data: BPS Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2023)

Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil dimiliki oleh Kecamatan Karusen Janang yaitu 178,00 Km2 atau 4,64 persen dari luas wilayah Kabupaten Barito Timur, diikuti oleh Kecamatan Raren Batuah 186,00 Km2 dan Kecamatan Awang 203,00 Km2.

Wilayah Kabupaten Barito Timur yang sebagian besar berada pada wilayah daratan dan perbuktian dengan tanah mineral. Lahan kering sebagian besar telah dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan terutama kebun karet dan kelapa sawit.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2022 menurut data BPS adalah sebanyak 115.406 jiwa, sedangkan menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur adalah sebanyak 115.200 jiwa, terdiri dari 59.047 Jiwa laki-laki dan 56.153 Jiwa perempuan dengan sebaran per kecamatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.3.2 berikut ini :

Tabel 1.3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan		
		Data Dukcapil			Data BPS
1.	Benua Lima	3.381	3.168	6.549	6.399
2.	Dusun Timur	14.588	14.171	28.759	29.102
3.	Paju Epat	3.310	3.048	6.358	6.465
4.	Awang	3.219	3.090	6.309	6.134
5.	Patangkep Tutui	3.641	3.420	7.061	7.034
6.	Dusun Tengah	12.515	12.026	24.541	24.913
7.	Raren Batuah	4.447	4.193	8.640	8.494
8.	Paku	4.656	4.322	8.978	8.783
9.	Karusen Janang	2.647	2.495	5.142	5.412
10.	Pematang Karau	6.643	6.220	12.863	12.670
	Jumlah	59.047	56. 153	115.200	115.406

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur (Data diterima 2 Maret 2023) dan Data BPS Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2023)

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Timur Tahun 2022 dapat di lihat pada Tabel 1.3.3 berikut:

Tabel 1.3.3

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	4.391	4.157	8.548
5-9	4.341	4.212	8.553
10-14	4.836	4.494	9.330
15-19	5.262	4.739	10.001
20-24	5.087	4.800	9.887
25-29	4.741	4.498	9.239
30-34	4.636	4.579	9.215
35-39	4.795	4.604	9.399
40-44	4.646	4.455	9.101
45-49	4.347	4.158	8.505
50-54	3.740	3.413	7.153
55-59	2.941	2.642	5.583
60-64	2.173	2.045	4.218
65-69	1.527	1.444	2.971
70-74	851	932	1.783
75+	841	1.079	1.920
Jumlah Total	59.155	56.251	115.406

Sumber Data: BPS Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2023)

Berdasarkan Tabel 1.3.3 di atas terlihat jumlah penduduk terbanyak berasal dari kelompok umur 15 – 19 tahun sebanyak 10.001 Jiwa, diikuti kelompok umur 20-24 Tahun sebanyak 9.887 Jiwa. Kita dapat melihat bahwa penduduk Kabupaten Barito Timur didominasi oleh kelompok umur kaum muda yang masih dalam usia sekolah ataupun baru menyelesaikan pendidikan. Sedangkan jumlah kelompok umur paling sedikit adalah kelompok penduduk usia 70-74 yaitu sebanyak 1.783 Jiwa.

Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur disebabkan adanya perbedaan pendekatan atau metoda perhitungan. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Barito Timur adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Barito Timur, sedangkan menurut Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan data dari Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan.

3. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk, Ratio Jenis Kelamin Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 menurut data BPS Kabupaten Barito Timur dapat dilihat pada Tabel 1.3.4 berikut ini :

Tabel 1.3.4

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2022 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1.	Benua Lima	6.399	0,41	5,54	24,80	106
2.	Dusun Timur	29.102	2,72	25,22	33,54	105
3.	Paju Epat	6.465	4,47	5,60	9,73	119
4.	Awang	6. 134	0,86	5,32	30,22	106
5.	Patangkep Tutui	7.034	-0,30	6, 10	27,58	102
6.	Dusun Tengah	24.913	0,78	21,59	67,15	100
7.	Raren Batuah	8.494	0,88	7,36	45,67	102
8.	Paku	8.783	1,36	7,61	32,29	108
9.	Karusen Janang	5.412	2,31	4,69	30,40	110
10.	Pematang Karau	12.670	1, 10	10,98	21,88	107
	Jumlah	115.406	1,47	100	30,10	105

Sumber Data: BPS Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Barito Timur Dalam Angka 2023)

Laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2020–2022 adalah sebesar 1,47.

Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Dusun Timur dengan penduduk sebanyak 29.102 jiwa yang mencakup 25,22% penduduk Kabupaten Barito Timur.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Dusun Tengah

dengan kepadatan 67 – 68 jiwa/km² dan jumlah penduduk 24.913 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Paju Epat dengan kepadatan 9 – 10 jiwa/km² dan jumlah penduduk 6.465 jiwa. Kecamatan Dusun Tengah sangat strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan yang terletak di daerah segi tiga antara Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan, sedangkan Kecamatan Dusun Timur merupakan pusat pendidikan dan pemerintahan dan mulai berkembang ke arah kota perdagangan.

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Barito Timur adalah 105, artinya terdapat 105 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Komposisi penduduk Kabupaten Barito Timur terdiri atas 59.155 penduduk laki-laki dan 56.251 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Barito Timur yang tergolong jarang, yakni sekitar 30 Jiwa per Km².

4. Jumlah PNS

Data PNS Daerah di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2022 seperti terdapat di Tabel 1.3.5 berikut ini:

Tabel 1.3.5

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2022

Pangkat/ Golongan / Ruang	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I/A (Juru Muda)	2	-	2	2	-	2
I/B (Juru Muda Tingkat I)	2	-	2	1	-	1
I/C (Juru)	3	-	3	4	-	4
I/D (Juru Tingkat I)	13	3	16	11	2	13
Jumlah Golongan I	20	3	23	18	2	20
II/A (Pengatur Muda)	16	3	19	12	4	16
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	46	29	75	24	19	43
II/C (Pengatur)	85	92	177	73	99	172
II/D (Pengatur Tingkat I)	182	110	292	190	110	300
Jumlah Golongan II	329	234	563	299	232	531
III/A (Penata Muda)	152	220	372	157	208	365
III/B (Penata Muda Tingkat I)	227	406	633	207	375	582
III/C (Penata)	252	347	599	207	312	519
III/D (Penata Tingkat I)	240	302	542	305	384	689
Jumlah Golongan III	871	1,275	2,146	876	1,279	2,155

Lanjutan Tabel 1.3.5:

Pangkat/ Golongan / Ruang	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV/A (Pembina)	183	225	408	178	219	397
IV/B (Pembina Tingkat I)	162	239	401	150	228	378
IV/C (Pembina Utama Muda)	21	3	24	19	3	22
IV/D (Pembina Utama Madya)	1	-	1	1	-	1
IV/E (Pembina Utama)	-	-	-	-	-	-
Jumlah Golongan IV	367	467	834	348	450	798
Jumlah Total	1,587	1,979	3,566	1,541	1,963	3,504

Sumber Data : BKPSDM Kabupaten Barito Timur (Data Diterima 3 Maret 2023)

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Barito Timur Tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 1,74% dibandingkan Tahun 2021 dari 3.566 orang menjadi 3.504 orang. Penurunan jumlah PNS ini disebabkan mutasi pegawai keluar daerah, pensiun dan meninggal dunia.

Berdasarkan kepangkatan maka PNS Daerah terbanyak yaitu 2.155 orang Golongan III, diikuti Golongan IV sebanyak 798 orang, Golongan II sebanyak 531 orang, dan terendah dicapai oleh Golongan I sebanyak 20 orang.

Jumlah PNS Daerah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2022 dapat di lihat pada Tabel 1.3.6 berikut:

Tabel 1.3.6

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2022

Pangkat/ Golongan / Ruang	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	10	-	10	9	-	9
SLTP/Sederajat	26	4	30	18	2	20
SMA/Sederajat	332	178	510	285	151	436
Diploma I, II/Akta I,II	65	101	166	54	71	125
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	121	298	419	103	265	368
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	1,033	1,398	2,431	1,072	1,474	2,546
Jumlah Total	1,587	1,979	3,566	1,541	1,963	3,504

Sumber Data : BKPSDM Kabupaten Barito Timur (Data Diterima 3 Maret 2023)

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sementara berdasarkan pendidikan pada Tahun 2022, PNS terbanyak 2.546 orang memiliki pendidikan tingkat sarjana, kemudian diikuti SMA/sederajat sebanyak 436 orang, dan Diploma III/Akta III/Sarjana Muda sebanyak 368 orang.

5. Realiasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Secara garis besar Pendapatan Daerah terdiri dari sumber penerimaan PAD, dana perimbangan dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 dan 2021 diuraikan sebagaimana dalam Tabel 1.3.7 berikut ini :

Tabel 1.3.7
Perincian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2022 Setelah Perubahan dan Realisasi Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
		(Rp)	(%)	
PENDAPATAN	892.141.035.458,00	965.928.912.769,74	108,27	962.031.902.771,10
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.020.263.451,00	83.650.439.656,45	108,61	98.462.918.758,55
Pendapatan Pajak Daerah	10.910.000.000,00	11.700.585.104,25	107,25	11.328.830.326,40
Pendapatan Retribusi Daerah	4.701.950.000,00	2.544.119.804,00	54,11	2.174.988.530,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.158.036.468,00	14.158.036.468,00	100,00	11.499.947.418,00
Lain-lain PAD yang Sah	47.250.276.983,00	55.247.698.280,20	116,93	73.459.152.484,15
PENDAPATAN TRANSFER	812.910.868.549,00	880.187.448.086,29	108,28	845.645.336.554,55
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	695.838.803.000,00	752.445.141.065,00	108,13	711.889.337.129,00
Dana Bagi Hasil	119.156.107.000,00	194.252.890.381,00	163,02	121.986.404.644,00
Dana Alokasi Umum	437.443.208.000,00	436.257.086.999,00	99,73	437.087.627.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	55.557.477.000,00	52.354.260.414,00	94,23	82.437.021.644,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	83.682.011.000,00	69.580.903.271,00	83,15	70.378.283.841,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	78.780.783.000,00	78.780.783.000,00	100,00	105.530.375.400,00
Dana Insentif Daerah	4.984.971.000,00	4.984.971.000,00	100,00	19.753.148.000,00
Dana Desa	73.795.812.000,00	73.795.812.000,00	100,00	85.777.227.400,00

Lanjutan Tabel 1.3.7

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
		(Rp)	(%)	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.291.282.549,00	48.961.524.021,29	127,87	28.225.624.025,55
Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	28.225.624.025,55
Bantuan Keuangan	38.291.282.549,00	48.961.524.021,29	0,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.209.903.458,00	2.091.025.027,00	94,62	17.923.647.458,00
Pendapatan Hibah - LRA	2.209.903.458,00	2.091.025.027,00	94,62	2.209.903.458,00
Pendapatan Lainnya	-	-	-	15.713.744.000,00

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur (Data unaudited diterima pada 2 Maret 2023*)

Berdasarkan Tabel 1.3.7 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah mencapai 108,27 persen melebihi dari target di Tahun 2022 dan meningkat dari realisasi di Tahun 2021. Sumber pendapatan tertinggi diperoleh dari Pendapatan Transfer dengan realisasi 108,28 persen dari target anggaran Tahun 2022 dan melebihi dari realisasi di Tahun 2021, diikuti oleh PAD dengan capaian di Tahun 2022 sebesar 108,61 persen melebihi dari yang dianggarkan dan meningkat jika dibandingkan realisasi Tahun 2021. Sumber pendapatan ketiga berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi di Tahun 2022 mencapai 127,87 persen dari target dan meningkat jika dibandingkan realisasi Tahun 2021.

PAD Kabupaten Barito Timur meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Sumber PAD terbesar diperoleh dari Lain-lain PAD yang Sah Rp.55.247.698.280,20 diikuti Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.14.158.036.468,00, Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.11.700.585.104,25, dan terendah diperoleh dari Retribusi Daerah sebesar Rp.2.544.119.804,00.

Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp.752.445.141.065,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp.78.780.783.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.49.961.524.021,29. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka Pendapatan Tranfer Tahun 2022 melebihi dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan realisasi Dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil disebabkan kurang salur dari Pemerintah Pusat untuk tahun sebelumnya dan baru direalisasi di Tahun Anggaran 2022.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Dana Hibah-LRA realisasi sebesar Rp.2.091.025.027,00 lebih rendah dari realisasi Tahun 2021. Sedangkan dari Pendapatan Lainnya tidak ada target dan realisasi.

Jika kita perbandingkan kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap total pendapatan, maka kontribusi PAD sebesar 8,66 persen, Pendapatan Transfer sebesar 91,12 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,22 persen.

6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 dan 2022 disajikan dalam uraian Tabel 1.3.8 berikut ini :

Tabel 1.3.8
Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2022 Setelah Perubahan dan Realisasi Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
BELANJA DAERAH	1.061.060.612.393,00	893.611.583.195,35	84,22	920,557,700,398,83
BELANJA OPERASI	720.151.290.301,00	633.391.989.268,35	87,95	614,066,974,595,02
Belanja Pegawai	389.977.757.164,00	347.439.464.519,35	89,09	338.389.678.381,62
Belanja Barang dan Jasa	260.035.045.583,00	228.529.659.212,00	87,88	212.814.960.292,71
Belanja Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	599.999.999,55
Belanja Hibah	51.858.561.079,00	47.547.860.937,00	91,69	51.112.614.751,14
Belanja Bantuan Sosial	17.679.926.475,00	9.275.004.600,00	52,46	11.149.721.170,00
BELANJA MODAL	128.026.474.594,00	103.449.098.767,00	80,80	122.377.243.903,81
Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	1.098.858.088,00	54,94	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.016.029.165,00	16.700.733.622,00	92,70	13.040.086.561,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.837.812.959,00	29.782.859.321,00	93,55	53.555.474.066,27
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.761.106.470,00	55.462.710.136,00	73,21	55.719.743.375,74
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	215.046.000,00	207.889.400,00	96,67	61.939.900,00
Belanja Modal Aset Lainnya	196.480.000,00	196.048.200,00	0,00	-
BELANJA TAK TERDUGA	50.000.000.000,00	9.593.872.583,00	19,19	25.108.799.846,00
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	9.593.872.583,00	19,19	25.108.799.846,00

Lanjutan Tabel 1.3.8:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
BELANJA TRANSFER	162.882.847.498,00	147.176.622.577,00	90,36	159.004.682.054,00
Belanja Bagi Hasil	2.860.900.592,00	2.843.905.141,00	99,41	7.288.350.126,00
Belanja Bantuan Keuangan	160.021.946.906,00	144.332.717.436,00	90,20	151.716.331.928,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(168.919.576.935,00)	72.317.329.574,39	(42,81)	41.474.202.372,27

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur (Data unaudited diterima pada 2 Maret 2023)*

Berdasarkan Tabel 1.3.8 di atas maka dapat dilihat Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 sebesar 84,22 persen dari target capaian Belanja Daerah yang ditetapkan, dengan struktur belanja terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 633.391.989.268,35 atau 87,95 persen dari target belanja, Belanja Modal sebesar Rp. 103.449.098.767,00 atau 80,80 persen dari target belanja, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 9.593.872.583,00 atau 19,19 persen dari target belanja, dan Belanja Transfer sebesar Rp. 147.176.622.577,00 atau 90,36 persen dari target belanja. Pada Tahun 2022 keuangan daerah mengalami surplus sebesar Rp. 72.317.329.574,39.

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rincian anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dapat dilihat pada Tabel 1.3.9 di bawah ini:

Tabel 1.3.9
Pembangunan Daerah di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Setelah Perubahan dan
Realisasi Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	179.994.576.935,00	179.993.085.541,52	99,99	153.520.374.562,25
Penggunaan SILPA	179.994.576.935,00	179.993.085.541,52	99,99	153.520.374.562,25
Penerimaan Kembali Investasi	-	-	0,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.075.000.000,00	11.075.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.075.000.000,00	11.075.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-
PEMBIAYAAN NETTO	168.919.576.935,00	168.918.085.541,52	99,99	138.520.374.562,25
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	241.235.415.115,91	-	179.994.576.934,52

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur (Data unaudited diterima pada 3 Maret 2023)*

Pada tabel 1.3.9 di atas dapat dilihat bahwa Penerimaan Daerah dalam pembangunan di Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 179.994.576.935,00 dan terealisasi sebesar Rp. 179.993.085.541,52 atau 99,99 persen. Jumlah penerimaan pembangunan di Tahun 2022 lebih besar jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Sedangkan besarnya Pengeluaran Daerah dalam pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 11.075.000.000,00 dan dapat direalisasikan 100 persen. Jumlah pengeluaran pembangunan di Tahun 2022 lebih kecil jika dibandingkan dengan Tahun 2021.

Pada dasarnya pembangunan netto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk menutup defisit belanja daerah. Oleh karena itu, besaran defisit belanja daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembangunan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya. Pada Tahun 2022 Pembangunan Netto sebesar Rp. 168.918.085.541,52 dan mengalami surplus sebesar Rp. 72.317.329.574,39 sehingga Sisa Lebih Pembangunan Anggaran (SILPA) Kabupaten Barito Timur sebesar Rp. 241.235.415.115,91.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kerangka anggaran pembangunan daerah Tahun 2022 akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan
2. Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam pengelolaan keuangan berupaya menyesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun prioritas anggaran Kabupaten Barito Timur yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok, dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta adanya keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur sehingga dapat sinergi untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai suatu rencana keuangan tahunan daerah, telah diupayakan dalam penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tema RKP Tahun 2022 **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Maka dengan memperhatikan tema RKP Tahun 2022 dan guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/kota maka ditetapkanlah prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 yaitu **“PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN”**.

Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengambil kebijakan melakukan perubahan RPJMD akibat perubahan kebijakan nasional yang telah terbit setelah penetapan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023. Kebijakan tersebut mempengaruhi kebijakan pembangunan yang diatur dalam RPJMD, dan bersifat wajib untuk diterapkan oleh pemerintah daerah. Alasan lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur adalah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 dan telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam.

Pandemi Covid-19 yang melanda menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan percepatan penanganan *Covid-19* di lingkungan pemerintahan daerah. Realokasi dan refocusing anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2022

digunakan untuk penanganan tanggap darurat pandemi *Covid-19* dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Pada Tahun Anggaran 2022 terjadi Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur yang disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan;
2. Perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan;
3. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan sehingga terjadi pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan dan pengurangan target kinerja, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2022 telah melaksanakan 5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 3 Urusan Pilihan dan 18 Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh 36 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 seperti yang terlampir dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 berikut ini:

Tabel 2.1.1
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.120.070.255,00	77.020.263.451	(33.099.806.804)	(30,00)
4.1.01	Pajak Daerah	16.335.000.000	10.910.000.000	(5.425.000.000)	(33)
4.1.02	Retribusi Daerah	12.274.005.926	4.701.950.000	(7.572.055.926)	(62)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.493.207.046	14.158.036.468	(15.335.170.578)	(52)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.017.857.283	47.250.276.983	(4.767.580.300)	(9)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	780.916.355.990	812.910.868.549	31.994.512.559	4
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	730.418.671.000	774.619.586.000	44.200.915.000	6
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.497.684.990	38.291.282.549	(12.206.402.441)	(24)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.044.400.000	2.209.903.458	(12.834.496.542)	85
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	2.209.903.458	2.209.903.458	100
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.044.400.000	0	(15.044.400.000)	(100)
	Jumlah Pendapatan	906.080.826.246	892.141.035.458	(13.939.790.788)	(2)

Lanjutan Tabel 2.1.1:

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	633.854.857.336	720.151.290.301	86.296.432.965	14
5.1.01	Belanja Pegawai	363.262.526.002	389.977.757.164	26.715.231.162	7
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.795.290.204	260.035.045.583	50.239.755.379	24
5.1.04	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	46.095.347.155	51.858.561.079	5.763.213.924	13
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.101.693.975	17.679.926.475	3.578.232.500	25
5.2	BELANJA MODAL	109.037.748.965	128.026.474.594	18.988.725.629	17
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.007.083.853	18.016.029.165	10.008.945.312	125
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.417.495.663	31.837.812.959	5.420.317.296	21
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.398.123.449	75.761.106.470	3.362.983.021	5
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	215.046.000	411.526.000	196.480.000	91
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0
5.4	BELANJA TRANSFER	152.787.976.300	162.882.847.498	10.094.871.198	7
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.860.900.592	2.860.900.592	0	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149.927.075.708	160.021.946.906	10.094.871.198	7
	Jumlah Belanja	945.680.582.601	1.061.060.612.393	115.380.029.792	12
	Total Surplus/(Defisit)	(39.599.756.355)	(168.919.576.935)	(129.319.820.580)	-327
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.674.756.355	179.994.576.935	129.319.820.580	255
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.674.756.355	179.994.576.935	129.319.820.580	255
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	50.674.756.355	179.994.576.935	129.319.820.580	255
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.075.000.000	11.075.000.000	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.075.000.000	11.075.000.000	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.075.000.000	11.075.000.000	0	0
	Pembiayaan Netto	39.599.756.355	168.919.576.935	129.319.820.580	327
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)	0	0	100

Sumber : BPKAD Kab. Barito Timur (Data diterima pada 8 Maret 2023*)

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

- 1) Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana.
- 4) Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketataan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tuntutan pajak dan retribusi daerah.
- 5) Penerapan Standar Operasional dan Prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Rencana Pendapatan Daerah pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 setelah refocusing sebesar Rp. 892.141.035.458,00 turun sebesar Rp. 13.939.790.788,00 atau 2 persen dari APBD Murni yang dianggarkan sebesar Rp. 906.080.826.246,00.

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap

belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah (PD) maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur harus berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, khususnya pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap PD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada Tahun 2022 ini pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan mengubah prinsip belanja, dari yang menggunakan prinsip money follow function, diubah menjadi money follow program, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran yang lebih proporsional.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja. Penerapan azas efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Tahun 2022 antara lain terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Kebijakan Belanja Operasi pada RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Belanja Pegawai
 - ✓ Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2022 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ke 13 dan ke 14.
 - ✓ Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- ✓ Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- ✓ Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 363.262.526.002,00 pada APBD Murni, pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 389.977.757.164,00 ada penambahan sebesar Rp. 26.715.231.162,00
- Belanja Barang dan Jasa
 - ✓ Merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - ✓ Belanja Barang dan Jasa pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp.209.795.290.204,00 pada APBD Perubahan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 260.035.045.583,00 ada peningkatan sebesar Rp. 50.239.755.379,00
- Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari yang dianggarkan pada APBD Perubahan.
- Belanja Hibah pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp.46.095.347.155,00 pada APBD Perubahan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 51.858.561.079,00 ada peningkatan sebesar Rp. 5.763.213.924,00
- Belanja Bantuan Sosial pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp.14.101.693.975,00 pada APBD Perubahan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 17.679.926.475,00 ada peningkatan sebesar Rp. 3.578.232.500,00.

2) Belanja Modal

Penganggaran belanja modal pada APBD Murni sebesar Rp.109.037.748.965,00 sedangkan pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 128.026.474.594,00 terdapat penambahan sebesar Rp. 18.988.725.629,00.

3) Belanja Tidak Terduga

- Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada

Tahun Anggaran 2022, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

- Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar sebesar Rp.50.000.000.000,- pada APBD murni Tahun 2022 dan tidak mengalami perubahan.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.152.787.976.300,00 pada APBD murni Tahun 2022 sedangkan pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 162.882.847.498,00 terdapat penambahan sebesar Rp. 10.094.871.198,00.

Rencana Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 setelah refocusing sebesar Rp. 1.061.060.612.393,00 naik sebesar Rp. 115.380.029.792,00 atau 12 persen dari APBD Murni yang dianggarkan sebesar Rp. 945.680.582.601,00.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Secara umum penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yang dilaksanakan oleh masing-masing PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2022 yang ditunjang oleh anggaran yang tertuang dalam APBD Kabupaten Barito Timur pada masing-masing PD, kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ditunjukkan dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) untuk masing-masing PD telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dan dijabarkan di dalam RKPD dengan target setiap tahun. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 dilakukan menurut fungsi dan urusan penyelenggaraan pemerintahan yaitu urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan, serta Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum.

A. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosia.

Rincian realisasi anggaran Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada Lampiran 1 dengan diuraikan dalam Capaian program Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 berikut:

Tabel 3.1.1
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dengan penerapan SPM dan tata kelola yang transparan dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	85 Poin				
				Program Pengelolaan Pendidikan					
				- Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	60 Persen	64,57 Persen			
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	91,5 Persen	90,34 Persen	Angka Partisipasi Murni SD adalah angka penduduk umur 7 - 12 tahun yang murni duduk di Pendidikan Sekolah Dasar, sedangkan banyak anak umur 6 tahun yang seharusnya masih menempuh pendidikan Anak Usia Dini telah disekolahkan di Sekolah Dasar dan Anak Usia 12 tahun sudah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sehingga target APM tidak tercapai	Melakukan sosialisasi di Satuan Pendidikan PAUD dan SD tentang usia ideal PAUD dan SD	
								Pembangunan dan rehbilitasi sarana prasarana sekolah baik tingkat PAUD , SD, SMP untuk bisa menampung penduduk usia sekolah	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Perlu tambahan kurikulum di sekolah untuk pelajaran yang berbasis budaya serta adanya dibentuk sekolah dengan basis budaya demi memperkenalkan budaya yang ada di Bumi Jari Janang Kalalawah seperti (Bengkel Budaya Tumet Leut)	Tahun 2022 untuk sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar, di dalam kurikulum tersebut ada revitalisasi bahasa daerah termasuk di dalamnya adalah tumet leut, bagi sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka belajar, tumet leut sebagai bagian dari kegiatan extra kurikuler
								Perlunya SDM tenaga administrasi dengan melalui pelatihan untuk operator sekolah agar bisa menguasai cara mengisi data DAPODIK agar bisa masuk ke aplikasi KRISNA	Dinas Pendidikan tidak ada mengadakan pelatihan untuk operator sekolah tetapi operator dari Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan arahan langsung kepada operator sekolah di Dinas Pendidikan
				- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	77,5 Persen	71,05 Persen	Angka Partisipasi Murni SMP adalah angka penduduk umur 13 - 15 tahun yang murni duduk di Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan banyak anak umur 12 tahun yang seharusnya masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) telah		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pengembangan Kurikulum - Persentase ijin pendidikan yang diterbitkan					
					95,5 Persen	100 Persen			
							Perlu tambahan Kurikulum baik disekolah untuk pelajaran yang berbasis Budaya serta adanya dibentuk sekolah dengan Basis Budaya demi memperkenalkan Budaya yang ada di Bumi Jari Janang Kalalawah seperti (Bengkel Budaya Tumet Leut)	Tahun 2022 untuk sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar, di dalam kurikulum tersebut ada revitalisasi bahasa daerah termasuk di dalamnya adalah tumet leut, bagi sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka belajar, tumet leut sebagai bagian dari kegiatan extra kurikuler	Siswa kurang memahami tentang budaya daerah dan bahasa daerah Kabupaten Barito Timur
							Perlunya Peningkatan SDM Tenaga Administrasi dengan melalui pelatihan untuk operator sekolah agar bisa menguasai cara mengisi data DAPODIK agar bisa masuk ke Aplikasi Krisna	Dinas Pendidikan tidak mengadakan pelatihan untuk operator sekolah secara khusus tetapi operator dari Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan latihan langsung kepada operator sekolah di Dinas Pendidikan	Operator sekolah belum memahami input dapodik terutama untuk sarana prasarana sekolah sehingga sarana prasarana yang mengalami kerusakan tidak dilaporkan ke Kemendikbudristek sehingga sekolah tersebut tidak mendapatkan anggaran untuk rehab sarana prasarana sekolah dari DAK Fisik meskipun Kemendikbudristek memiliki kriteria tertentu dalam menentukan sekolah yang akan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									menerima bantuan DAK Fisik
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas sarpras kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin				
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat -	100 Persen	100 Persen			
				- Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 Persen	100 Persen			
				- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	100 Persen	80 Persen	- Pelayanan ANC sudah dilaksanakan tetapi belum semua memenuhi standar pelayanan meliputi standar pelayanan kuantitas (ibu hamil melakukan kunjungan 4-6 kali selama kehamilan) dan standar kualitas (pelayanan 10T) , - Masih kurangnya sarana dan prasarana di faskes untuk pelayanan terpadu dan berkualitas serta akses menuju faskes yang cukup jauh	- melakukan peningkatan kemampuan tenaga bidan dalam melakukan pelayanan ANC dengan pelatihan , - Dalam hal mendekatkan akses pelayanan pustakmas dapat melakukan konsep Mobil ANC	Memperlancar pelayanan di bidang Kesehatan baik di RSD, Puskesmas, Polindes, dan Pustu maka perlu ditambahkan Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Bidan.
				- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan bersalin	100 Persen	76 Persen	- Pelayanan ibu bersalin sesuai standar adalah harus ditolong oleh 6 tangan dalam hal ini tenaga bidan 2 orang dan dokter sehingga pelayanan tersebut masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya disetiap puskesmas	- Perlu dilakukan sosialisasi ke puskesmas untuk pertolongan persalinan dengan 6 tangan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir - Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar - Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar - persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan - Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	80 Persen 81 Persen 83 Persen 83 Persen 70,31 Persen 33 Persen	Tidak semua bayi dilakukan kunjungan sampai dengan 3 kali, hal ini disebabkan ada beberapa kelahiran menumpang. balita diatas usia 1 tahun mulai kurang aktif datang ke posyandu Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar hanya dilaksanakan 1 kali setahun saat tahun ajaran baru dimulai seharusnya dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun Masih kurangnya informasi tentang pelayanan kesehatan bagi remaja putri dan pasangan calon pengantin di puskesmas Masih banyak lansia yang tidak datang ke posyandu lansia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 1. pada umumnya pasien yang di skrining hanya berasal dari yang berobat ke Fasilitas Kesehatan dan pemeriksaan di posbindu terbatas hanya dengan orang-orang tertentu, 2. Kurang nya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining Deteksi Dini khususnya Hipertensi (Hanya memeriksakan saat kondisi sakit/Tertentu)	dihimbau kepada bidan untuk melakukan kunjungan bayi baru lahir Melakukan jemput bola dengan penimbangan dan pengukuran kerumah balita secara langsung Mengimbau kepada pengelola program untuk melaksanakan penjaraingen anak usia pendidikan dasar di sekolah sebanyak 2 kali dalam 1 tahun Melakukan sosialisasi tentang pelayanan kesehatan bagi remaja putri dan catin Mengoptimalkan peran kader posyandu lansia untuk mengajak lansia agar memeriksakan diri di posyandu lansi terdekat.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar - persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar - Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 	94 Persen 127 Persen 83,99 Persen 75,65 Persen 	Ada beberapa Puskesmas yang belum mencapai target skrining dan BMHP untuk skrining DM ke masyarakat terbatas Melebihi Target Perilaku dan persepsi masyarakat tidak mau datang ke layanan ataupun takut memeriksakan diri jika memiliki gejala ke arah TB, jejaring eksternal pemeriksaan terduga TB masih belum berjalan optimal Masih kurangnya kesadaran kelompok beresiko untuk melakukan deteksi dini HIV.	Optimalisasi skrining Deteksi dini DM di fasilitas kesehatan/posbindu dan Menyediakan BMHP untuk menunjang skrining DM melalui Puskesmas-puskesmas menggiatkan penemuan aktif di PKM baik melalui deteksi dini maupun investigasi kontak khususnya bagi PKM dengan pencapaian SPM yang masih rendah, melakukan sosialisasi atau KIE kepada masyarakat tentang program TB (gejala, pemeriksaan dan pengobatan), berkoordinasi membentuk jejaring internal dan eksternal agar pemeriksaan terduga TB dapat dilakukan oleh semua PKM dengan maksimal terutama menggunakan media pemeriksaan TCM Meningkatkan skrining HIV untuk ibu hamil dan kelompok beresiko dan mengoptimalkan ketersediaan RDT/Rapid Test HIV	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daya Manusia Kesehatan					
				- Persentase SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya	100 Persen	96,14 Persen	masih belum maksimal dalam jumlah untuk mencapai target	tetap mengoptimalkan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui DIKLAT secara formal dan informal dan adanya tambahan anggaran beasiswa kesehatan	Perhatian Pemerintah terhadap pengembangan dan peningkatan mutu SDM melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). dengan adanya pelatihan maka akan meningkatkan SDM kesehatan yang lebih bermutu
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					
				- Persentase sarana kefarmasian yang berizin	100 Persen	100 Persen	peredaran dan izin edar obat yang masih belum diketahui	perlu adanya pengawasan dan pemberian izin secara lebih ketatterhadap apotek dan toko obat	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
				- Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	29,61 Persen	14,9 Persen	Faktor Sosial Ekonomi, Seperti Pendapatan Keluarga, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan. Faktor Lain yang mempengaruhi Pelaksanaan PHBS adalah Faktor Pengetahuan, Akses Pelayanan Kesehatan dan Motivasi.	Mengaplikasikannya di manapun berada, Keterlibatan seluruh anggota keluarga juga diutamakan agar tercipta suasana yang mendukung bagi terbentuknya pola perilaku hidup bersih dan sehat.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>Perlunya perhatian pemerintah terhadap pengembangan dan peningkatan mutu SDM Kesehatan, melalui Pendidikan dan pelatihan (Diklat). Dengan adanya pelatihan maka akan meningkatkan SDM Kesehatan yang lebih bermutu.</p>	<p>Adanya Upaya penambahan ruang perawatan dan bangun baru terkait pengembangan Rumah Sakit di kabupaten Pembangunan RS PRATAMA didaerah yang jauh dari RS Kabupaten untuk menjangkau lebih dekat pelayanan dasar rujukan awal.</p> <p>Melakukan peningkatan kemampuan tenaga bidan dalam melakukan pelayanan ANC dengan pelatihan , - Dalam hal mendekatkan akses pelayanan puskesmas dapat melakukan konsep Mobil ANC</p> <p>Perlu dilakukan sosialisasi ke puskesmas untuk pertolongan persalinan dengan 6 tangan</p> <p>Dihimbau kepada bidan untuk melakukan kunjungan bayi baru lahir</p> <p>Melakukan sweeping penimbangan dan pengukuran kerumah balita</p> <p>Mengimbau kepada pengelola program untuk melaksanakan penjaraingan anak usia pendidikan dasar di sekolah sebanyak 2 kali dalam 1 tahun</p> <p>Melakukan sosislisasi tentang pelayanan kesehatan bagi remaja putri dan catin</p>	<p>meningkatkan status fasilitas kesehatan menjadi pusat rujukan dasar, pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat kabupaten barito timur yang jauh dari kota kabupaten, meningkatkan SDM Kesehatan yang unggul dan berkompeten dibidang keahliannya masing-masing, meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu melahirkan, meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, meningkatkan pelayanan kesehatan bayi dan balita, meningkatkan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, meningkatkan pelayanan kesehatan usia produktif, meningkatkan pelayanan kesehatan usia lansia,</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Mengoptimalkan peran kader posyandu lansia untuk mengajak lansia agar memeriksakan diri di posyandu lansia terdekat. Optimalisasi peran posbindu dalam melakukan pelayanan di masyarakat terutama Deteksi Dini PTM, Memperluas sasaran skrining PTM ke sektor yang lain (Sekolah, kantor-kantor Pemerintah, dll) Optimalisasi skrining Deteksi dini DM di fasilitas kesehatan/posbindu dan Menyediakan BMHP untuk menunjang skrining DM melalui Puskesmas-puskesmas Memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan adanya dokter spesialis jiwa dengan mengadakan kerjasama dgn rumah sakit jiwa Kalawa Atei untuk pengobatan bagi pasien dgn masalah kesehatan jiwa dan home visit untuk odgj dengan pasung. Di awal tahun 2023 menyebarluaskan form deteksi dini gangguan kesehatan jiwa ke puskesmas" di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten Barito Timur dan memberikan target yg harus dicapai oleh Puskesmas di wilayah kerja masing-masing	meningkatkan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular khususnya Hipertensi, meningkatkan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular khususnya Diabetes Melitus, meningkatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa, meningkatkan pelayanan kesehatan Penyakit menular khususnya TB, meningkatkan pelayanan kesehatan penyakit menular khususnya HIV

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								<p>sebagai acuan kerja yg harus dicapai oleh Puskesmas dlm 1 tahun kedepannya</p> <p>Menggiatkan penemuan aktif di PKM baik melalui deteksi dini maupun investigasi kontak khususnya bagi PKM dengan pencapaian SPM yang masih rendah, melakukan sosialisasi atau KIE kepada masyarakat tentang program TB (gejala, pemeriksaan dan pengobatan), berkoordinasi membentuk jejaring internal dan eksternal agar pemeriksaan terduga TB dapat dilakukan oleh semua PKM dengan maksimal terutama menggunakan media pemeriksaan TCM</p> <p>Meningkatkan skrining HIV untuk ibu hamil dan kelompok beresiko dan mengoptimalkan ketersediaan RDT/Rapid Test HIV</p>	
							<p>Serta memperlancar pelayanan dibidang Kesehatan baik di RSUD, Puskesmas, Polindes dan Pustu maka perlu ditambahkan Dokter Spesialis , Dokter Umum dan Bidan.</p> <p>sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui</p>	<p>Adanya penambahan ruang perawatan dan bangun baru terkait pengembangan Rumah Sakit di kabupaten</p>	<p>Upaya kesehatan menjadi pusat rujukan dasar</p>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
				- Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95,6 Persen	89,38 Persen	Perubahan prioritas item pekerjaan SPAM, dari penambahan Sambungan Rumah ke Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Distribusi Utama.	melakukan pendataan pada Daerah yang menjadi prioritas	
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					
				- Tingkat penyediaan Sarana Persampahan	80 Persen	80 Persen			
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
				- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92,56 Persen	86,05 Persen	Terjadi inflasi harga, seiring kenaikan harga BBM, sehingga pembiayaan Infrastruktur sanitasi menjadi lbh mahal dr perencanaan awal, sehingga jumlah capaian pembangunan berkurang.	melakukan pendataan pada rumah yang belum terpasang Tangki Septik sehingga dapat di laksanakan pada tahun berikutnya	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					
				- Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan	80 Persen	80,25 Persen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				aliran air tidak tersumbat					
				- Persentase Luasan daerah yang tergenang	70 Persen	50,05 Persen			
				Program Pengembangan Permukiman					
				- Persentase Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah dalam kondisi baik	95 Persen	95,02 Persen			
				Program Penataan Bangunan Gedung					
				- Rasio kepatuhan IMB	80 Persen	100 Persen			
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya					
				- Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	80 Persen	60 Persen	RDTR masih dalam Proses Reviuw	Melanjutkan proses review pada tahun 2023 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023	
				Program Penyelenggaraan Jalan					
				- Persentase jalan dalam kondisi mantap	76 Persen	67,61 Persen	-Tingginya intensitas curah hujan pada tahun 2022 sehingga ada beberapa titik yang sulit untuk ditangani sehingga proses penanganan menjadi terhambat dan Biaya penanganan lebih mahal sehingga mempengaruhi kuantitas volume pekerjaan dengan kualitas sesuai dengan	Penanganan tetap dilakukan pada titik jalan yang vital dan merupakan Akses Utama yang digunakan Masyarakat.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							spesifikasi Teknis.		
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
				-	40 Persen	28 Persen	Belum ada Pelatihan untuk peningkatan kompetensi terkait jasa konstruksi di Kab. Barito Timur pada Tahun 2022	Kegiatan Pelatihan terkait Peningkatan Kompetensi Jasa Konstruksi tetap diprogram pada tahun 2023	
				-	2 Persen	100 Persen			
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					
				-	90 Persen	80 Persen	RDTR masih dalam Proses Review	Melanjutkan proses review pada tahun 2023 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023	
							Perlunya meningkatkan rasio dan letak luas Kawasan pemukiman rawan banjir dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengaman sungai melalui normalisasi Sungai, Pemasangan turap penangkis banjir Dan saluran pembuang pada kawasan rawan banjir. Untuk meningkatkan Rasio luas daerah irigasi dengan melakukan penanganan terhadap saluran Irigasi Primer dan sekunder yang menjadi prioritas sehingga dapat menunjang perekonomian daerah Barito timur	Melakukan Penanganan Pada kawasan permukiman rawan banjir dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengaman sungai melalui normalisasi Sungai, Pemasangan turap penangkis banjir Dan saluran pembuang pada kawasan rawan banjir. Untuk meningkatkan Rasio luas daerah irigasi dengan melakukan penanganan terhadap saluran Irigasi Primer dan sekunder yang menjadi prioritas sehingga dapat menunjang perekonomian daerah Barito timur	
							Persentase pada titik jalan yang merupakan akses utama yang digunakan masyarakat umum perlu peningkatan.	Melakukan penanganan Dengan meningkatkan struktur dan fungsi jalan pada titik2 jalan yang menjadi akses utama	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								yang digunakan Masyarakat baik jalan Kabupaten maupun jalan lingkungan Agar masyarakat dapat berkendara dengan aman dan nyaman.	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan lingkungan pemukiman dan perumahan yang sehat	Program Pengembangan Perumahan					
				<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten - Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota 	0 Persen	0 Persen	Belum ada SK Kepala Daerah Terkait Kawasan Rawan Bencana di Kab.Barito Timur	Melakukan Koordinasi dengan BPBD Kab. Barito Timur terkait Data Wilayah Rawan Bencana, sehingga bisa tepat sasaran	
				Program Kawasan Permukiman					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani 	0 Persen	0 Persen	pada Tahun 2022 yang ditangani kawasan Permukiman Kumuh diatas 10 Ha Yaitu Permukiman Kumuh di Kawasan Ampah Kota dan Permukiman Kumuh Kawasan Dusun Timur	Melakukan Pendataan Berapa Ha Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang memerlukan Prioritas Penanganan untuk mencegah meluasnya kawasan permukiman kumuh	
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 	80 Persen	80 Persen			
				Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
				<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil 	20 Persen	20 Persen			
							Perlunya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana banjir, longsor, kebakaran dengan melakukan koordinasi dengan BPBD Damkar, Dinas Sosial dan Bagian Kesra. Terkait daya wilayah rawan bencana sehingga bisa tepat sasaran.	Melakukan koordinasi dengan BPBD DAMKAR terkait SK kepala daerah tentang kawasan rawan bencana sehingga dapat dilakukan penanganan terhadap korban bencana.	
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin				
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 	100 Persen 100 Persen	80,75 Persen 86,52 Persen	Terbatas anggota terampil satoplpp dan kurangnya sarana prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, karena sarana sudah mulai menua	Optimalkan anggota yang ada dan dengan dana pemeliharaan yang ada, anggota melakukan patroli rutin dan patroli gabungan bersama ;TNI dan Polri	
6.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah Program Penanggulangan Bencana - Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana - Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen 80 Poin 60 Persen 60 Persen	90,23 Persen 75 Persen 75 peren	Ada beberapa belanja yang tidak terealisasi diakibatkan kondisi harga fluktuatif dan waktu pelaksanaan tidak memungkinkan	Memaksimalkan koordinasi melalui SKPD yang terkait perencanaan dan anggaran	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 	60 Persen	75 Persen			
				<ul style="list-style-type: none"> Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 	55 Persen	65 Persen			
				<ul style="list-style-type: none"> - Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 	120 Menit	120 menit			
7.	Sosial	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial	Pemberian jaminan perlindungan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 					
				<ul style="list-style-type: none"> - Nilai LAKIP perangkat daerah 	70 Poin				
				<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Sosial 					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan 	75 Persen	75 Persen			
				<ul style="list-style-type: none"> Program Rehabilitasi 					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sosial					
				- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti yang diusulkan dari masyarakat untuk mendapatkan penanganan sebagian belum tercantum dalam DTKS <i>(Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terdata sebanyak 751 orang, sedangkan jumlah yang mendapat layanan sebanyak 78 org)</i>	75 Persen	10,38 Persen	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti yang diusulkan dari masyarakat untuk mendapatkan penanganan sebagian belum tercantum dalam DTKS <i>(Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terdata sebanyak 751 orang, sedangkan jumlah yang mendapat layanan sebanyak 78 org)</i>	Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berjenjang dari tingkat desa	-
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					
				- Persentase fakir miskin yang mendapat bantuan	80 Persen	11,18 Persen	Data diperoleh langsung dari lapangan, dari Pekerja Sosial Masyarakat maupun laporan secara langsung dari masyarakat yang selanjutnya diverifikasi dan validasi. Hasilnya akan disinkronisasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemberian bantuan kepada Fakir Miskin dilakukan berdasarkan skala prioritas menyesuaikan jumlah bantuan yang tersedia	Secara bertahap pada tahun berikutnya bagi Fakir Miskin yang belum menerima bantuan pada tahun sebelumnya dengan tetap mengedepankan skala prioritas menyesuaikan jumlah bantuan yang tersedia	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							prioritas dengan syarat sudah masuk dalam DTKS <i>(Jumlah Fakir Miskin dalam DTKS sebanyak 28.258 orang, sedangkan jumlah yang mendapat bantuan sebanyak 3.159 orang)</i>		
				Program Penanganan Bencana					
				- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	75 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					
				- IKM terhadap pengelolaan Taman Makam Pahlawan	90 Persen	90 Persen	-		

Analisa pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

➤ Dinas Pendidikan

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud); Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

a. Masalah yang dihadapi

- Angka Partisipasi Murni SD adalah angka penduduk umur 7 - 12 tahun yang murni duduk di Pendidikan Sekolah Dasar, sedangkan banyak anak umur 6 tahun yang seharusnya masih menempuh pendidikan Anak Usia Dini telah disekolahkan di Sekolah Dasar dan Anak Usia 12 tahun sudah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sehingga target APM tidak tercapai.
- Angka Partisipasi Murni SMP adalah angka penduduk umur 13 - 15 tahun yang murni duduk di Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan banyak anak umur 12 tahun yang seharusnya masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) telah disekolahkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Anak Usia 15 tahun sudah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga target APM SMP tidak tercapai.

b. Solusi

- Melakukan sosialisasi di Satuan Pendidikan PAUD dan SD tentang usia ideal PAUD dan SD.
- Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah baik tingkat PAUD , SD, SMP untuk bisa menampung penduduk usia sekolah.

- Perlu tambahan kurikulum di sekolah untuk pelajaran yang berbasis budaya serta adanya dibentuk sekolah dengan basis budaya demi memperkenalkan budaya yang ada di Bumi Jari Janang Kalalawah seperti (Bengkel Budaya Tumet Leut).
- Perlunya SDM tenaga administrasi dengan melalui pelatihan untuk operator sekolah agar bisa menguasai cara mengisi data DAPODIK agar bisa masuk ke aplikasi KRISNA

2. Urusan Kesehatan dan RSUD

➤ Dinas Kesehatan

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi; Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota; Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp dan Ukm di Wilayah Kabupaten/Kota; Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (Tpm) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (Dam); Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga; Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Pelayanan ANC sudah dilaksanakan tetapi belum semua memenuhi standar pelayanan meliputi standar pelayanan kuantitas (ibu hamil melakukan kunjungan 4-6 kali selama kehamilan) dan standar kualitas (pelayanan 10T).
- Masih kurangnya sarana dan prasarana di faskes untuk pelayanan terpadu dan berkualitas serta akses menuju faskes yang cukup jauh.
- Pelayanan ibu bersalin sesuai standar adalah harus ditolong oleh 6 tangan dalam hal ini tenaga bidan 2 orang dan dokter sehingga pelayanan tersebut masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya disetiap puskesmas.
- Tidak semua bayi dilakukan kunjungan sampai dengan 3 kali, hal ini disebabkan ada beberapa kelahiran menumpang.
- Balita diatas usia 1 tahun mulai kurang aktif datang ke posyandu.
- Masih kurangnya informasi tentang pelayanan kesehatan bagi remaja putri dan pasangan calon pengantin di puskesmas.
- Masih banyak lansia yang tidak datang ke posyandu lansia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- pada umumnya pasien yang di skrining hanya berasal dari yang berobat ke Fasilitas Kesehatan dan pemeriksaan di posbindu terbatas hanya dengan orang-orang tertentu.
- Kurang nya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining Deteksi Dini khususnya Hipertensi (Hanya memeriksakan saat kondisi sakit/Tertentu).
- Ada beberapa Puskesmas yang belum mencapai target skrining dan BMHP untuk skrining DM ke masyarakat terbatas.
- Perilaku dan persepsi masyarakat tidak mau datang ke layanan ataupun takut memeriksakan diri jika memiliki gejala ke arah TB, jejaring eksternal pemeriksaan terduga TB masih belum berjalan optimal.
- Masih kurangnya kesadaran kelompok beresiko untuk melakukan deteksi dini HIV.
- Peredaran dan izin edar obat yang masih belum diketahui.

- Faktor Sosial Ekonomi, Seperti Pendapatan Keluarga, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan.
- Faktor Lain yang mempengaruhi Pelaksanaan PHBS adalah Faktor Pengetahuan, Akses Pelayanan Kesehatan dan Motivasi.

b. Solusi

- Melakukan peningkatan kemampuan tenaga bidan dalam melakukan pelayanan ANC dengan pelatihan , dalam hal mendekatkan akses pelayanan puskesmas dapat melakukan konsep Mobil ANC.
- Kurang nya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining Deteksi Dini khususnya Hipertensi (Hanya memeriksakan saat kondisi sakit/Tertentu).
- Perlu dilakukan sosialisasi ke puskesmas untuk pertolongan persalinan dengan 6 tangan.
- Dihimbau kepada bidan untuk melakukan kunjungan bayi baru lahir.
- Melakukan jemput bola dengan penimbangan dan pengukuran kerumah balita secara langsung.
- Menghimbau kepada pengelola program untuk melaksanakan penjaraingan anak usia pendidikan dasar di sekolah sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.
- Melakukan sosislisasi tentang pelayanan kesehatan bagi remaja putri dan catin.
- Mengoptimalkan peran kader posyandu lansia untuk mengajak lansia agar memeriksakan diri di posyandu lansi terdekat.
- Optimalisasi peran posbindu dalam melakukan pelayanan di masyarakat terutama Deteksi Dini PTM, Memperluas sasaran skrining PTM ke sektor yang lain (Sekolah, kantor-kantor Pemerintah, dll) .
- Optimalisasi peran posbindu dalam melakukan pelayanan di masyarakat terutama Deteksi Dini PTM, Memperluas sasaran skrining PTM ke sektor yang lain (Sekolah, kantor-kantor Pemerintah, dll)
- Mengoptimalkan peran kader posyandu lansia untuk mengajak lansia agar memeriksakan diri di posyandu lansi terdekat.
- Optimalisasi skrining Deteksi dini DM di fasilitas kesehatan/posbindu dan Menyediakan BMHP untuk menunjang skrining DM melalui Puskesmas-puskesmas.

- Menggiatkan penemuan aktif di PKM baik melalui deteksi dini maupun investigasi kontak khususnya bagi PKM dengan pencapaian SPM yang masih rendah, melakukan sosialisasi atau KIE kepada masyarakat tentang program TB (gejala, pemeriksaan dan pengobatan), berkoordinasi membentuk jejaring internal dan eksternal agar pemeriksaan terduga TB dapat dilakukan oleh semua PKM dengan maksimal terutama menggunakan media pemeriksaan TCM.
- Meningkatkan skrining HIV untuk ibu hamil dan kelompok beresiko dan mengoptimalkan ketersediaan RDT/Rapid Test HIV.
- Tetap mengoptimalkan peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui DIKLAT secara formal dan informal dan adanya tambahan anggaran beasiswa kesehatan.
- Perlu adanya pengawasan dan pemberian izin secara lebih ketat terhadap apotek dan toko obat.
- Mengaplikasikannya di manapun berada, Keterlibatan seluruh anggota keluarga juga diutamakan agar tercipta suasana yang mendukung bagi terbentuknya pola perilaku hidup bersih dan sehat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

➤ **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan Gedung; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Sda dan Bangunan Pengaman

Pantai pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah Ha Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) di Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

a. Masalah yang dihadapi

- Tingginya intensitas curah hujan pada tahun 2022 sehingga proses penanganan pada wilayah rawan banjir menjadi terhambat dan Penanganan memerlukan Dana yang lebih mahal sehingga mempengaruhi kuantitas pekerjaan namun tetap menjaga Kualitas sesuai Spesifikasi Teknis.
- Lamanya waktu tergenang daerah irigasi yang akan ditangani diakibatkan tingginya intensitas curah hujan sehingga berakibat pada terhambatnya proses Pekerjaan dan meningkatnya biaya penanganan dan mempengaruhi kuantitas pekerjaan irigasi.
- Perubahan prioritas item pekerjaan SPAM, dari penambahan Sambungan Rumah ke Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Distribusi Utama.
- Terjadi inflasi harga, seiring kenaikan harga BBM, sehingga pembiayaan Infrastruktur sanitasi menjadi lbh mahal dr perencanaan awal, sehingga jumlah capaian pembangunan berkurang..
- RDTR masih dalam Proses Reviuw.
- Belum ada Pelatihan untuk peningkatan kompetensi terkait jasa konstruksi di Kab. Barito Timur pada Tahun 2022.
- RDTR masih dalam Proses Reviuw.

b. Solusi

- Penanganan tetap dilakukan pada daerah yang rawan tergenang dan vital untuk meminimalisir dampak banjir.
- Pekerjaan dilakukan dengan tetap menjaga kualitas sesuai dengan spesifikasi Teknis.
- Melakukan pendataan pada Daerah yang menjadi prioritas.
- Melakukan pendataan pada rumah yang belum terpasang Tangki Septik sehingga dapat di laksanakan pada tahun berikutnya.
- Melanjutkan proses review pada tahun 2023 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023.
- Penanganan tetap dilakukan pada titik jalan yang vital dan merupakan Akses Utama yang digunakan Masyarakat.
- Kegiatan Pelatihan terkait Peningkatan Kompetensi Jasa Konstruksi tetap diprogram pada tahun 2023.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

➤ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Telah dilaksanakan Program Kawasan Permukiman; Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu); Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (Sepuluh) Ha; Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota; Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan; Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang Atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan Kecil.

a. Masalah yang dihadapi

- Belum ada SK Kepala Daerah Terkait Kawasan Rawan Bencana di Kab.Barito Timur.

- pada Tahun 2022 yang ditangani kawasan Permukiman Kumuh diatas 10 Ha Yaitu Permukiman Kumuh di Kawasan Ampah Kota dan Permukiman Kumuh Kawasan Dusun Timur.

b. Solusi

- Melakukan Koordinasi dengan BPBD Kab. Barito Timur terkait Data Wilayah Rawan Bencana, sehingga bisa tepat sasaran.
- Melakukan Pendataan Berapa Ha Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang memerlukan Prioritas Penanganan untuk mencegah meluasnya kawasan permukiman kumuh.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

➤ **Satuan Polisi Pamong Praja**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Terbatas anggota terampil satoplpp dan kurangnya sarana prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, karena sarana sudah mulai menua.
- Belum maksimalnya koordinasi dan sosialisasi antar OPD teknis pemilik PERDA dan PERKADA kepada masyarakat dan OPD lainnya.

b. Solusi

- Optimalkan anggota yang ada dan dengan dana pemeliharaan yang ada, anggota melakukan patroli rutin dan patroli gabungan bersama ;TNI dan Polri.
- Memaksimalkan koordinasi dansosialisasi OPD pemang PERDA dan PERKADA kepada Masyarakat dan OPD lainnya.

➤ **Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penanggulangan Bencana; Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana; Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Ada beberapa belanja yang tidak terealisasi diakibatkan kondisi harga fluktuatif dan waktu pelaksanaan tidak memungkinkan.

b. Solusi

- Memaksimalkan koordinasi melalui SKPD yang terkait perencanaan dan anggaran.

B. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Rincian realisasi anggaran Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar dapat dilihat pada Lampiran 1 dengan diuraikan dalam Tabel 3.1.2 berikut:

Tabel 3.1.2
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	91,8 Poin			
				Program Perencanaan Tenaga Kerja					
				- Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	28 Persen	100 Persen		4 Pelatihan yang telah dilaksanakan dari 4 Pelatihan yang direncanakan - Pelatihan Deco - Pelatihan Meubelair aluminium - Pelatihan Tata Rias - Pelatihan Komputer	
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					
				- Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	5 Persen	0,014 Persen	Belum ada data tenaga kerja bersertifikat kompetensi di perusahaan2 karena kurangnya respon dari perusahaan2 untuk memenuhi data yang diminta	Mengevaluasi dan memperbaiki teknis permintaan data ke perusahaan untuk pendataan tenaga kerja bersertifikat. 10 tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari 71.923 tenaga kerja (data BPS 2022)	
		Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja		Program Penempatan Tenaga Kerja					
				- Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar	7,5 Persen	6,44 Persen	Besarnya gap/celah antara lapangan kerja yang tersedia dengan banyaknya pencarian	- Mengembangkan jejaring kerjasama untuk penciptaan dan perluasan kesempatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten			kerja	kerja (bursa kerja) - Menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan dunia kerja - Lapangan kerja yg tersedia 129 - Pencari kerja 2005 org	
		Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial						
			- Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	100 Persen	100 Persen		8 kasus yang diselesaikan dg Perjanjian Bersama (PB) dari 8 kasus yg didaftarkan		
			- Percentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	58 Persen	27,91 Persen	Masih kurangnya pemahaman perusahaan dalam penerapan tata kelola kerja yang layak serta pentingnya kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah	Mengefektifkan lagi pembinaan kepada perusahaan tentang penerapan tata kelola kerja yang layak dan menyiapkan kegiatan untuk "jemput bola" laporan dimaksud. rerata 12 Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dari 43 Perusahaan terdaftar		
							Perlunya melakukan Konsultasi serta koordinasi dengan Institut terkait seperti Disnaker Provinsi Kalteng dan Kemenaker RI untuk Teknis dan Penganggaran Kegiatan Penyusunan RTKD.	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Subbagian Penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Agar dokumen RTKD yang di susun Mengikuti kaidah dan tatacara penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja serta Selaras

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kementerian Ketenagakerjaan RI Dalam Rangka Penyusunan Kegiatan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 proyeksi Tahun 2024-2028 mengenai teknis penyusunan dan penganggaran.	dengan Rencana Tenaga Kerja Nasional dan Rencana Tenaga Kerja Provinsi sehingga produk RTKD dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan Kabupaten Barito Timur.
							Perlunya Pembinaan dan Pelatihan kepada Perusahaan tentang penerapan Tata Kelola Kerja yang layak dan menyiapkan kegiatan serta pendanaan untuk penanganan Laporan dimaksud.	Pembinaan dan pelatihan sudah dilaksanakan pada tahun 2022 Pembinaan dan pelatihan secara triwulan ke perusahaan yang dihadiri perwakilan pekerja dan pengusaha serta menguatkan lembaga-lembaga ketenagakerjaan seperti LKS Bipartit dan Serikat Pekerja serta dilakukan pertemuan dengan pihak Disnaker Provinsi dalam rangka singkronisasi data.	Perselisihan dapat ditangani melalui mediasi sehingga dapat dihindari seminimal mungkin serta dipenuhinya syarat-syarat kerja di perusahaan serta terdatanya semua informasi ketenagakerjaan Hubungan Industrial Kabupaten Barito Timur sampai ketingkat pusat serta satu pandangan dalam memahami perubahan-perubahan regulasi yang ada.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Perlunya melakukan koordinasi atau meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan plotting Area serta perlunya melakukan mediasi antara warga ekstransmigrasi dengan pihak yang menguasai obyek tanah tersebut.	Telah dilakukan koordinasi dengan BPN untuk penyelesaian tumpang tindih lahan dan dilanjutkan dengan pengumpulan data dari masyarakat sebagai bahan mediasi penyelesaian masalah	Selesainya masalah tumpang tindih lahan transmigrasi tanpa ada pihak yang dirugikan
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Peningkatan Peran dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	poin			
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Persentase ARG pada belanja langsung APBD	30 Persen	11,14 persen	Penetapan target yang terlalu tinggi sehingga sulit dicapai karena sebagai perbandingan total pagu kabupaten yg memiliki urusan wajib yg lain	Penyesuaian target dgn mengacu pada target yang ditetapkan oleh provinsi	
				- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 Persen	56,07 persen			
		Penguatan Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak-hak Anak	Program Perlindungan Perempuan - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,012 Persen	0,012 persen	Kesadaran korban kekerasan untuk melapor semakin meningkat	sosialisasi Perda perlindungan Perempuan dan Anak		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Peningkatan Keluarga yang Sehat dan Sejahtera	Program Peningkatan Kualitas Keluarga				
				- Percentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang dibina	100 Persen	100 persen			
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					
				- Percentase Data Gender dan Anak yang dikelola secara uptodate	100 Persen	60 persen	Data yg diperoleh dari OPD/Lembaga msh belum memenuhi kebutuhan data yg ada di formulir data terpilih Gender dan Anak	Advokasi Pengisian sesuai kebutuhan data pada setiap OPD/ Lembaga	Penginfutan Data dilakukan setiap Bulan Maret sesuai permintaan dr pusat (Kementrian PPPA) dan dilakukan pendataan secara manual dari OPD/lembaga tetapi msh belum terpenuhi/kurang sesuai indikator yg sdh ditetapkan pusat.
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					
				- Percentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina	100 Persen	66 persen	tdk semua desa di kab. Bartim yg memiliki lembaga forum anak (101 desa = 67 sdh, 34 belum)	Pembinaan dan Pembentukan lembaga forum anak	
				Program Perlindungan Khusus Anak					
				- Percentase anak korban kekerasan yang ditangani	100 Persen	100 persen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				instansi terkait kabupaten					
							Perlunya mendata ulang serta pemisahan data secara terpilih (Data Gender dan Anak) antara laki – laki dan perempuan secara manual atau melalui aplikasi dan di Uptodate enam bulan sekali sehingga dapat berjalan secara optimal.	Penginfutan Data dilakukan setiap Bulan Maret sesuai permintaan dr pusat (Kementrian PPPA) dan dilakukan pendataan secara manual dari OPD/lembaga tetapi msh belum terpenuhi/kurang sesuai indikator yg sdh ditetapkan pusat.	
3.	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas sektor pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan					
				- Tingkat penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	100 Persen	100 Persen			
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
				- Persentase ketersediaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	100 Persen	0 Persen	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab. Barito Timur Karena Belum ada Perbup/Perda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kab. Barito Timur.	Perlu adanya Pembentukan Perbup/Perda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kab. Barito Timur.	
				- Ketersediaan energi perkapita	100 Persen	100 Persen			
				- Ketersediaan protein perkapita	100 Persen	100 Persen			
				Program Penanganan Kerawanan Pangan					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Percentase desa rawan pangan	100 Persen	0 Persen	Tidak bisa dilaksanakan karena besaran nilai satuan harga berbeda dengan harga aktual di pasar sehingga tidak bisa melaksanakan pemberian bantuan untuk desa yang terindikasi rawan pangan berupa bantuan pangan protein telur.	akan menyusun anggaran akan menyesuaikan dengan harga pasar	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan					
				- Percentase Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi	100 Persen	0 Persen	Pelaku Usaha ada yang menggunakan formalin pada ikan, ikan kering dan Pestisida pada sayur dan buah. Perlunya Peralatan penunjang untuk pengujian sampel untuk keamanan pangan segar. pada tahun 2022 tidak bisa dilaksanakan karena tidak adanya alat pengujian sampel pangan segar. dan kegiatan yang dapat dilakukan hanya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan pada pelaku usaha saja	meningkatkan pengawasan keamanan pangan pada pelaku usaha untuk membeli alat rapid test (Uji) Formalin dan Pestisida	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Perlunya dibentuk Koperasi atau badan Usaha Milik Desa untuk penyediaan pupuk bersubsidi guna mempermudah daya beli masyarakat	Perlu diketahui penunjukan lembaga ataupun perorangan sebagai kios penyalur pupuk bersubsidi hadalah wewenang distributor. Penunjukan sebagai kios pupuk bersubsidi pun harus melalui sistem. Sejauh ini ada 1 kios dan 1 koperasi telah direkomendasikan oleh Dinas, namun masih belum mendapat persetujuan dari Distributor, distributor masih mempertimbangkan kemampuan kios maupun koperasi dalam melaksanakan administrasi yang rumit dalam menyalurkan pupuk bersubsidi. Untuk wilayah lain yg belum memiliki kios pun, masih belum layak di buat kios pupuk bersubsidi karena penebusan di kecamatan-kecamatan tersebut masih kecil. Distributor tidak mau mengambil risiko apabila kios yang ditunjuk nanti mengundurkan diri karena penebusan kecil. Hal ini akan membuat kesulitan bagi ditributor karena harus mengajukan perubahan	Sejauh ini kios penyalur resmi yang telah ada di Barito Timur masih bisa menghandel kebutuhan pupukpetani di wilayah Bartim, namun masih terkendala keterlambatan penyaluran. Terkait penyaluran Pupuk diatur oleh kementerian Perdagangan, jadi diharapkan peran serta oleh Dinas Perdagangan, karena payung hukum penyaluran diatur oleh Kementerian Perdagangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								ulang ke sistem dikarenakan ada kios yang mengundurkan diri dan Dinas juga harus mengajukan perubahan RDKK ke Pusat karena ada perubahan data di RDKK terkait kios.	
							Perlunya pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan serta desa bekerjasama dengan perusahaan terkait untuk penyediaan pupuk bersubsidi.	Penyaluran Pupuk bersubsidi bersasarkan Permendag Nomor 4 Tahun 2023 hanya boleh dilakukan oleh Holding BUMN, Distributor dan Kios Resmi, pihak lain diluar itu tidak dapat menyalurkan pupuk bersubsidi karena akan dikenakan sanksi	Kios Pupuk bersubsidi yang telah ada mampu mengehandel kebutuhan pupuk oleh petani. Kegiatan Pengadaan Pupuk bersubsidi diatur oleh Kementerian Perdagangan, jadi diharapkan pihak Dinas Perdagangan juga aktif dalam memonitoring penyalurannya agar berjalan tepat waktu dan lancar.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Peningkatan SDM tenaga penyuluh melalui bimbingan teknis dan pelatihan.	Mengikuti Pelatihan untuk Penyuluh Pertanian, Petani dan Insan Pertanian yang diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDA Pertanian Kementerian secara online. Penyelenggaraan Pelatihan Tematik yang dilaksanakan pada 10 BPP Se Kabupaten Barito Timur	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh Pertanian, Petani dan Insan Pertanian melalui pendidikan dan pelatihan
4.	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
				- Tingkat Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	20 Persen	20 Persen			
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					
				- Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	20 Persen	13,68 Persen			
5.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin				
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup					
				- Persentase rencana lingkungan hidup	100 Persen	100 Persen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				yang disusun dan ditetapkan					
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
				- Tingkat pengendalian terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	60 Persen	60 Persen			
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)					
				- Persentase Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Sumber Daya Alam/Lingkungan Hidup yang dikelola	25 Persen	25 Persen			
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					
				- Tingkat Pengawasan dan Pemantauan serta Verifikasi dan Kepatuhan Administrasi Pengelolaan Limbah B3	60 Persen	80 Persen			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
				- Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	75 Persen	52,17 Persen	Dari 23 Perusahaan yang ada hanya 12 perusahaan yang mentaati	Sosialisasi pembinaan dan pengawasan lebih diintensifkan	
			Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH					
				- Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	1 Obyek	0 Obyek	Pemetaan Obyek belum optimal, sehingga calon MHA belum bisa ditentukan	Melaksanakan pemetaan obyek lebih mendalam dan kerjasama dengan kademangan se Kabupaten Barito Timur	
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					
				- Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan pendidikan lingkungan hidup melalui pelaksanaan Gerakan PBLHS	25 Persen	25 Persen	Belum semua sekolah mendapatkan program PBLHS karena belum ada sokongan dari pihak ke 3	Mendorong pihak ke 3 untuk melaksanakan program CSR terkait bidang pendidikan khususnya program PBLHS	
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Untuk Masyarakat					
				- Persentase masyarakat yang mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup	25 Persen	25 Persen	1. Ada satu orang penerima penghargaan perempuan pemerhati lingkungan yang memenuhi kriteria untuk dinilai pada tahun 2022 2. Penilaian kota bersih dan sehat dan kegiatan penilaian belum dilaksanakan pada tahun 2022	1. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada pemerhati lingkungan terkait penghargaan lingkungan hidup 2. Siap menindaklanjuti petunjuk KLHK untuk prosedur selanjutnya.	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					
				- Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	70 Persen	100 Persen	Pengaduan Masyarakat, selama tahun 2022, hanya ada satu pengaduan, penyebabnya karena aktivitas perusahaan sampai saat ini belum mendapat laporan akan hasil mediasi, sehingga tidak diketahui keberhasilan mediasi tersebut (Rekomendasi DPRD)	Memberitahukan dan dalam upaya secara teus menerus kepada pihak-pihak yang bertikai untuk selalu menyerahkan hasil mediasi kepada pihak DLH	Megoptimalkan upaya pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan dan berupaya memberikan sanksi administrasi kepada pihak perusahaan yang tidak taat
				Program Pengelolaan Persampahan					
				- Persentase sampah yang tertangani	93 Persen	93 Persen	Untuk presentase sampah yang tertangani memang mencapai 93%, namun masih diperlukan pelayanan untuk satu Kabupaten, sedangkan selama ini hanya mengangkut sampah di 3 Kecamatan saja	Menambah daerah layanan angkutan persampahan dengan menambah sarana dan prasarana	Penanganan TPA akan terus dioptimalkan ditahun-tahun mendatang, dan untuk tempat TPS akan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan komunikasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									dengan masyarakat sekitar. Selain itu pada akhir tahun 2022 dan 2023 telah menambah armada truk armroll melalui dana APBD Disarankan untuk mengolah sampah
							Perlunya dorongan dari pihak ke – 3 untuk melaksanakan program CSR terkait bidang Pendidikan Khususnya program PBLHS.	DLH sebagai fasilitator kegiatan Adiwiyata yang mendukung PBLHS, akan terus mendorong pihak ke 3, yaitu perusahaan Perkebunan dan Pertambangan di willyah Kabupaten Bartim untuk memberikan CSR/bantuan di bidang Pendidikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kab Bartim	
							Perlu dilakukan sosialisasi / himbauan kepada masyarakat terkait cara membedakan antara sampah Organik, Sampah Non Organik dan Sampah Medis	Megoptimalkan upaya pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan dan berupaya memberikan sanksi administrasi kepada pihak perusahaan yang tidak taat Penanganan TPA akan terus dioptimalkan ditahun-tahun mendatang, dan untuk tempat TPS akan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								setempat dan komunikasi dengan masyarakat sekitar. Selain itu pada akhir tahun 2022 dan 2023 telah menambah armada truk armroll melalui dana APBD	
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah	93,75 Poin	90,42 Poin	Terbatasnya SDM dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja OPD	Mengadakan latihan/Bimtek untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	
				Program Pendaftaran Penduduk - Tingkat Perekaman KTP elektronik	93,45 Persen	93,6 Persen	Tidak Ada Permasalahan	Tidak Ada Permasalahan	1. perlu dilakukanya pendataan ulang terkait data penduduk baik untuk tingkat kabupaten, kecamatan dan Desa 2. perlunya pelatihan dan pelaksanaan pencetakan E-KTP, KK, KIA, Akta, serta pencantuman Title/ Gelar Telah melakukan kegiatan bimtek online dalam

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									penginputan Data Penduduk
				- Percentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	35,25 Persen	39,21 Persen	Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mendaftarkan KIA	Pelayanan Keliling/Jemput Bola Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan	-
				Program Pencatatan Sipil					
				- Tingkat Kepemilikan akta kelahiran	100 Persen	86,84 Persen	adanya kerusakan server data induk yang mengakibatkan data entri pemilik akta kelahiran	melakukan entry data ulang	
				- Rasio pasangan berakte nikah	20,3 Persen	33,6 Persen			-
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
				- Percentase informasi administrasi kependudukan yang dikelola	70 Persen	100 Persen	Perangkat untuk menajemen hak akses databse kependudukan terbatas	Pengadaan Peralatan Hak Akses Database Kependudukan	-
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan					
				- Percentase Profil Kependudukan yang disediakan secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	Tidak ada Permasalahan	Tidak ada Permasalahan	--
							Perlu dilakukannya pendataan ulang dalam terkait Data Penduduk baik untuk tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Melaksanakan Konsolidasi Data Penduduk Tingkat Kab,Kecamatan dan Desa Dalam meningkatkan keakuratan Data Penduduk	Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kab. Barito Timur
							Perlunya pelatihan dalam pelaksanaan pencetakan E-Ktp KK,	Telah melakukan kegiatan bimtek online dalam penginputan	meningkatkan kemampuan SDM dalam

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							KIA, dan AKTA, serta pencantuman title/gelar	Data Penduduk	meningkatkan Kinerja Pelayanan OPD
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin				
				Program Peningkatan Kerjasama Desa - Persentase kerjasama antar Desa yang difasilitasi	65 Persen	0 Persen	Rencana Kerjasama Antar Desa berupa pengolahan produk anyam-anyaman belum bisa dilaksanakan pada tahun 2022 karena dari 15 Desa yang didata, ada 10 Desa yang belum mendapat pelatihan	pada tahun 2023 akan melaksanakan pelatihan sekaligus melakukan kerjasama antar desa dalam pengolahan produk anyam-anyaman	Melakukan pelatihan pengolahan produk anyam-anyaman
				Program Administrasi Pemerintahan Desa - Persentase desa dengan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan yang difasilitasi	100 Persen	100 Persen	-	-	-
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat - Persentase PKK Aktif			-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Percentase LKD Berprestasi	35 Persen	0 Persen	Masih terbatasnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak karena belum sepenuhnya pulih dari Pandemi Covid-19	Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif dan mengerakkan swadaya gotong-royong masyarakat. Mengikutsertakan LKD dalam pelaksanaan event-event baik ditingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional	Melakukan pembinaan terhadap BUMDes. Pengelolaan BUMDes sudah berdasarkan potensi desa dan keunggulan wilayah. Untuk usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes sudah berdasarkan analisis kelayakan usaha yang dibuat oleh masing-masing BUMDes dan diajukan kepada Camat untuk direkomendasikan pencairannya berdasarkan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. 10 Bumdesma di setiap Kecamatan, 14 Bumdesmart sudah terbangun. untuk 2023 Bumdesmart 12 target

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Perlunya pembukaan lapangan pekerja baru bagi masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan masyarakat melalui kerajinan lokal seperti pembuatan makan ringan, anyaman, mebel dan lain-lain.	Melakukan pelatihan pengolahan produk anyam-anyaman	
							Perlu adanya perbaikan tata Kelola pengembangan infrastruktur Kawasan pedesaan terkhusus di daerah terpencil dan perbatasan dengan wilayah Kalimantan Selatan.		
							Perencanaan pengelolaan Bumdes harus melihat peluang pasar dan kondisi wilayah.	Melakukan pembinaan terhadap BUMDes. Pengelolaan BUMDes sudah berdasarkan potensi desa dan keunggulan wilayah. Untuk usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes sudah berdasarkan analisis kelayakan usaha yang dibuat oleh masing-masing BUMDes dan diajukan kepada Camat untuk direkomendasikan pencairannya berdasarkan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								10 Bumdesma di setiap Kecamatan, 14 Bumdesmart sudah terbangun. untuk 2023 Bumdesmart 12 target	
							OPD terkait melakukan perbaikan dan validasi data KK miskin setelah pandemi Covid 19, serta tetap melakukan penyaluran BLT masyarakat miskin khusus terdampak Covid 19 serta menumbuhkan wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pemberdayaan oleh OPD dan UMKM serta pelatihan keterampilan bagi pendidikan rendah		Verifikasi dan Validasi data tetap dilakukan melalui bidang sosial dan melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Penyaluran BLT tetap dilaksanakan sesuai update hasil verifikasi dan validasi dan dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Tahun 2023 akan dilaksanakan pelatihan peningkatan peluang usaha ekonomi kreatif yang salahsatunya melaksanakan pelatihan-pelatihan kerajinan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan	Peningkatan Keluarga yang sehat dan sejahtera	Program Pengendalian Penduduk - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)					
					2,3 Poin	2,81 poin			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Keluarga Berencana		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan - Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80,71 Persen 10,9 Persen 90 Persen 38 Persen	74,07 persen 9,5 persen 30 persen 48 persen	PUS pasca melahirkan yang belum ber-KB sehingga tdk tercatat di SIGA	Gerakan Pelayanan KB gratis di faskes setiap kecamatan	
9.	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	70 Poin				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja lalu lintas kabupaten (V/C Ratio) 	38 Persen	1,67 Persen	belum tersedianya angkutan umum perintis pedesaan di kab. Barito timur	Pengoperasian Angkutan Perintis direncanakan TA. 2024 Bersumber dari APBN pada 2 Trayek yang direncanakan	1). Melengkapi Data Dukung Usulan : <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Lintasan Trayek - Panjang Lintasan - Potensi Kantong Penumpang 2). Survey Data Dukung
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 	38 Persen	104,3 Persen			
				Peningkatan Dermaga dan Sungai untuk menunjang Ibukota baru	Program Pengelolaan Pelayaran				
				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah orang/barang melalui dermaga per tahun 	520 Orang	6240 Orang	belum beroperasinya pelabuhan telang baru	Pembentukan dan Pengurusan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Usaha Kepelabuhan Untuk Kegiatan dan Anggaran sudah melekat pada Sekretariat Daerah	pendirian perusa sedang dalam proses
							Perlu dibentuk Pendirian Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Badan Usaha Pelabuhan serta pengurusan perijinan Pelabuhan sampai antar pulau.	Pendirian perusa sedang dalam proses	
							Perlunya disediakan angkutan Umum (Perintis) Kabupaten, Kecamatan dan Desa.	1). Melengkapi Data Dukung Usulan : <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Lintasan Trayek - Panjang Lintasan - Potensi Kantong Penumpang 2). Survey Data Dukung 	
10.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika,	Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persandian dan Statistik	Transparan	Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	95 Poin				
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					
				- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75 Persen	28 Persen	Belum memadainya SDM dengan kompetensi bidang pemrograman, pengelolaan jaringan dan server di Dinas Kominfo	Pengadaan SDM dengan kompetensi bidang pemrograman, pengelolaan jaringan dan server untuk Dinas Kominfo	
				- Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	75 Persen	64,29 Persen	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum terbentuk	Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Draf SK PPID sedang dipersiapkan	
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					
				- Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75 Persen	77 Persen			
							Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas melalui system kontrak, dan penambahan anggaran untuk pengembangan Aplikasi perlunya rekrutmen baru.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur telah mengirim surat dengan Nomor : 800/04/01/Diskominfo/s/2023 Tanggal 03 Januari 2023 kepada Bupati Barito Timur Cq.	Untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas (daftar usulan terlampir)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur	
							Perlunya pengembangan Sistem Jaringan Internet di Kawasan pedesaan yang terisolir.	Pada Tahun 2022 Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik mendapatkan bantuan pembangunan menara BTS sebanyak 20 menara yang tersebar di 20 desa pada 10 wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Barito Timur. Bantuan tersebut adalah hasil dari usulan Diskominfoantik Kabupaten Barito Timur kepada BAKTI Kominfo melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Bantuan pembangunan Menara BTS N3T ini merupakan realisasi dari usulan 67 Desa yang terdiri dari 21 Desa kategori Blankspot dan 46 Desa Belum 4G hasil Survei Jaringan Seluler Tahun 2022.	Dalam perkembangannya sampai sekarang prosentase cakupan layanan telekomunikasi seluler di Kabupaten Barito Timur telah mencapai 78% (tujuh puluh delapan persen) sedangkan prosentase cakupan layanan internet masih di angka 58% (lima puluh delapan persen). Pembangunan menara BTS N3T masih terus bergulir seiring target pemerintah dalam pemerataan akses digital. Rincian pembangunan menara BTS sebanyak 20 menara di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 (terlampir).

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	95 Poin	Poin	data belum tersedia		
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					
				- Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	30 Persen	50 Persen			
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					
				- Koperasi yang berkualitas	100 Persen	30 Persen	1. Belum semua melaksanakan RAT, Pendampingan dan Pembinaan. 136 koperasi, 26 RAT (30%). 2. keterbatasan pemahaman dan kompetensi pengurus koperasi dalam pengelolaan koperasi.	1. Meningkatkan Pendampingan dan Pembinaan dalam pembuatan laporan RAT. 2. memberikan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan bagi pengurus dan anggota koperasi sehingga dapat menambah dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola koperasi.	
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					
				- Persentase Koperasi aktif	75 Persen	45,59 Persen	1. Kesadaran pengurus kurang. 2. KUD yang sudah lama berdiri tetapi tidak aktif lagi dan belum ada anggota yang mengaktifkannya kembali.	1. Meningkatkan pendampingan dan Pembinaan 2. Berupaya mengaktifkan kembali KUD yang vakum	
				Program Pendidikan dan Latihan					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perkoperasian					
				- Percentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	90 Persen	56 Persen	Pelaksanaan bertahap sesuai anggaran DAK	Melanjutkan program pelatihan sesuai petunjuk teknis	
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					
				- Percentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	75 Persen	0	1. Belum terpenuhinya persyaratan untuk koperasi layak menerima fasilitas pembiayaan 2. Belum adanya program yang dapat memberikan dukungan pembiayaan khusus untuk tahun 2022	1. Mempersiapkan koperasi-koperasi agar dapat mencapai kriteria koperasi yang layak diberi bantuan melalui peningkatan kegiatan koperasi dan keaktifan anggotanya 2. akan diprogramkan pada tahun berikutnya	
				- Percentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	80 Persen	0,74 Persen	Belum tercapainya nilai maksimal layak pemasaran untuk Produk-produk koperasi	Pembinaan dan Pendampingan dalam meningkatkan kualitas produk-produk koperasi	
				- Percentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	80 Persen	100 Persen	-	-	
				- Percentase	80 Persen	4,4 Persen	1. Belum maksimal	1. Pembinaan dan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kewajiban Anggota Koperasi juga memeriksa laporan Rapat Anggota tahunan (RAT)	DAK dan melakukan pengawasan secara Periodik kepada 60 Koperasi Aktif	
							Memberikan pembinaan dan pengertian tentang peraturan Koperasi dan Merevitalisasi dan mengaktifkan kelembagaan Koperasi apabila ada yang tidak aktif.	Ditambahkan pembinaan Koperasi melalui Revitalisasi Koperasi aktif untuk lebih berkembang baik permodalan dan Usaha, Revitalisasi Koperasi tidak aktif dengan pemilihan pengurus dan juga penyuluhan dan perikutan anggota yang memiliki kepentingan dan usaha sama, Pembinaan dan memasyarakatkan Koperasi melalui Lomba Tangkas Terampil Koperasi kepada seluruh SLTA se Kabupaten Barito Timur	
12.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan Daya Tarik Investasi daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Program Promosi Penanaman Modal - Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	98 Poin 96 Miliar 24 Buah	0 poin 44 Miliar 143 Buah	Perlunya pembuatan MOU (mitra) dengan pihak ke-3. pada Tahun 2022 masih dalam Pasca Covid 19 dan Resesi Ekonomi data yang ada hanya PMDN	Menyiapkan payung hukum agar koperasi bisa bermitra dengan pihak ke 3 Menggiatkan Promosi Investasi di kab. Barito Timur perlu promosi untuk PMA	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pelayanan Penanaman Modal					
				- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	85 Persen	76.06 Persen	Data yang diisi Responden tidak mencapai target	Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
				- Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	87 Persen	100 Persen			
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
				- Persentase data dan informasi Perizinan dan non Perizinan yang dikelola secara uptodate	90 Persen	83.19 Persen	Data dan Informasi belum sepenuhnya secara online	Mengembangkan Penyampaian Data dan informasi Melalui sistem jaringan online	
							Perlu dilakukan survey berkenaan dengan Pelayanan Penanaman Modal serta dilaksanakan pengembangan agar dapat mencapai (indeks Kepuasan Masyarakat) IKM dalam metode tersebut	Melaksanakan Survey IKM dengan metode survey langsung kepada penerima manfaat Pelayanan (publik atau masyarakat) melalui kuisioner dan wawancara dan yang kedua melakukan survey IKM secara tidak langsung kepada publik dengan melalui media sosial baik WA, Facebook atau Instagram	Untuk mengetahui masalah atau kendala pelayanan agar dapat diperbaiki lebih lanjut sehingga meningkatkan indeks kepuasan konsumen atau publik selaku penerima jasa pelayanan
13.	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan	Peningkatan Pelayanan Publik yang Prima dan Transparan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dan Olah Raga				- Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	50,49 Persen	59,32 Persen			
				- Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	63 Persen	59,32 Persen	Masih kurangnya minat pemuda untuk aktif berorganisasi	Mendorong organisasi pemuda untuk aktif ambil bagian dalam pembangunan	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
				- Jumlah prestasi olahraga	12 Mendali	3 Medali	Minimnya event kegiatan setelah pelonggaran kegiatan masyarakat paska Pandemi COVID-19	Mendorong dan memfasilitasi cabang olahraga dan atlit untuk dapat mengikuti event-event kalender olahraga	
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					
				- Tingkat partisipasi dalam kegiatan kepramukaan	20 Persen	25 Persen			
							Perlunya dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk kegiatan atau organisasi kepemudaan dibidang Olah Raga dan Seni Budaya	Membuat kegiatan pelatihan yang mampu mendorong partisipasi pemuda dalam peningkatan kompetensi ketenagaan olahraga	Menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan daya saing keolahragaan yaitu : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) bagi Tenaga Pelatih Olahraga dan Praktisi Olahraga.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah - Persentase perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 	75 Persen	75 Persen			
15.	Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					
				<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat keamanan informasi pemerintah 	75 Persen	75 Persen			
16.	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan Promosi Penyelenggaraan Budaya Tradisional Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				<ul style="list-style-type: none"> - Nilai LAKIP perangkat daerah 	80				
				Program Pengembangan Kebudayaan					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kebudayaan yang dikembangkan 	5	3 Persen	Kekurangan perangkat pengelolaan data	Pengarsipan data manual	
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kesenian tradisional 	10 Persen	5 Persen	Pelaksanaan event-event yang terbatas	Mendukung penyelenggaraan event-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				yang dikembangkan				event mandiri	
				Program Pembinaan Sejarah					
				- Persentase sejarah lokal yang dibina	3 Persen	1,5 Persen	Minimnya informasi mengenai sejarah lokal	Pengumpulan data dan informasi pada lokus terdekat	
				Optimalisasi Pemeliharaan Situs-situs budaya dan Cagar Budaya Daerah	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				
				- Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	70 Persen	40 Persen	Belum ada penetapan hukum sebagai okeh cagar budaya daerah, minimnya informasi dan kurangnya aksesibilitas	Penetapan status cagar budaya melalui SK Bupati, Pendataan dan sosialisasi tentang cagar budaya	
				Program Pengelolaan Permuseuman					
				- Persentase koleksi Museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik	85 Persen	45 Persen	Belum terpenuhinya syarat cagar budaya dan minimnya informasi tentang benda koleksi	Penggalian informasi mandiri	
							Perlu Peningkatan program pembinaan untuk pengembangan kesenian tradisional pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari Pemerintah Daerah terkait pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan permuseuman	- Sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional telah dilaksanakan workshop/pelatihan kepada pelaku seni, memberikan bantuan (hibah) alat-alat musik tradisional kepada beberapa Sanggar Seni dan Budaya dan juga melaksanakan event Seni dan Budaya. - Sebagai bentuk pengawasan terkait Pengelolaan Cagar	- Meningkatkan pelatihan kepada para pelaku seni, memperbanyak event-event seni dan budaya. - Terpeliharanya museum dan benda-benda koleksi terdaftar dan terregistrasi dengan baik.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Budaya telah dilaksanakan inventarisasi dan legalisasi terhadap objek-objek di duga sebagai Cagar Budaya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Barito Timur dan pengelolaan permuseuman telah dilakukan registrasi terhadap benda-benda koleksi museum, penambahan koleksi dan mengusulkan rehab terhadap bangunan museum dan penataan/peremajaan taman.	
							Perlunya meningkatkan anggaran kegiatan yang memadai serta mengkaji kegiatan peningkatan pelestrarian cagar budaya	- Meningkatkan intensitas kegiatan inventarisasi dan legalitas terhadap objek-objek yang di duga sebagai Cagar Budaya. -Menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang kebudayaan dengan disiplin ilmu yang membidangi masalah Cagar Budaya dan Purbakala	- Surat Keputusan Bupati Barito Timur tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
17.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah Program Pembinaan Perpustakaan	89 Persen				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Jumlah pengunjung perpustakaan	8000 Orang	33.33 Orang 5			
18.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Program Pengelolaan Arsip					
				- Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	90 Persen	2,70 Persen	1. Fasilitas Depo Kearsipan tidak memadai sebagai media penyimpanan Arsip fisik, dalam hal ini rak arsip dan box arsip sudah kadaluarsa/rapuh dan gudang penyimpanan terlalu kecil untuk menampung keseluruhan arsip dari seluruh OPD di Kab. Barito Timur	1. Melakukan upaya peningkatan fasilitas depo kearsipan dan berkoordinasi dengan ANRI terkait kualifikasi depo yang berstandar nasional	
							2. Belum maksimalnya sosialisasi terhadap pentingnya penyimpanan arsip dinamis dan statis melalui depo penyimpanan arsip yang tersedia di Dinas Kearsipan Kabupaten	2. Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada seluruh OPD yang memiliki arsip penting agar lebih memahami fungsi dari depo kearsipan yang ada di Dinas Kearsipan Kabupaten	
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Arsip yang dialih mediakan 	98 Persen	50 Persen	<p>Belum tersedianya perangkat IT yang memadai sebagai pengalih media Arsip fisik menjadi Arsip digital</p> <p>Belum tersedianya SDM IT yang terlatih untuk mengoperasikan aplikasi berbasis media elektronik dan digital Software berupa Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) baru di luncurkan pertengahan Agustus 2022, dan di rencanakan awal tahun 2023 membuka akun ke ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), di targetkan tahun 2024 telah terkoneksi ke IKN</p>	<p>Mengupayakan peningkatan perangkat IT yang memadai sebagai media penyimpanan arsip digital</p> <p>Melakukan koordinasi ke Pemda Kab.Bartim terkait tata cara dalam membuka sistem aplikasi SRIKANDI yang dialamatkan ke ANRI</p> <p>Mengupayakan peningkatan SDM yang berkompeten sebagai operator IT</p>	

Analisis pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Tenaga Kerja

➤ **Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; Penerbitan Perpanjangan Imta yang Lokasi Kerja Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Belum ada data tenaga kerja bersertifikat kompetensi di perusahaan2 karena kurangnya respon dari perusahaan2 untuk memenuhi data yang diminta.
- Besarnya GAP/celah antara lapangan kerja yang tersedia dengan banyaknya pencarian kerja.
- Masih kurangnya pemahaman perusahaan dalam penerapan tata kelola kerja yang layak serta pentingnya kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah.

b. Solusi

- 4 Pelatihan yang telah dilaksanakan dari 4 Pelatihan yang direncanakan
 - Pelatihan Deco
 - Pelatihan Meubelair aluminium

- Pelatihan Tata Rias
- Pelatihan Komputer
- Mengevaluasi dan memperbaiki teknis permintaan data ke perusahaan untuk pendataan tenaga kerja bersertifikat.
- 10 tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari 71.923 tenaga kerja (data BPS 2022).
- Mengembangkan jejaring kerjasama untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja (bursa kerja).
- Menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan dunia kerja.
- Lapangan kerja yg tersedia 129 .
- Pencari kerja 2005 orang.
- 8 kasus yang diselesaikan dg Perjanjian Bersama (PB) dari 8 kasus yg didaftarkan.
- Mengefektifkan lagi pembinaan kepada perusahaan tentang penerapan tata kelola kerja yang layak dan menyiapkan kegiatan untuk "jemput bola" laporan dimaksud.
- Rerata 12 Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dari 43 Perusahaan terdaftar

2. Urusan Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak

➤ **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Keluarga; Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (Pha); Program Perlindungan Khusus Anak. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota; Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kegiatan dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pelembagaan Pusat pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota; Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Kesadaran korban kekerasan untuk melapor semakin meningkat.
- Data yg diperoleh dari OPD/Lembaga msh belum memenuhi kebutuhan data yg ada di formulir data terpisah Gender dan Anak.
- Tidak semua desa di kab. Bartim yg memiliki lembaga forum anak (101 desa = 67 sdh, 34 belum).

b. Solusi

- Sosialisasi Perda perlindungan Perempuan dan Anak.
- Advokasi Pengisian sesuai kebutuhan data pada setiap OPD/ Lembaga.
- Pembinaan dan Pembentukan lembaga forum anak

3. Urusan Pangan

➤ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Penanganan Kerawanan Pangan;

Program Pengawasan Keamanan Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penataan Organisasi; Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan; Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab. Barito Timur Karena Belum ada Perbup/Perda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kab. Barito Timur.
- Tidak bisa dilaksanakan karena besaran nilai satuan harga berbeda dengan harga aktual di pasar sehingga tidak bisa melaksanakan pemberian bantuan untuk desa yang terindikasi rawan pangan berupa bantuan pangan protein telur.
- Pelaku Usaha ada yang menggunakan formalin pada ikan, ikan kering dan Pestisida pada sayur dan buah. Perlunya Peralatan penunjang untuk pengujian sampel untuk keamanan pangan segar. pada tahun 2022 tidak bisa dilaksanakan karena tidak adanya alat pengujian sampel pangan segar. dan kegiatan yang dapat dilakukan hanya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan pada pelaku usaha saja.

b. Solusi

- Perlu adanya Pembentukan Perbup/Perda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kab. Barito Timur.
- Akan menyusun anggaran akan menyesuaikan dengan harga pasar.

- Meningkatkan pengawasan keamanan pangan pada pelaku usaha untuk membeli alat rapid test (Uji) Formalin dan Pestisida.

4. Urusan Pertanahan

- **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Tidak ada Permasalahan.

5. Urusan Lingkungan Hidup

- **Dinas Lingkungan Hidup**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Perencanaan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B); Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh); Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak Mha yang Terkait dengan Pplh; Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Persampahan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penataan Organisasi; Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh) Kabupaten/Kota; Pencegahan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Pemulihan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota; Penyimpanan Sementara Limbah B; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/Atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan

Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengakuan Mha, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak Mha yang Terkait dengan Pplh; Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Kabupaten/Kota; Pengelolaan Sampah.

a. Masalah yang dihadapi

- Dari 23 Perusahaan yang ada hanya 12 perusahaan yang mentaati terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab
- Belum semua sekolah mendapatkan program PBLHS karena belum ada sokongan dari pihak ke 3.
- Ada satu orang penerima penghargaan perempuan pemerhati lingkungan yang memenuhi kriteria untuk dinilai pada tahun 2022
- Penilaian kota bersih dan sehat dan kegiatan penilaian belum dilaksanakan pada tahun 2022
- Pengaduan Masyarakat, selama tahun 2022, hanya ada satu pengaduan, penyebabnya karena aktivitas perusahaan sampai saat ini belum mendapat laporan akan hasil mediasi, sehingga tidak diketahui keberhasilan mediasi tersebut (Rekomendasi DPRD).
- Untuk presentase sampah yang tertangani memang mencapai 93%, namun masih diperlukan pelayanan untuk satu Kabupaten, sedangkan selama ini hanya mengangkut sampah di 3 Kecamatan saja.

b. Solusi

- Sosialisasi pembinaan dan pengawasan lebih diintensifkan.
- Melaksanakan pemetaan obyek lebih mendalam dan kerjasama dengan kademangan se Kabupaten Barito Timur.
- Mendorong pihak ke 3 untuk melaksanakan program CSR terkait bidang pendidikan khususnya program PBLHS.
- Memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada pemerhati lingkungan terkait penghargaan lingkungan hidup.
- Siap menindaklanjuti petunjuk KLHK untuk prosedur selanjutnya.

- Memberitahukan dan dalam upaya secara teus menerus kepada pihak-pihak yang bertikai untuk selalu menyerahkan hasil mediasi kepada pihak DLH.
- Menambah daerah layanan angkutan persampahan dengan menambah sarana dan prasarana

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

➤ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pendaftaran Penduduk; Program Pencatatan Sipil; Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Pelayanan Pencatatan Sipil; Penyelenggaraan Pencatatan Sipil; Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan; Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan; Penyusunan Profil Kependudukan

a. Masalah yang dihadapi

- Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mendaftarkan KIA.
- Adanya kerusakan server data induk yang mengakibatkan data entri pemilik akta kelahiran.
- Perangkat untuk menajemen hak akses databse kependudukan terbatas.

b. Solusi

- Pelayanan Keliling/Jemput Bola Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan.
- Melakukan entry data ulang.
- Pengadaan Peralatan Hak Akses Database Kependudukan.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

➤ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pemberdayaan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Penanganan Bencana; Program Peningkatan Kerjasama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa; Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota; Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota; Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Rencana Kerjasama Antar Desa berupa pengolahan produk anyam-anyaman belum bisa dilaksanakan pada tahun 2022 karena dari 15 Desa yang didata, ada 10 Desa yang belum mendapat pelatihan.
- Masih terbatasnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak karena belum sepenuhnya pulih dari Pandemi Covid-19

b. Solusi

- pada tahun 2023 akan melaksanakan pelatihan sekaligus melakukan kerjasama antar desa dalam pengolahan produk anyam-anyaman.

- Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif dan menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
- Mengikutsertakan LKD dalam pelaksanaan event-event baik ditingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

➤ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana

Telah dilaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak; Program Pengendalian Penduduk; Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

a. Masalah yang dihadapi

- PUS pasca melahirkan yang belum ber-KB sehingga tidak tercatat di SIGA.
- Karena masih terbatasnya sarana dan tenaga teknis.

b. Solusi

- Gerakan Pelayanan KB gratis di faskes setiap kecamatan.
- Perlu di tempatkan tenaga medis dan sarana penunjangnya

9. Urusan Perhubungan

➤ Dinas Perhubungan

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi. Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota; Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Belum tersedianya angkutan umum perintis pedesaan di Kabupaten Barito timur.
- Belum beroperasinya pelabuhan Telang Baru.

b. Solusi

- Melengkapi Data Dukung Usulan :
 - Rencana Lintasan Trayek
 - Panjang Lintasan
 - Potensi Kantong Penumpang
- Survey Data Dukung
- Pendirian Perusda sedang dalam proses.

10. Urusan Komunikasi dan Infromatika

➤ Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Informasi dan Komunikasi Publik; Program Aplikasi

Informatika; Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Belum memadainya SDM dengan kompetensi bidang pemrograman, pengelolaan jarigan dan server di Dinas Kominfo.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum terbentuk.

b. Solusi

- Pengadaan SDM dengan kompetensi bidang pemrograman, pengelolaan jarigan dan server untuk Dinas Kominfo.
- Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Draf SK PPID sedang dipersiapkan.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

➤ **Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi; Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm); Program Pengembangan Umkm; Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Program Pengembangan Ekspor; Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota; Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan; Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil; Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya; Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota; Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan; Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

a. Masalah yang dihadapi

- Belum semua melaksanakan RAT, Pendampingan dan Pembinaan.
- 136 koperasi, 26 RAT (30).
- Keterbatasan pemahaman dan kompetensi pengurus koperasi dalam pengelolaan koperasi.
- Kesadaran pengurus kurang.

- KUD yang sudah lama berdiri tetapi tidak aktif lagi dan belum ada anggota yang mengaktifkannya kembali.
- Pelaksanaan bertahap sesuai anggaran DAK
- Belum terpenuhinya persyaratan untuk koperasi layak menerima fasilitas pembiayaan.
- Belum adanya program yang dapat memberikan dukungan pembiayaan khusus untuk tahun 2022.
- Belum maksimal kerjasama koperasi dan kemitraan yang dapat menguntungkan koperasi sesuai undang-undang koperasi.
- Belum tercapainya nilai maksimal layak pemasaran untuk Produk-produk koperasi.
- Pelaku UMKM Kurang Memahami ITE.
- Rendahnya Kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha (Pelaku UMKM mengurus legalitas bila ada kepentingan).

b. Solusi

- Meningkatkan Pendampingan dan Pembinaan dalam pembuatan pelaporan RAT.
- Memberikan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan bagi pengurus dan anggota koperasi sehingga dapat menambah dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola koperasi.
- Melanjutkan program pelatihan sesuai petunjuk teknis.
- Mempersiapkan koperasi-koperasi agar dapat mencapai kriteria koperasi yang layak diberi bantuan melalui peningkatan kegiatan koperasi dan keaktifan anggotanya.
- Akan diprogramkan pada tahun berikutnya.
- Pembinaan dan Pendampingan dalam meningkatkan kualitas produk-produk koperasi
- Melakukan Pendampingan Bagi Pelaku UMKM

12. Urusan Penanaman Modal

➤ **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program

Pelayanan Penanaman Modal; Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota; Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota; Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah.

a. Masalah yang dihadapi

- pada Tahun 2022 masih dalam Pasca Covid 19 dan Resesi Ekonomi.
- Data yang ada hanya PMDN.
- Data yang diisi Responden tidak mencapai target.
- Data dan Informasi belum sepenuhnya secara online

b. Solusi

- Menggiatkan Promosi Investasi di kabupaten Barito Timur.
- Perlu promosi untuk PMA.
- Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten.
- Mengembangkan Penyampaian Data dan nformasi Melalui sistem jaringan online.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

➤ **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olah Raga**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

a. Masalah yang dihadapi

- Masih kurangnya minat pemuda untuk aktif berorganisasi.
- Minimnya event kegiatan setelah pelonggaran kegiatan masyarakat paska Pandemi COVID-19.

b. Solusi

- Mendorong organisasi pemuda untuk aktif ambil bagian dalam pembangunan.
- Mendorong dan memfasilitasi cabang olahraga dan atlit untuk dapat mengikuti event-event kalender olahraga.

14. Urusan Statistik

➤ **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**

Telah dilaksanakan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Tidak ada permasalahan.

15. Urusan Persandian

➤ **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**

Telah dilaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral; Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tidak ada permasalahan.

16. Urusan Kebudayaan

➤ **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olah Raga**

Telah dilaksanakan Program Pengembangan Kebudayaan; Program Pengembangan Kesenian Tradisional; Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Program Pengelolaan Permuseuman; Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota; Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota; Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota; Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

a. Masalah yang dihadapi

- Kekurangan perangkat pengelolaan data.
- Pelaksanaan event-event yang terbatas.
- Minimnya informasi mengenai sejarah lokal.
- Belum ada penetapan hukum sebagai oyek cagar budaya daerah, minimnya informasi dan kurangnya aksesibilitas.
- Belum terpenuhinya syarat cagar budaya dan minimnya informasi tentang benda koleksi

b. Solusi

- Pengarsipan data manual.
- Mendukung penyelenggaraan event-event mandiri.
- Pengumpulan data dan informasi pada lokus terdekat
- Penetapan status cagar budaya melalui SK Bupati, Pendataan dan sosialisasi tentang cagar budaya.
- Penggalian informasi mandiri

17. Urusan Perpustakaan

➤ Dinas Perpustakaan

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pembinaan Perpustakaan;. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Tidak ada permasalahan.

18. Urusan Kearsipan

➤ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Telah dilaksanakan Program Pengelolaan Arsip; Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota; Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/Atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

a. Masalah yang dihadapi

- Fasilitas Depo Kearsipan tidak memadai sebagai media penyimpanan Arsip fisik, dalam hal ini rak arsip dan box arsip sudah kadaluarsa/rapuh dan gudang penyimpanan terlalu kecil untuk menampung keseluruhan arsip dari seluruh OPD di Kab.Barito Timur.
- Belum maksimalnya sosialisasi terhadap pentingnya penyimpanan arsip dinamis dan statis melalui depo penyimpanan arsip yang tersedia di Dinas Kearsipan Kabupaten
- Belum tersedianya perangkat IT yang memadai sebagai pengalih media Arsip fisik menjadi Arsip digital
- Belum tersedianya SDM IT yang terlatih untuk mengoperasikan aplikasi berbasis media elektronik dan digital

- Software berupa Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) baru di luncurkan pertengahan Agustus 2022, dan di rencanakan awal tahun 2023 membuka akun ke ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), di targetkan tahun 2024 telah terkoneksi ke IKN

b. Solusi

- Melakukan upaya peningkatan fasilitas depo kearsipan dan berkoordinasi dengan ANRI terkait kualifikasi depo yang berstandar nasional.
- Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada seluruh OPD yang memiliki arsip penting agar lebih memahami fungsi dari depo kearsipan yang ada di Dinas Kearsipan Kabupaten.
- Mengupayakan peningkatan perangkat IT yang memadai sebagai media penyimpanan arsip digital
- Melakukan koordinasi ke Pemda Kab.Bartim terkait tata cara dalam membuka sistem aplikasi SRIKANDI yang dialamatkan ke ANRI
- Mengupayakan peningkatan SDM yang berkompeten sebagai operator IT

C. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 menetapkan 6 Urusan Pilihan yaitu kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Rincian realisasi anggaran Urusan Pilihan dapat dilihat pada Lampiran 1 dengan capaian program diuraikan dalam Tabel 3.1.3 berikut:

Tabel 3.1.3
Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan Dan Peternakan	Peningkatan Produksi Sektor Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	80 Poin	2.118,641 Ton	1.803,737 Ton	Program Perikanan Tangkap Belum Optimal. Penyebabnya : 1). Masih tinggi penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. 2). Singkatnya musim kemarau di tahun 2022, sehingga berpengaruh terhadap jumlah tangkapan ikan.	1).Meningkatnya kegiatan pengawasan terkait penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (alat setrum dll) yang dapat merusak habitat ikan diperairan umum : sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya (rekom DPRD). 2).Perlunya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana alat tangkap seperti kelotok, tempirai, keramba apung, bubi, jaring ikan dll (rekom DPRD) 3).Program Penanaman Kumpai sebagai Media Tempat berkembang biak ikan 400 Ikat 4). Pemberian Bantuan Mesin Kelotok melalui APBD Provinsi
								Memberikan himbauan terhadap pemerintahan ditingkat desa untuk memperketat pengawasan sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya.	
								Mengadakan alat tangkap ikan : rengge 100 Unit dan tempirai 328 roll melalui APBD Kabupaten dan mengupayakan bantuan pengadaan alat tangkap melalui APBD Provinsi	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Program Konversi BBM ke BBG dari Anggaran Kementerian ESDM minimal 300 Unit	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			Hasil Budidaya menurun, disebabkan :		
				- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1569,095 Ton	1531,635 Ton	1). Dampak Covid-19, pembudidaya lebih memprioritaskan kebutuhan rumah tangganya ketimbang pembelian pakan ikan. Pembudidaya (perorangan/kelompok dadakan) cenderung hanya mengharapkan bantuan benih dan pakan.	Optimalisasi pembinaan dan pemberian bantuan bibit dan pakan ikan yang cukup terhadap pelaku usaha (rekom DPRD)	Peningkatan SDM Perikanan dengan mengirim peserta magang ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangan serta berupaya memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan bibit ikan dari BPBAT Mandiangan dan pendampingan untuk mendapatkan akses permodalan usaha
							2). Belum optimalnya fungsi balai benih ikan di Murung Baki dan Netampin (rekom DPRD), salah satunya adalah memanfaatkan kolam pemberian yang belum terpakai untuk dimanfaatkan sebagai kolam pembesaran	Optimalisasi fungsi BBI Murung Baki dan Netampin (rekom DPRD), salah satunya adalah memanfaatkan kolam pemberian yang belum terpakai untuk dimanfaatkan sebagai kolam pembesaran	Dukungan pemerintahan terhadap BBI Murung Baki dan Netampin untuk lebih di fungsikan sebagai tempat pemberian ikan yang baik dan berkualitas dengan optimalisasi pemeliharaan indukan ikan gurame jantan, Gurame Betina,

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Nilai, Lele Dumbo Jantan, Lele Dumbo Betina, Patin Jantan, Patin Betina.
							3). Akibat keadaan alam (cuaca ekstrem/hujan/panas), ikan terserang hama dan penyakit	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil terhadap kelompok usaha pembudidaya dengan pemberian pelatihan terhadap pelaku usaha budidaya.	
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan					
				- Tingkat pertumbuhan stok sumberdaya perikanan	55 Persen	58,926 Persen	Masih terdapat indikasi ilegal fishing/penangkapan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan (setrum)	1).Mempertekat pengawasan perairan umum dibantu aparat hukum (TNI/Polri)	Memberikan himbauan terhadap pemerintahan di tingkat desa untuk mempertekat pengawasan sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya
								2). Program Penanaman Kumpai sebagai media tempat berkembang biak ikan	
								3).Mengusulkan bantuan benih ikan lokal untuk program Restocking ke BpBAT Mandiangan	
				Penguatan perikanan budidaya untuk	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat	- Konsumsi ikan	98,9 Persen	82,6 Persen	1).Tidak semua masyarakat gemar makan ikan 2).Inflasi yang meningkat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang salah satunya penurunan pembelian ikan untuk dikonsumsi	Menanamkan pemahaman pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai asupan makanan yang kaya akan protein melalui sosialisasi Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) Mengalih fungsi kolam pembenihan di BBIL Murung Baki yang belum terpakai sebagai kolam pembesaran, untuk mengantisipasi kelangkaan ikan dipasar (sebagai penyeimbang harga)	
2.	Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga	Peningkatan promosi penyelenggaraan budaya tradisional daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
				- Persentase peningkatan wisatawan mancanegara	25 Persen	0,75 Persen	1. Belum optimalnya pengelolaan pengembangan ODTW (aksesibilitas, sapras, dll); 2. Turunnya kunjungan wisatawan pasca Pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat.	Peningkatan Pengembangan Kualitas Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas.	
				- Persentase peningkatan wisatawan nusantara	35 Persen	1,35 Persen	1. Belum optimalnya pengelolaan pengembangan ODTW (aksesibilitas, sapras, dll); 2. Turunnya kunjungan wisatawan pasca Pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat.	Peningkatan Pengembangan Kualitas Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas.	
				Program Pemasaran					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pariwisata					
				- Tingkat hunian akomodasi	30 Persen	10,83 Persen	Turunnya kunjungan wisatawan pasca Pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat.	Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata dan promosi yang efektif melalui website, booklet dan event-event.	
				Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
				- Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	22 Persen	5 Persen	Kurangnya akses kegiatan pelatihan dan bimtek berkaitan dengan sektor pariwisata.	Meningkatkan jumlah pelatihan dan bimtek yang erat kaitannya dengan sektor pariwisata.	
3.	Pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	90 Poin	Tidak Ada Masalah	Terus Ditingkatkan	Mempercepat Proses
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					
				- Persentase sarana pertanian yang digunakan secara tepat sasaran	100 Persen	100 Persen			
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					
				- Persentase prasarana pertanian yang digunakan secara tepat sasaran	100 Persen	100 Persen			
				Program					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Persentase kejadian/kasus bencana pertanian yang ditangani				1. Masih adanya serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Seperti Serangan wereng Coklat, Tikus, Keong Mas dll. 2. Kondisi Perubahan Iklim yang selalu berubah	1. Melakukan update mapping wilayah rawan banjir dan endemis serangan organisme pengganggu tumbuhan. 2. Menyebarluaskan informasi prakiraan Musum Hujan dari BMKG, Si- KATAM (Sistem Informasi Kalender Tanaman) dan SI- Perditian (Sistem Informasi Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian) Khususnya Prediksi curah hujan dan kekeringan. 3. Menyiagakan Brigade DPI-OPT, Brigade Alsin dan Tanam, Brigade Tanam. 4. Menggunakan benih tahan genangan seperti Inpara - 10, Inpari 29, Inpari 30, Ciherang dan Lainnya. 5. Mendaftar Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 6. Menyiapkan bantuan benih bagi petani terdampak yang gagal panen/puso.
				Program Perizinan Usaha Pertanian					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peningkatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi	- Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	85 Persen	0 Persen	Perizinan diterbitkan oleh DPM-PTSP	Koordinasi dengan DPM - PTSP terkait penerbitan Izin	
				Program Penyuluhan Pertanian					
				- Cakupan bina kelompok petani	85 Persen	80 Persen	Pembentukan kelompok tani baru belum memenuhi syarat pendirian sesuai petunjuk dan peraturan yang berlaku	Penyuluhan dan pembinaan kelompok tani baru agar pendiriannya memenuhi syarat sesuai petunjuk dan peraturan yang berlaku	
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan					
				- Tingkat Pengendalian Bahan Berbahaya yang beredar	75 Persen	100%	-	-	
				- Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	60 Persen	100%	-	-	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
				- Persentase pasar daerah yang representatif	93 Persen	79%	Masih Dalam Tahap Pendapatan	Mengadakan Pendataan pada Setiap Pasar Desa	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting					
				- Persentase kinerja realisasi pupuk	95 Persen	100%	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Tingkat ketersediaan bahan/barang strategis kebutuhan masyarakat	100 Persen	100%	-		
				Program Pengembangan Ekspor					
				- Persentase produk unggulan daerah yang diekspor	90 Persen	0%	Tidak ada Produk Yang sesuai dengan Kriteria produk ekspor	Perlu adanya upaya pembinaan pada pelaku usaha agar produk usulan yang dihasilkan dapat sesuai kriteria produk unggulan export yang di selanggarakan oleh kementerian Perdagangan.	
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen					
				- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	75 Persen	100%	-	-	
				- Persentase Pengaduan Konsumen yang Ditangani	80 Persen	0%	Tidak Ada Laporan/Pengaduan	Membuka Tempat ruang pengaduan bagi Konsumen	
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					
				- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	90 Persen	80%	Kurangnya Peralatan kelompok Usaha Kecil	Perlu adanya dukungan pemerintah khususnya pendampingan dana kepada kelompok	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								pedagang usaha informal dalam peningkatan usaha pedagang.	
5.	Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Perindustrian		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri					
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	25 Persen	0	Belum adanya dokumen RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) sampai dengan di tetapkannya menjadi PERDA	Melakukan konsultasi/koordinasi dengan instansi terkait (Disnaker Prov. Kalteng, Kemenaker RI) untuk pelatihan/Bimtek penyusun dan teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan RPIK	
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota					
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	70 Persen	71,67		43 IKM yg dipantau dari 60 IKM yang memiliki IUI	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nasional 	70 Persen	7,37	Sebagian besar IKM tidak memiliki ijin industri	Mengefektifkan lagi pembinaan dan mendorong IKM untuk membuat perijinan serta mendaftarkannya ke dalam SII Nas. 60 IKM yang memiliki IUI dari 814 IKM terdata	
7.	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi					
				<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat penanganan permasalahan pertanahan transmigrasi 	33 Persen	33	Masih menjadi permasalahan pertanahan di wilayah trasmigrasi di 3 lokasi trasmigrasi yaitu Trans Sumberrejo, Trans Lagan, Trans Wuran	1. Mengidentifikasi pokok permasalahan data lokasi-lokasi yang bermasalah, serta mengusulkan penyelesaian masalah ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2. Melakukan Mediasi antara warga eks transmigrasi dengan pihak yang menguasai objek tanah tersebut.	
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase wilayah transmigrasi yang didata 	100 Persen	100			
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase satuan pemukiman yang dibina 	40 Persen	40			

Analisa pelaksanaan Urusan Pilihan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

➤ Dinas Perikanan dan Peternakan

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota; Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.

a. Masalah yang dihadapi

- Program Perikanan Tangkap Belum Optimal. Penyebabnya :
 - Masih tinggi penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
 - Singkatnya musim kemarau di tahun 2022, sehingga berpengaruh terhadap jumlah tangkapan ikan.
- Dampak Covid-19, pembudidaya lebih memprioritaskan kebutuhan rumah tangganya ketimbang pembelian pakan ikan. Pembudidaya (perorangan/kelompok dadakan) cenderung hanya mengharapkan bantuan benih dan pakan.
- Belum optimalnya fungsi balai benih ikan di Murung Baki dan Netampin.
- Akibat keadaan alam (cuaca ekstrem/hujan/panas), ikan terserang hama dan penyakit.
- Masih terdapat indikasi ilegal fishing/penangkapan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan (setrum).
- Tidak semua masyarakat gemar makan ikan.
- Inflasi yang meningkat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang salah satunya penurunan pembelian ikan untuk dikonsumsi

b. Solusi

- Memberikan himbauan terhadap pemerintahan ditingkat desa untuk memperketat pengawasan sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya.
- Mengadakan alat tangkap ikan : rengge 100 Unit dan tempirai 328 roll melalui APBD Kabupaten dan mengupayakan bantuan pengadaan alat tangkap melalui APBD Provinsi.
- Peningkatan SDM Perikanan dengan mengirim peserta magang ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangan serta berupaya memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan bibit ikan dari BPBAT Mandiangan dan pendampingan untuk mendapatkan akses permodalan usaha
- Dukungan pemerintahan terhadap BBI Murung Baki dan Netampin untuk lebih di fungsikan sebagai tempat pembenihan ikan yang baik dan berkualitas dengan optimalisasi pemeliharaan indukan ikan gurame jantan, Gurame Betina, Nila, Lele Dumbo Jantan, Lele Dumbo Betina, Patin Jantan, Patin Betina.
- Memberikan himbauan terhadap pemerintahan di tingkat desa untuk memperketat pengawasan sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya

2. Urusan Pariwisata

➤ Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Telah dilaksanakan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

a. Masalah yang dihadapi

- Belum optimalnya pengelolaan pengembangan ODTW (aksesibilitas, sapras, dll);
- Turunnya kunjungan wisatawan pasca Pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat.
- Belum optimalnya pengelolaan pengembangan ODTW (aksesibilitas, sapras, dll); 2. Turunnya kunjungan wisatawan pasca Pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat.
- Turunnya kunjungan wisatawan pasca Pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat.
- Kurangnya akses kegiatan pelatihan dan bimtek berkaitan dengan sektor pariwisata.

b. Solusi

- Peningkatan Pengembangan Kualitas Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas.
- Peningkatan Pengembangan Kualitas Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas.
- Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata dan promosi yang efektif melalui website, booklet dan event-event.
- Meningkatkan jumlah pelatihan dan bimtek yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

3. Urusan Pertanian

➤ **Dinas Perikanan dan Peternakan**

Telah dilaksanakan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Masih adanya serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Seperti Serangan wereng Coklat, Tikus, Keong Mas dan lain-lain
- Kondisi Perubahan Iklim yang selalu berubah.
- Perizinan diterbitkan oleh DPM-PTSP.
- Pembentukan kelompok tani baru belum memenuhi syarat pendirian sesuai petunjuk dan peraturan yang berlaku.

b. Solusi

- Melakukan update mapping wilayah rawan banjir dan endemis serangan organisme pengganggu tumbuhan.
- Menyebarluaskan informasi prakiraan Musum Hujan dari BMKG, Si-KATAM (Sistem Informasi Kalender Tanaman) dan SI- Perditan (Sistem Informasi Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian) Khususnya Prediksi curah hujan dan kekeringan.
- Menyiagakan Brigade DPI-OPT, Brigade Alsin dan Tanam, Brigade Tanam.
- Menggunakan benih tahan genangan seperti Inpara - 10, Inpari 29, Inpari 30, Ciherang dan Lainnya.
- Mendaftar Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
- Menyiapkan bantuan benih bagi petani terdampak yang gagal panen/puso.
- Koordinasi dengan DPM - PTSP terkait penerbitan Izin.
- Penyuluhan dan pembinaan kelompok tani baru agar pendiriannya memenuhi syarat sesuai petunjuk dan peraturan yang berlaku

4. Urusan Perdagangan

➤ Dinas, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah

Telah dilaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Program Pengembangan Ekspor; Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya; Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota; Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera

Ulang, dan Pengawasan; Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

a. Masalah yang dihadapi

- Tidak ada Produk Yang sesuai dengan Kriteria produk ekspor.
- Tidak Ada Laporan/Pengaduan.
- Kurangnya Peralatan kelompok Usaha Kecil.

b. Solusi

- Mengadakan Pendataan pada Setiap Pasar Desa.
- Perlu adanya upaya pembinaan pada pelaku usaha agar produk usulan yang dihasilkan dapat sesuai kriteria produk unggulan export yang di selanggarakan oleh kementerian Perdagangan.
- Membuka Tempat ruang pengaduan bagi Konsumen.
- Perlu adanya dukungan pemerintah khususnya pendampingan dana kepada kelompok pedagang usaha informal dalam peningkatan usaha pedagang.

5. Urusan Perindustrian

➤ **Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian**

Telah dilaksanakan Program Hubungan Industrial; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUTI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

a. Masalah yang dihadapi

- Belum adanya dokumen RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) sampai dengan di tetapkannya menjadi PERDA.
- Sebagian besar IKM tidak memiliki ijin industri.

b. Solusi

- Melakukan konsultasi/koordinasi dengan instansi terkait (Disnaker Prov. Kalteng, Kemenaker RI) untuk pelatihan/Bimtek penyusun dan teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan RPIK.

- Mengefektifkan lagi pembinaan dan mendorong IKM untuk membuat perijinan serta mendaftarkannya ke dalam SIINas.
- 60 IKM yang memiliki IUI dari 814 IKM terdata.

6. Urusan Transmigrasi

➢ Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

Telah dilaksanakan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

a. Masalah yang dihadapi

- Masih menjadi permasalahan pertanahan di wilayah transmigrasi di 3 lokasi transmigrasi yaitu Trans Sumberrejo, Trans Lagan, Trans Wuran.

b. Solusi

- Mengidentifikasi pokok permasalahan data lokasi-lokasi yang bermasalah, serta mengusulkan penyelesaian masalah ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah .
- Melakukan Mediasi antara warga eks transmigrasi dengan pihak yang menguasai objek tanah tersebut.

D. Pelaksanaan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

Rincian realisasi anggaran Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum dapat dilihat pada Lampiran 1 dengan capaian program diuraikan dalam Tabel 3.1.4 berikut:

Tabel 3.1.4
Pelaksanaan Urusan Pendukung, Penunjang, Pengawas, Kewilayahahan dan Pemerintahan Umum

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
1.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	80 Poin				
				- Persentase Bahan Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	90 Persen	90 Persen			
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					
				- Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan yang ditindaklanjuti	90 Persen	70 Persen	Kebijakan belum sepenuhnya mengakumudir lingkup Pemerintahan yang di tindak lanjuti	Penyusunan Peraturan Pemerintah Daerah untuk megakomudir lingkup Pemerintahan	
				- Persentase Bahan Kebijakan Lingkup kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	95 Persen	99 Persen			
				- Persentase produk perundang- undangan serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum yang difasilitasi dan dikoordinasikan	90 Persen	100 Persen			
				Program Perekonomian dan Pembangunan					
				- Persentase Bahan Kebijakan Lingkup perekonomian yang	90 Persen	100 Persen			

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ditindaklanjuti					
				- Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pembangunan yang ditindaklanjuti	95 Persen	100 Persen			
							Perlunya OPD terkait lebih proaktif guna percepatan pembentukan 3 UPTD dimaksud serta perlu dukungan anggaran yang memadai	Tidak Ada SOTK yang tercantum untuk mengenai tugas dan fungsi perihal pembentukan UPTD karena OPD teknis yang memiliki unit teknis	
							Perlunya pengajuan keberatan ke Kemendagri dan pengajuan Judicial Review	Menyampaikan keberatan warga Desa Dambung Kecamatan Dusun Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Warga Desa Dambung diwakili oleh Damang Paku Karau& Damang Pematang Karau Desa Dambung, Kepala Desa Dambung,Perwakilan Warga Lawangan Desa Dambung, Ormas GMTPS Desa Dambung,Perwakilan warga Dusun Ma'anyan Lawangan Desa Dambung.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (batas Desa Dambung dengan Kabupaten Tabalong).
2.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Nilai LAKIP perangkat daerah 	75 Poin	79,21 Poin	Kualitas dan Kualitas SDM Aparatur yang belum memadai	Peningkatan ketersediaan dan kompetensi Sumberdaya Manusia Sekretariat DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kinerja SDM Aparatur Sekretariat DPRD dengan mengikuti Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh BPKAD maupun BPKP agar Proses Pengelolaan Keuangan dapat berjalan optimal.
							Terbatasnya Sarana dan Prasarana Kerja penunjang layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kegiatan Sekretariat DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 2, Sekretariat DPR dapat dilibatkan dalam hal perencanaan dan pembahasan kegiatan DPRD
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD					<ol style="list-style-type: none"> 3. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD
				<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 	70 Persen	88,8 Persen	Regulasi Pengelolaan Keuangan yang berubah-ubah menyebabkan keterlambatan proses pengelolaan keuangan si Sekretariat DPRD	Meningkatkan jumlah waktu kerja bagi bagian yang mengelola proses pengelolaan keuangan	
							Sering terjadinya pembatalan rapat DPRD yang sudah terjadwal sebelumnya, Tidak efisiennya anggaran	Penyusunan Rencana kerja DPRD Tahunan, Memberi masukan kepada Pimpinan DPRD untuk lebih memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan, Memberi masukan kepada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD	

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							konsumsi, terjadi rapat mendadak		
							Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga proses program kegiatan DPRD yang sudah ditetapkan serta disesuaikan Rencana Anggaran kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan program yang dianggarkan, sehingga agar tidak menyebabkan keterlambatan melaksanakan kegiatan-kegiatan belanja daerah itu sendiri, sehingga realisasi kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan dapat terlaksana sesuai waktu dan target yang diharapkan	Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi Sumberdaya Manusia di Sekretariat DPRD, Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BPKAD maupun Lembaga Keuangan Lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penatausahaan keuangan, menjalin hubungan baik dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas/Badan yang mengelola keuangan dan perencanaan agar proses keuangan dan perencanaan tepat waktu dan tepat sasaran	Proses Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan tepat waktu dan tepat sasaran

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Sekretariat DPRD dapat dilibatkan dalam hal perencanaan dan pembahasan kegiatan DPRD	- Mengikuti Setiap perencanaan dan pembahasan kegiatan di DPRD	Menghindari Pembatalan Jadwal rapat mendadak di DPRD
B. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
1.	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah	Optimalisasi perencanaan dan penganggaran terpadu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Nilai LAKIP perangkat daerah					
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	70 Poin	65 Poin	kekurangtahuan OPD-OPD yang turut merencanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pelayanan publik	Memformulasikan langkah-langkah konkret penanganan dan antisipasi kekurangtahuan OPD-OPD yang turut merencanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pelayanan publik	mengakukan Koordinasi dan asistensi kepada OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan baik dari usulan-usulan masyarakat maupun program/kegiatan masing-masing OPD
							masing-masing OPD belum mengetahui tupoksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga belum dapat bersinergi dengan OPD-OPD daerah lainnya, dengan daerah diatasnya dan dengan pemerintah pusat	mencermati secara seksama dan sungguh-sungguh tupoksi masing-masing OPD sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat bersinergi dengan OPD-OPD daerah lainnya, dengan saerah diatasnya dan dengan pemerintah pusat	mengakukan asistensi dan pendampingan kepada OPD mengenai peraturan yang berlaku lingkup perencanaan pembangunan, juga melibatkan OPD dalam kegiatan perencanaan tingkat provinsi dan pusat
				- Tingkat konsistensi	95 Persen	95 Persen			

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				penjabaran program RPJMD kedalam RKPd					
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
				- Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPd	90 Persen	90 Persen			
				- Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kedalam RKPd	95 Persen	95 Persen			
				- Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPd	95 Persen	95 Persen			
							Perlunya memperketat sinkronisasi atas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Aplikasi Dokumen Perencanaan.	melakukan Koordinasi dan asistensi kepada OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan baik dari usulan-usulan masyarakat maupun program/kegiatan masing-masing OPD	banyak data wajib pajak baru yang mendaftarkan tanah/bangunan nya ke Bapenda dan dikeluarkan lah Nomor objek Pajak PBB- P2.kemudahan melakukan transaksi pembayaran pajak melalui mobile banking dan aplikasi pembayaran pajak

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>pbb-p2 melalui aplikasi perbankan dan agen-agen perbankan sampai ke desa menjadikan pendapatan dr sektor pajak PBB-P2 meningkat selain juga bantuan dari setiap kolektor di tingkat perdesaan.</p> <p>Adanya sosialisasi langsung ke masyarakat melalui pelaksanaan penyampaian sppt-pbb,penertiban pajak daerah kerjasama dgn satpol PP,dinas teknis terkait perijinan bangunan gedung,pihak perbankan dalam sistem pembayaran pajak secara online</p>
							<p>Disamping itu sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang</p>	<p>Sumber-sumber pendapatan lainnya akan terus diupayakan untuk ditingkatkan Dengan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dari dana transfer pusat dan bagi hasil provinsi ke daerah termasuk update informasi ttg peluang2 daerah dalam bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak melalui rakornas pendapatan</p>	<p>Menindaklanjuti keputusan pusat/provinsi ttg bagi hasil pajak ke daerah,memberikan data kepada kejaksaan tinggi negeri Barito timur ttg perusahaan yang ada dibartim</p>

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sah, dana perimangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sehingga proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.	dingkat pusat dan juga informasi dari provinsi tentang dana bagi hasil dr provinsi yang akan disalurkan dan menghitung dan mencatat dana bagi hasil jika ada belum disalurkan ditahun berjalan	yang sudah membayar pajak daerah/royalti ke pusat agar dapat di monitor serta menyusun draf Raperda pajak dan retribusi di daerah tahun 2022 lanjut pembahasan dieksekutif tahun 2023sampai target pembahasan didewan,dimana sesuai amanat UU Nomor 1 yahun2022 terdapat pasal yang mengatur ttg open pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh provinsi,bea balik nama kendaraan bermotor,dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB)
2.	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin				
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					
				- Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	90 Persen	106,4 Persen			
							Optimalisasi	Optimalisasi pendapatan daerah	

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pendapatan daerah dilakukan melalui pada Obyek Pajak Daerah yang Terdiri dari Restribusi Daerah dalam Pengelolaan PBB, peningkatan komunitas dan informasi kepada masyarakat serta reformasi system perpajakan daerah.	terus dilakukan oleh Bapenda terutama dalam hal pengelolaan pajak PBB-P2. Tercatat tahun 2022 penerimaan dari sektor pajak PBB P2 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 90,40% (realisasi sebesar Rp 994.414.142) dari target pendapatan PBB-P2 setelah perubahan adalah sebesar Rp 1.100.000.000 Sedangkan informasi kepada masyarakat terus dilakukan melalui sosialisasi baik tingkat kecamatan,kelurahan,desa,perangkat desa,kolektor,masyarakat umum dan kemudahan dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah PBB-P2,9 pajak lainnya dan juga retribusi daerah dengan kemudahan pembayaran pajak melalui mobile banking dan Qris	
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Optimalisasi perencanaan dan penganggaran terpadu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
			- Nilai LAKIP perangkat daerah	B Poin	-				
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
			- Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD	Tepat Waktu	Status (tepat waktu/tidak tepat waktu)	Tepat waktu	Perlu adanya pelatihan mengenai penganggaran dan aplikasinya.	Diupayakan diadakan pelatihan tentang penganggaran dan aplikasinya.	

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Keterlambatan pencairan dana yang mengakibatkan target realisasi anggaran yang belum terpenuhi secara maksimal	JIka dalam proses pencairan anggaran terdapat syarat /berkas yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan standar prosedur pencairan anggaran, maka Bidang yang menangani akan segera menginformasikannya ke OPD yang bersangkutan untuk segera menindaklanjutinya	Untuk mempercepat pencairan anggaran khususnya di akhir tahun diterbitkan Surat Kepala Daerah tentang Langkah-langkah menghadapi Akhir Tahun Anggaran
				- Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	68 Persen	60 Persen	Besarnya jumlah Pegawai Guru dan Tenaga Kesehatan dibanding dengan jumlah Pegawai Non Guru dan Tenaga Non Kesehatan	Menambah jumlah Pegawai Non Guru dan Tenaga Non Kesehatan	
				- Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Tepat Waktu u	Status (tepat waktu/tidak tepat waktu)	Tepat Waktu u	Rekonsiliasi Keuangan dan Aset dengan seluruh OPD perlu ditingkatkan	Perlunya Bimbingan Teknis untuk menambah pengetahuan.
							Sumber Daya Manusia belum memiliki tanggungjawab terhadap Tupoksinya.		
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					
				- Persentase BMD yang dikelola secara tertib dan akurat	98 Persen	95 Persen	Barang Milik Daerah harus lebih dikelola dan diinventarisir dengan lebih baik dan tertib administrasi.	Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah dengan inventarisasi dan rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang rutin dengan semua OPD	Telah dilaksanakan rekonsiliasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah dengan seluruh OPD

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pemerintah Daerah Hendaknya Dalam Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Program Yang Terdiri Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Diharapkan Lebih Di Tingkat Serta Lebih Optimal dan diharapkan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatannya dalam Progresnya tercapai 100% sehingga yang sudah diprogramkan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan.	Untuk mempercepat pencairan anggaran khususnya di akhir tahun diterbitkan Surat Kepala Daerah tentang Langkah-langkah menghadapi Akhir Tahun Anggaran	
3.	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas manajemen SDM aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	- -	Menunggu hasil penilaian dari Provinsi	-	-
				Program Kepegawaian Daerah					
				- Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	90 Persen	90,1 Persen	-	-	-
				- Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru	90 Persen	89,5 Persen	Terdapat PNS Fungsional yang purna Tugas	Perlu Pengangkatan PNS JFUmengjadi PNS Fungsional	-

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan tenaga kesehatan)			(Pensiun)		
				- Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	90 Persen	90,3 Persen		-	-
				- Indeks Kepuasan Pelayanan kepegawaian	3 Poin	3 Poin		-	-
							Perlunya melaksanakan Prajabatan untuk lulusan CPNS Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah.	Sudah dilaksanakan pelatihan dasar CPNS Tahun 2021 mulai tanggal 13 s/d 1 Sep 2022 (gelombang I) dan Tanggal 22 Juni s/d 12 September 2022 (gelombang II) di BPSDM Provinsi Kalimantan di Palangka Raya.	
							Perlunya peningkatan SDM melalui Diklat Kepemimpinan dan Bimbingan Teknis.	Menginformasikan kegiatan Bimtek dan Pelatihan melalui Media Elektronik	
4.	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah					
				- Persentase kajian litbang yang diterapkan	40 Persen	40 Persen			
C. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan									
1.	Inspektorat Daerah	Inspektorat		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	B Poin	CC	Kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemkab barito timur belum	Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan ketetapan rumusan unsur-unsur kunci yaitu tujuan dan sasaran strategis dalam perencanaan telah berorientasi hasil/outcome atau menggambarkan kinerja yang	sudah dilaksanakan sosialisasi program anti korupsi melalui MCP -KPK dan telah dilaksanakan.

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.	seharusnya dan mampu menjawab isu strategis yang dihadapi. menyempurnakan dan melengkapi indikator kinerja yang lebih spesifik, relevan dan terukur disertai dengan target kinerja yang memadai. menjabarkan kembali perencanaan kinerja level pemda kedalam perencanaan level PD dengan menganut kerangka berpikir logis (logical framework) yang menggambarkan solusi pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapu pemerintah daerah. memberikan rekomendasi yang spesifik dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas implementasi manajemen kinerja kepada seluruh perangkat daerah serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.	dibuktikan dengan dibentuknya Satuan tugas Gratifikasi KPK, Satgas kegiatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Satuan tugas Koorsubgah- KPK, Satuan Tugas Saber Pungli dan dilaksanakan survei penilaian integritas secara berkelanjutan.
	Penguatan Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Percentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah yang Diselesaikan	87 Persen	70 Persen	banyaknya rekomendasi temuan tahun yang lama yang belum sesuai, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman audit, dalam hal ini aparatur desa dalam menindaklanjuti rekomendasi sesuai temuan.	melaksanakan rapat koordinasi, memonitoring dan mengevaluasi rekomendasi temuan berdasarkan urutan tingkat kesulitan penyelesaiannya untuk di tindaklanjuti.		

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan 	90 Persen	85,79 Persen	<p>banyaknya rekomendasi temuan tahun yang lama yang belum sesuai, sedangkan dokumen pendukung sudah banyak yang rusak. dan untuk temuan keuangan masih banyak yang belum tuntas, disebabkan ada yang sudah meninggal, ahli waris tidak punya penghasilan tetap untuk mengembalikan temuan, juga belum terdapat kebijakan yang mengatur penghapusan piutang daerah.</p>	<p>melaksanakan rapat koordinasi dengan BPK-RI setiap bulan, melaksanakan pendekatan secara persuasif dengan penanggungjawab temuan agar rekomendasi temuan dapat di selesaikan</p>	
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Hasil Reviu yang Ditindaklanjuti 	85 Persen	100 Persen			
				<p>Peningkatan pelayanan publik yang prima dan transparan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 	80 Persen	30 Persen	<p>belum semua OPD mengintensifkan implementasi maturitas SPIP</p>	<p>mengintensifkan implementasi SPIP seluruh OPD</p>	

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 	3 Tingkat	2 Tingkat	masih kurang dalam hal : pengelolaan SDM, praktik profesional, struktur tata kelola, peran dan layanan	perekrutan SDM APIP berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan, APIP wajib melakukan analisis gap kompetensi, melaksanakan pelatihan/diklat pengembangan kompetensi berdasarkan gap kebutuhan dan pengelolaan risiko, membuat risk register semua OPD, membuat kebijakan terkait manajemen risiko,identifikasi resiko, berupa audit kinerja, ketaatan, konsulting. melaksanakan telaahan sejawat.	
							Perlunya melakukan sosialisasi tentang Program Anti Korupsi		
D.	Unsur Kewilayahan								
1.	Kecamatan	Kecamatan Dusun Tengah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Nilai LAKIP perangkat daerah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	70 Poin	70 Poin	Keterbatasan SDM dalam Informasi, pengoperasian Sistem dan Administrasi	Mengoptimalkan SDM dengan Koordinasi, Konsultasi dan Bimbingan Teknis dengan Instansi Terkait dengan tugas dan Fungsi Seksi dan Bagian tersebut	

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 	100 Persen	90 Persen	Keterbatasan Fasilitas Sarana dan Prasarana pelayanan	menggunakan fasilitas yang tersedia pada tahun lalu dan mengoptimalkan kreatifitas SDM	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan 	100 Persen	90 Persen	Pengalihan penggunaan anggaran dari pembangunan menjadi penanganan pandemi covid 19 menjadi prioritas untuk percepatan penanganan kesehatan masyarakat	Peniadaan pembangunan Fisik untuk penuhan Sarana dan prasarana penanganan covid 19	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti 	100 Persen	100 Persen			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah 	100 Persen				
				Program Pembinaan Dan Pengawasan					

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	90 Persen	Keterbatasan Data, informasi dan SDM mengenai produktivitas Aparat Desa dalam penerapan kegiatan dan Realisasi Administrasi Pemerintah Desa	a. Turun langsung Kelapangan untuk dilakukan pendampingan ; b. Rapat Koordinasi ataupun langsung baik melalui alat komunikasi untuk dilakukan pembinaan	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin				
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	80 Persen	Kewenang perijinan tidak berada di kecamatan	menyarankan kepada masyarakat yang ingin meminta perijinan supaya ke dinas terkait di Kabupaten	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100 Persen	80 Persen	semua usulan masyarakat diakomodir melalui Musrenbang, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua terakomodir berkaitan dengan keterbatasan dana	mengutamakan usulan yang Prioritas	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	85 Persen	adanya pengaduan seperti sangketa lahan yang tumpang tindih	bersama sama pihak terkait saling bekerjasama mencari jalan keluar permasalahan	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	85 Persen	terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pemerintahan Umum	menggunakan fasilitas yang ada dengan maksimal	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	85 Persen	keterlambatan pihak pemerintah desa dalam hal laporan pertanggungjawaban keuangan	memberi arahan, bimbingan , monitoring dan evaluasi kepada pemerintahan Desa	
			Kecamatan Awang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin				
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	100 Poin			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan 	100 Persen	100 Persen	Pengalihan sementara penggunaan anggaran dari pembangunan menjadi penanganan pandemi covid 19 menjadi prioritas untuk percepatan penanganan kesehatan masyarakat	Peniadaan pembangunan Fisik untuk pemuatan Sarana dan prasarana penanganan covid 19	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti 	100	100 Persen			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah 	100 Persen	100 Poin			
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	100 Persen	100 Poin			
	Kecamatan Patangkep			Program Penunjang Urusan Pemerintahan					

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tutui				Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	80 Poin				
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	100 Persen			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100 Persen	100 Persen			
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen			
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Dusun Timur			- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	tercapai		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin				
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	0 Persen	Belum dianggarkan	akan dianggarkan tahun berikutnya	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100 Persen	90 Persen	Usulan dari setiap desa sudah masuk semua tapi rata-rata masih berupa usulan lama karena masih belum ada yang terealisasi oleh pihak Kabupaten maupun Provinsi	Terealisasinya beberapa usulan desa yang memang prioritas khususnya untuk kepentingan khalayak umum	
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen			
				Program					

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kecamatan Benua Lima				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen			
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin				
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	95 Persen	0 Persen	Tidak teranggarkan	akan dianggarkan ditahun berikutnya	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	95 Persen	90 Persen	Masih adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan kegiatan diprioritaskan untuk percepatan	pengembalian kepada kegiatan normal pasca pandemi covid 19 khususnya pembangunan dan pelatihan kepada masyarakat	

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							penanganan pandemi covid 19		
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	95 Persen	0 Persen	Tidak teranggarkan	akan dianggarkan ditahun berikutnya	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	95 Persen	0 Persen	Tidak teranggarkan	akan dianggarkan ditahun berikutnya	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95 Persen	92 Persen	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, masih adanya perangkat desa yang kurang kesadaran akan tertib administrasi	Diadakannya monitoring, evaluasi, pendampingan dan pembinaan kepada aparat desa serta perlu adanya bimbingan teknis	
	Kecamatan Paku			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	90 Poin			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan					

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	80 Persen	Kurang Pegawai yang membidangi		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	100 Persen	90 Persen	Pengalihan sebagian anggaran untuk penanganan pandemi covid 19		
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen			
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen			
				Program Penunjang					

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin	70 Poin	Tercapai	Menempatkan Pegawai pada jabatan yang tepat sesuai dengan latar belakag pendidikan, sehingga dapat menunjang kinerja baik dalam pelaksanaan program maupun kegiatan, serta selalu berkoordinasi dengan skpd terkait	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	90 Persen	90 Persen	Tercapai		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	75 Persen	90 Persen	Tercapai	Memulai kegiatan Normal Paca Pandemi Covid 19	Khususnya pembangunan dan pelatihan kepada masyarakat
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Tercapai		
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang	100 Persen	100 Persen	Tercapai	Tidak ada Kendala dalam Pelaksanaan tugas urusan pemerintahan umum	

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah					
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	100 Persen	Tercapai	Semua Desa Telah Diberikan Pembinaan dan pengawasan	
				Kecamatan Raren Batuah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				- Nilai LAKIP perangkat daerah	70 Poin		Untuk Nilai LAKIP sampai saat ini Kecamatan Raren Batuah belum ada penilaian	Akan segera dibuat surat kepada OPD yang membidangi untuk dilakukan penilaian LAKIP	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					
				- Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	65 Persen	100 Persen	-	-	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	65 Persen	20 Persen	Banyaknya usulan yang disampaikan masyarakat pada wilayah Kecamatan Raren Batuah sehingga pagu dari OPD yang membidangi tidak dapat mengakomodir seluruhnya	Usulan tersebut yang belum dapat diakomodir oleh OPD pada Tahun 2022 diusulkan kembali pada musrenbang Kecamatan Tahun 2023 untuk Perencanaan Tahun 2024	

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	65 Persen	100 Persen			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	65 Persen	86,72 Persen	Ada beberapa program kegiatan yang penganggarannya melebihi dari realisasi pengeluaran rill	Telah dilakukan penyesuaian anggaran pada Tahun anggaran berjalan	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Adanya beberapa program kegiatan yang waktu pelaksanaannya mendekati akhir tahun anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan	Telah dilakukan penyesuaian anggaran pada Tahun anggaran berjalan	
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65 Persen	100 Persen			
	Kecamatan Karusen Janang			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<ul style="list-style-type: none"> - Nilai LAKIP perangkat daerah 	70 Poin	79 poin	Keterbatasan Kualitas SDM yang kurang optimal serta kurangnya Jumlah Aparatur dibandingkan dengan beban kerja/tugas	Mengoptimalkan SDM dengan Koordinasi, Konsultasi dan Bimbingan Teknis dengan Instansi Terkait dengan tugas dan Fungsi Seksi dan Bagian tersebut	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	80 Persen				
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP 		85 Persen	Keterbatasan Fasilitas Saran dan Prasaran pelayanan serta masyarakat desa yang kurang informasinya apa saja pelayanan yang tersedia di kecamatan sehingga masyarakat tidak dapat menerima pelayanan secara efektif dan efisien karena harus ke Kabupaten yang seharusnya pelayanan dapat dilakukan di Kecamatan	menggunakan fasilitas yang tersedia dengan optimal dan menambah fasilitas penunjang pelayanan, mengoptimalkan kreatifitas SDM pemberi pelayanan serta memanfaatkan teknologi media sosial yang lebih modern dalam memberikan informasi pelayanan yang tersedia di Kecamatan sehingga masyarakat menerima pelayanan dan petugas pelayanan yang efisien dan efektif	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan 	85 Persen	85 Persen	Pengalihan penggunaan anggaran dari pembangunan menjadi penanganan pandemi covid 19 menjadi prioritas	Peniadaan pembangunan Fisik untuk pemenuhan Sarana dan prasarana penanganan covid 19	

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							untuk percepatan penanganan kesehatan masyarakat		
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
				- Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	meningkatkan koordinasi dan optimalisasi kemanan dengan kerjasam SATLINMAS dan Polisi serta TNI	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					
				- Persentase lingkup tugas Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Poin	0 Persen			
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				- Persentase desa yang mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85 Persen	85 Persen	Keterbatasan Data, informasi dan SDM mengenai produktivitas Aparat Desa dalam penerapan kegiatan dan Realisasi Administrasi Pemerintah Desa	a. Turun langsung Kelapangan untuk dilakukan pendampingan ; b. Rapat Koordinasi ataupun langsung baik melalui alat komunikasi untuk dilakukan pembinaan	
E.	Unsur Pemerintahan Umum								
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa, dan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Politik		<ul style="list-style-type: none"> - Nilai LAKIP perangkat daerah 	50- Poin 65 CC				
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan 	100 Persen	74 Persen	Terbenturnya Jadwal dan Tokoh Masyarakat yang akan di undang pada Kegiatan Sosialisasi	Akan meningkatkan koordinasi dan konsultasi sebelum pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, agar seluruh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang akan diundang bisa memastikan hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan	
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan 	100 Persen	100 Persen			
				Program Pemberdayaan					

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
				- Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	80 Persen	80 Persen			
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					
				- Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen			
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					
				- Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100 Poin	100 Persen			

Analisis pelaksanaan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawas Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

➤ **Sekretariat Daerah**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Program Perekonomian dan Pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan; Administrasi Tata Pemerintahan; Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; Fasilitasi Kerjasama Daerah; Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

a. Permasalahan

- Kebijakan belum sepenuhnya mengakomodir lingkup Pemerintahan yang di tindak lanjuti.

b. Solusi

- Penyusunan Peraturan Pemerintah Daerah untuk mengakomodir lingkup Pemerintahan.

➤ **Sekretariat DPRD**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD; Layanan Administrasi DPRD; Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Pembahasan Kebijakan Anggaran; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan Kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Fasilitasi Tugas DPRD.

a. Permasalahan

- Regulasi Pengelolaan Keuangan yang berubah-ubah menyebabkan keterlambatan proses pengelolaan keuangan si Sekretariat DPRD.
- Sering terjadinya pembatalan rapat DPRD yang sudah terjadwal sebelumnya, Tidak efisiennya anggaran konsumsi, terjadi rapat mendadak

b. Solusi

- Meningkatkan jumlah waktu kerja bagi bagian yang mengelola proses pengelolaan keuangan.
- Penyusunan Rencana kerja DPRD Tahunan, Memberi masukan kepada Pimpinan DPRD untuk lebih memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan, Memberi masukan kepada Pimpinan melalui Sekretaris DPRD.

2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

➤ **Perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah)**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

(Sumber Daya Alam); Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya.

a. Permasalahan

- Kekurangtahuan OPD-OPD yang turut merencanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.
- Masing-masing OPD belum mengetahui tupoksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga belum dapat bersinergi dengan OPD-OPD daerah lainnya, dengan daerah diatasnya dan dengan pemerintah pusat.

b. Solusi

- Memformulasikan langkah-langkah konkret penanganan dan antisipasi kekurangtahuan OPD-OPD yang turur merencanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.
- Mencermati secara seksama dan sungguh-sungguh tupoksi masing-masing OPD sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat bersinergi dengan OPD-OPD daerah lainnya, dengan saerah diatasnya dan dengan pemerintah pusat.

➤ **Keuangan(Badan Pendapatan Daerah)**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah.

Tidak ada permasalahan

➤ **Keuangan(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah; Pengelolaan Barang Milik Daerah.

a. Permasalahan

- Rekonsiliasi Keuangan dan Aset dengan seluruh OPD perlu ditingkatkan.
- Sumber Daya Manusia belum memiliki tanggungjawab terhadap Tupoksinya.
- Barang Milik Daerah harus lebih dikelola dan diinventarisir dengan lebih baik dan tertib administrasi.

b. Solusi

- Perlunya Bimbingan Teknis untuk menambah pengetahuan.
- Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah dengan inventarisasi dan rekonsiliasi Barang Millik Daerah yang rutin dengan semua OPD.

➤ **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan (Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia)**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Kepegawaian Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Mutasi dan Promosi ASN; Pengembangan Kompetensi ASN; Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

a. Permasalahan

- Terdapat PNS Fungsional yang purna Tugas (Pensiun).

b. Solusi

- Perlu Pengangkatan PNS JF Umenjadi PNS Fungsional

➤ **Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah)**

Telah dilaksanakan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD; Layanan Administrasi DPRD; Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Pembahasan Kebijakan Anggaran; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan Kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Fasilitasi Tugas DPRD

Tidak ada permasalahan.

3. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

➤ **Inspektorat Daerah (Inspektorat)**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penataan Organisasi; Penyelenggaraan Pengawasan Internal; Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu; Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; Pendampingan dan Asistensi.

a. Permasalahan

- Kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Barito Timur belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.
- Banyaknya rekomendasi temuan tahun yang lama yang belum sesuai, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman audit, dalam hal ini aparat desa dalam menindaklanjuti rekomendasi sesuai temuan.
- Banyaknya rekomendasi temuan tahun yang lama yang belum sesuai, sedangkan dokumen pendukung sudah banyak yang rusak. dan untuk temuan keuangan masih banyak yang belum tuntas, disebabkan ada yang sudah meninggal, ahli waris tidak punya penghasilan tetap untuk mengembalikan temuan, juga belum terdapat kebijakan yang mengatur penghapusan piutang daerah.
- Belum semua OPD mengintensifkan implementasi maturitas SPIP.
- Masih kurang dalam hal : pengelolaan SDM, praktik profesional, struktur tata kelola, peran dan layanan.

b. Solusi

- Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan ketetapan rumusan unsur-unsur kunci yaitu tujuan dan sasaran strategis dalam perencanaan telah berorientasi hasil/outcome atau menggambarkan kinerja yang seharusnya dan mampu menjawab isu strategis yang dihadapi. menyempurnakan dan melengkapi indikator kinerja yang lebih spesifik, relevan dan terukur disertai dengan target kinerja yang memadai. menjabarkan kembali perencanaan kinerja level pemda kedalam perencanaan level PD dengan menganut kerangka berpikir logis (logical framework) yang menggambarkan solusi pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapu pemerintah daerah. memberikan rekomendasi yang spesifik dalam melaksanakan

evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas implementasi manajemen kinerja kepada seluruh perangkat daerah serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan BPK-RI setiap bulan, melaksanakan pendekatan secara persuasif dengan penanggungjawab temuan agar rekomendasi temuan dapat di selesaikan.
- Mengintensifkan implementasi SPIP seluruh OPD.
- Perekrutan SDM APIP berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan, APIP wajib melakukan analisis gap kompetensi, melaksanakan pelatihan/diklat pengembangan kompetensi berdasarkan gap kebutuhan dan pengelolaan risiko, membuat risk register semua OPD, membuat kebijakan terkait manajemen risiko,identifikasi resiko, berupa audit kinerja, ketaatan, konsulting. melaksanakan telahaan sejawat.

4. Unsur Kewilayahannya

➤ Kecamatan Dusun Tengah

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan; Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

- Keterbatasan Fasilitas Sarana dan Prasarana pelayanan.
- Pengalihan penggunaan anggaran dari pembangunan menjadi penanganan pandemi covid 19 menjadi prioritas untuk percepatan penanganan kesehatan masyarakat.
- Keterbatasan Data, informasi dan SDM mengenai produktivitas Aparat Desa dalam penerapan kegiatan dan Realisasi Administrasi Pemerintah Desa.

b. Solusi

- Menggunakan fasilitas yang tersedia pada tahun lalu dan mengoptimalkan kreatifitas SDM.
- Peniadaan pembangunan Fisik untuk pemenuhan Sarana dan prasarana penanganan covid 19.
- Turun langsung Kelapangan untuk dilakukan pendampingan ; b. Rapat Koordinasi ataupun langsung baik melalui alat komunikasi untuk dilakukan pembinaan

➤ Kecamatan Pematang Karau

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

- Kewenang perijinan tidak berada di kecamatan.
- Semua usulan masyarakat diakomodir melalui Musrenbang, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua terakomodir berkaitan dengan keterbatasan dana.
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pemerintahan Umum.
- Keterlambatan pihak pemerintah desa dalam hal laporan pertanggungjawaban keuangan

b. Solusi

- menyarankan kepada masyarakat yang ingin meminta perijinan supaya ke dinas terkait di Kabupaten.
- Mengutamakan usulan yang Prioritas.
- Bersama sama pihak terkait saling bekerjasama mencari jalan keluar permasalahan.
- Memberi arahan, bimbingan , monitoring dan evaluasi kepada pemerintahan Desa.

➤ Kecamatan Awang

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

a. Permasalahan

- Pengalihan sementara penggunaan anggaran dari pembangunan menjadi penanganan pandemi covid 19 menjadi prioritas untuk percepatan penanganan kesehatan masyarakat

b. Solusi

- Peniadaan pembangunan Fisik untuk pemenuhan Sarana dan prasarana penanganan covid 19.

➤ Kecamatan Patangkep Tutui

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program

Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan; Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tidak ada Permasalahan.

➤ **Kecamatan Dusun Timur**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan; Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

- Usulan dari setiap desa sudah masuk semua tapi rata-rata masih berupa usulan lama karena masih belum ada yang terealisasi oleh pihak Kabupaten maupun Provinsi.

b. Solusi

- Terealisasinya beberapa usulan desa yang memang prioritas khususnya untuk kepentingan khalayak umum.

➤ **Kecamatan Benua Lima**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

- Masih adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan kegiatan diprioritaskan untuk percepatan penanganan pandemi covid 19.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, masih adanya perangkat desa yang kurang kesadaran akan tertib administrasi.

b. Solusi

- Pengembalian kepada kegiatan normal pasca pandemi covid 19 khususnya pembangunan dan pelatihan kepada masyarakat.
- Diadakannya monitoring, evaluasi, pendampingan dan pembinaan kepada aparatur desa serta perlu adanya bimbingan teknis

➤ **Kecamatan Paku**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

- Kurang Pegawai yang membidangi.
- Pengalihan sebagian anggaran untuk penanganan pandemi covid 19

b. Solusi

➤ **Kecamatan Paju Epat**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Tidak ada Permasalahan.

➤ **Kecamatan Raren Batuah**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

a. Permasalahan

- Banyaknya usulan yang disampaikan masyarakat pada wilayah Kecamatan Raren Batuah sehingga pagu dari OPD yang membidangi tidak dapat mengakomodir seluruhnya.
- Ada beberapa program kegiatan yang penganggarannya melebihi dari realisasi pengeluaran rill.
- Adanya beberapa program kegiatan yang waktu pelaksanaannya mendekati akhir tahun anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan

b. Solusi

- Usulan tersebut yang belum dapat diakomodir oleh OPD pada Tahun 2022 diusulkan kembali pada musrenbang Kecamatan Tahun 2023 untuk Perencanaan Tahun 2024.
- Telah dilakukan penyesuaian anggaran pada Tahun anggaran berjalan.
- Telah dilakukan penyesuaian anggaran pada Tahun anggaran berjalan.

➤ **Kecamatan Karusen Janang**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

a. Permasalahan

- Keterbatasan Fasilitas Saran dan Prasaran pelayanan serta masyarakat desa yang kurang informasi apa saja pelayanan yang tersedia di kecamatan sehingga masyarakat tidak dapat menerima pelayanan secara

efektif dan efisien karena harus ke Kabupaten yang seharusnya pelayanan dapat dilakukan di Kecamatan.

- Pengalihan penggunaan anggaran dari pembangunan menjadi penanganan pandemi covid 19 menjadi prioritas untuk percepatan penanganan kesehatan masyarakat.
- Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal.
- Keterbatasan Data, informasi dan SDM mengenai produktivitas Aparat Desa dalam penerapan kegiatan dan Realisasi Administrasi Pemerintah Desa

b. Solusi

- menggunakan fasilitas yang tersedia dengan optimal dan menambah fasilitas penunjang pelayanan, mengoptimalkan kreatifitas SDM pemberi pelayanan serta memanfaatkan teknologi media sosial yang lebih modern dalam memberikan informasi pelayanan yang tersedia di Kecamatan sehingga masyarakat menerima pelayanan dan petugas pelayanan yang efisien dan efektif.
- Peniadaan pembangunan Fisik untuk pemenuhan Sarana dan prasarana penanganan covid 19.
- meningkatkan koordinasi dan optimalisasi kemanan dengan kerjasama SATLINMAS dan Polisi serta TNI.
- Turun langsung Kelapangan untuk dilakukan pendampingan.
- Rapat Koordinasi ataupun langsung baik melalui alat komunikasi untuk dilakukan pembinaan

5. Unsur Pemerintahan Umum

➤ **Kesatuan bangsa dan Politik (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas)**

Telah dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

a. Permasalahan

- Terbenturnya Jadwal dan Tokoh Masyarakat yang akan di undang pada Kegiatan Sosialisasi.

b. Solusi

- Akan meningkatkan koordinasi dan konsultasi sebelum pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, agar seluruh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang akan diundang bisa memastikan hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Menurut Penjelasan atas Pasal 16 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan "Kebijakan Strategis" adalah kebijakan yang mempunyai dampak secara luas terhadap masyarakat daerah yang bersangkutan dan/atau membawa konsekuensi pembebanan terhadap APBD.

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Bupati Barito Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Barito Timur pada Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis. Produk hukum daerah Kabupaten Barito Timur yang terbit pada tahun 2022 seperti terdapat pada Tabel 3.2.1 berikut :

Tabel 3.2.1
Produk Hukum sebagai Kebijakan Strategis di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Peraturan Daerah Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 70 tanggal 29 Agustus 2022 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah 01,49/2022	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Peraturan Daerah Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 71 tanggal 6 Oktober 2022 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah 02,59/2022	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah
3.	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 72 tanggal 10 Oktober 2022 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah 03,67/2022 Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 72	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
4.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang Kabupaten Barito Timur	Peraturan Daerah Nomor 4 Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 73 tanggal 21 November 2022 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah 04,92/2022 Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 73	Pengelolaan air minum sebagai salah satu asset daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
5.	Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	Peraturan Daerah Nomor 5 Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 74 tanggal 21 November 2022 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah 05,94/2022 Tambahhan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 74	Agar Tanggung jawab sosial dan Lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil optimal
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Nomor 6 Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 75 tanggal 29 Desember 2022 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah 03,67/2022 Tambahhan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 75	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
7.	Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Nomor 1 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 104, tanggal 2 Februari 2022	Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan penggunaan Alokasi Dana Desa
8.	Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Nomor 2 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 105, tanggal 2 Februari 2022	Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
9.	Pedoman Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 3 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 106, tanggal 11 Maret 2022	Pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip
10.	Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang	Peraturan Bupati Nomor 7 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 110, tanggal 21 Maret 2022	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
11.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan	Peraturan Bupati Nomor 8 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 111, tanggal 05 April 2022	Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	Pemerintah Kabupaten Barito Timur		
12.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Nomor 9 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor, tanggal 14 April 2022	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
13.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Peraturan Bupati Nomor 10 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 113, tanggal 14 April 2022	Melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022
14.	Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	Peraturan Bupati Nomor 11 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 114, tanggal 20 April 2022	Menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang selaras pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan
15.	Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 12 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 115, tanggal 5 Juli 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
16.	Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 13 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 116, tanggal 5 Juli 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
17.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Nomor 14 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 117, tanggal 5 Juli 2022	Sebagai Acuan dan Pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah
18.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Nomor 15 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 118, tanggal 22 Juli 2022	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
19.	Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 16 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 119, tanggal 25 Juli 2022	Melaksanakan pasal 53 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2012
20.	Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini	Peraturan Bupati Nomor 17 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022	Pemerintah bertanggungjawab untuk melaksanakan Daerah pelayanan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
		Nomor 120, tanggal 26 Juli 2022	Pengembangan Holistik-Integratif Anak Usia Dini
21.	Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar	Peraturan Bupati Nomor 18 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 121, tanggal 26 Juli 2022	Meningkatnya perkembangan anak selama periode usia dini sebelum memasuki jenjang Pendidikan dasar
22.	Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan	Peraturan Bupati Nomor 19 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 122, tanggal 26 Juli 2022	Mewujudkan nilai-nilai jujur dan adil dalam Pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan
23.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022	Peraturan Bupati Nomor 20 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 123, tanggal 27 Juli 2022	Sebagai Acuan dan Pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah
24.	Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Bupati Nomor 21 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 124, tanggal 1 Agustus 2022	Melaksanakan pasal 64 ayat 1 huruf b Perda Kab.Barito Timur Nomor 2Tahun 2019
25.	Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 22 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 125, tanggal 23 Agustus 2022	Mewujudkan pengadaan barang jasa pemerintah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel
26.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Peraturan Bupati Nomor 23 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 126, tanggal 29 Agustus 2022	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD
27.	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 25 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 128, tanggal 7 September 2022	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat
28.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 26 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 129, tanggal 5 Oktober 2022	Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
29.	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Nomor 27 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 96, tanggal 10 Oktober 2022	Transparansi, akuntabilitas dan efisiensi Pengelolaan APBD

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
30.	Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Nomor 28 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 131, tanggal 12 Oktober 2022	Melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 12 Tahun 2019
31.	Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Peraturan Bupati Nomor 29 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 131, tanggal 12 Oktober 2022	Melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
32.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Nomor 30 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 133, tanggal 7 November 2022	Untuk memenuhi Ketentuan ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yg diterima Kab.Barito Timur
33.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 31 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 134, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
34.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 32 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 135, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
35.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 33 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 136, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
36.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 34 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 137, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
37.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 35 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 138, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
38.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 36 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 139, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
39.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 37 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 140, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
40.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persadian Dan Statistik Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 38 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 141, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
41.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 39 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 142, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
42.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 40 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 143, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
43.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 41 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 144, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
44.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 42 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 145, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
45.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 43 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 146, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
46.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 44 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 147, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
47.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas	Peraturan Bupati Nomor 45 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur	Nomor 148, tanggal 14 November 2022	guna mendukung kinerja pemerintah daerah
48.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 46 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 149, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
49.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 47 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 150, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
50.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 48 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 151, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
51.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 49 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 152, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
52.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 50 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 153, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
53.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 51 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 154, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
54.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 52 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 155, tanggal 14 November 2022	Mewujudkan birokrasi yang dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah
55.	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Peraturan Bupati Nomor 53 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 156, tanggal 28 November 2022	Melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
56.	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Nomor 54 Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157, tanggal 29 Desember 2022	Melaksanakan ketentuan Pasal 18 Perda Kab. Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur (2023)

Selama Tahun 2022 ada terdapat 56 produk hukum yang dihasilkan sebagai kebijakan strategis untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan dengan dasar hukum yang jelas. Produk hukum tersebut terdiri dari 6 Peraturan Daerah dan 50 Peraturan Bupati.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021

Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Timur pada Rabu, 30 Maret 2022 seperti yang dinyatakan dalam Risalah Paripurna DPRD pada Lampiran 2. Hal ini bersesuian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sedangkan menurut Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ. Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa pada Senin, 28 April 2022 seperti dinyatakan dalam Risalah Paripurna DPRD pada Lampiran 3. Adapun Surat Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 188.4/7/DPRD/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 seperti terlampir pada Lampiran 4.

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
DINAS PENDIDIKAN			
Urusan Pendidikan			
a.	Perlu tambahan Kurikulum baik disekolah untuk pelajaran yang berbasis Budaya serta adanya dibentuk sekolah dengan Basis Budaya demi memperkenalkan Budaya yang ada di Bumi Jari Janang Kalalawah seperti (Bengkel Budaya Tumet Leut)	Tahun 2022 untuk sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar, di dalam kurikulum tersebut ada revitalisasi bahasa daerah termasuk di dalamnya adalah tumet leut, bagi sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka belajar, tumet leut sebagai bagian dari kegiatan extra kurikuler	Meningkatkan pemahaman siswa tentang budaya daerah dan bahasa daerah Kabupaten Barito Timur
b.	Perlunya Peningkatan SDM Tenaga Administrasi dengan melalui pelatihan untuk operator sekolah agar biasa menguasai cara mengisi data DAPODIK agar bisa masuk ke Aplikasi Krisna	Dinas Pendidikan tidak mengadakan pelatihan untuk operator sekolah secara khusus tetapi operator dari Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan latihan langsung kepada operator sekolah di Dinas Pendidikan	Meningkatkan SDM Operator sekolah untuk memahami input dapodik terutama untuk sarana prasarana sekolah sehingga sarana prasarana yang mengalami kerusakan dapat dilaporkan ke Kemendikbudristek sehingga sekolah tersebut bisa mendapatkan anggaran untuk rehab sarana prasarana sekolah dari DAK Fisik
DINAS KESEHATAN			
Urusan Kesehatan			
a.	Perlunya perhatian pemerintah terhadap pengembangan dan peningkatan mutu SDM Kesehatan, melalui Pendidikan dan pelatihan (Diklat). Dengan adanya pelatihan maka akan meningkatkan SDM Kesehatan yang lebih bermutu.	Adanya Upaya penambahan ruang perawatan dan bangun baru terkait pengembangan Rumah Sakit di kabupaten Pembangunan RS PRATAMA didaerah yang jauh dari RS Kabupaten untuk menjangkau lebih dekat pelayanan dasar rujukan awal. Melakukan peningkatan kemampuan tenaga bidan dalam melakukan pelayanan ANC dengan pelatihan. Dalam hal mendekatkan akses pelayanan puskesmas dapat melakukan konsep Mobil ANC. Perlu dilakukan sosialisasi ke puskesmas untuk pertolongan persalinan dengan 6	Meningkatkan status fasilitas kesehatan menjadi pusat rujukan dasar, pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat yang jauh dari kota kabupaten, meningkatkan SDM kesehatan yang unggul dan berkompeten dibidang keahliannya masing-masing,

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
		<p>tangan</p> <p>Dihimbau kepada bidan untuk melakukan kunjungan bayi baru lahir dan melakukan sweeping penimbangan dan pengukuran kerumah balita.</p> <p>Menghimbau kepada pengelola program untuk melaksanakan penjaringan anak usia pendidikan dasar di sekolah sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.</p> <p>Melakukan sosialisasi tentang pelayanan kesehatan bagi remaja putri dan catin.</p> <p>Mengoptimalkan peran kader posyandu lansia untuk mengajak lansia agar memeriksakan diri di posyandu lansia terdekat.</p> <p>Optimalisasi peran posbindu dalam melakukan pelayanan di masyarakat terutama Deteksi Dini PTM, Memperluas sasaran skrining PTM ke sektor yang lain (Sekolah, kantor-kantor Pemerintah, dll).</p> <p>Optimalisasi skrining Deteksi dini DM di fasilitas kesehatan/posbindu dan menyediakan BMHP untuk menunjang skrining DM melalui Puskesmas-puskesmas.</p> <p>Memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan adanya dokter spesialis jiwa dengan mengadakan kerjasama dgn rumah sakit jiwa Kalawa Atei untuk pengobatan bagi pasien dgn masalah kesehatan jiwa dan home visit untuk odgj dengan pasung.</p> <p>Di awal tahun 2023 menyebarluaskan form deteksi dini gangguan kesehatan jiwa ke puskesmas" di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten Barito Timur dan memberikan target yg harus dicapai oleh Puskesmas di wilayah kerja masing-masing sebagai acuan kerja yg harus dicapai oleh Puskesmas dlm 1 tahun kedepannya.</p> <p>Menggiatkan penemuan aktif di PKM baik melalui deteksi dini maupun investigasi kontak khususnya bagi PKM dengan pencapaian SPM yang masih rendah, melakukan sosialisasi atau KIE kepada masyarakat tentang program TB (gejala, pemeriksaan dan pengobatan), berkoordinasi membentuk jejaring internal dan eksternal agar pemeriksaan terduga TB dapat dilakukan oleh semua PKM dengan maksimal terutama menggunakan media pemeriksaan TCM</p> <p>Meningkatkan skrining HIV untuk ibu hamil dan kelompok beresiko dan</p>	<p>meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu melahirkan,</p> <p>meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, meningkatkan pelayanan kesehatan bayi dan balita,</p> <p>meningkatkan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, meningkatkan pelayanan kesehatan usia produktif,</p> <p>meningkatkan pelayanan kesehatan usia lansia,</p> <p>meningkatkan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular khususnya Hipertensi,</p> <p>meningkatkan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular khususnya Diabetes Melitus,</p> <p>meningkatkan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa,</p> <p>meningkatkan pelayanan kesehatan Penyakit menular khususnya TB,</p> <p>meningkatkan pelayanan kesehatan penyakit menular khususnya HIV</p>

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
		mengoptimalkan ketersediaan RDT/Rapid Test HIV	
b.	Serta memperlancar pelayanan dibidang Kesehatan baik di RSUD, Puskesmas, Polindes dan Pustu maka perlu ditambahkan Dokter Spesialis , Dokter Umum dan Bidan sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui capaian 12 indikator SPM serta dari segi sarana dan prasarana kesehatan, sehingga dapat menghasilkan juga efisiensi waktu, tenaga, dan finansial yang secara tidak langsung ikut dalam pergerakan ekonomi masyarakat.	Adanya Upaya penambahan ruang perawatan dan bangun baru terkait pengembangan Rumah Sakit di kabupaten	Meningkatkan status fasilitas kesehatan menjadi pusat rujukan dasar

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a.	Perlunya meningkatkan rasio dan letak luas Kawasan pemukiman rawan banjir dan meningkatkan rasio luas daerah irigasi.	Melakukan penanganan pada kawasan permukiman rawan banjir dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengaman sungai melalui normalisasi sungai, pemasangan turap penangkis banjir dan saluran pembuang pada kawasan rawan banjir. Untuk meningkatkan rasio luas daerah irigasi dengan melakukan penanganan terhadap saluran irigasi primer dan sekunder yang menjadi prioritas sehingga dapat menunjang perekonomian daerah Barito Timur	Meningkatkan penanganan daerah rawan banjir dan luas daerah irigasi
b.	Persentase pada titik jalan yang merupakan akses utama yang digunakan masyarakat umum perlu peningkatan.	Melakukan penanganan dengan meningkatkan struktur dan fungsi jalan pada titik-titik jalan yang menjadi akses utama yang digunakan masyarakat baik jalan kabupaten maupun jalan lingkungan Agar masyarakat dapat berkendara dengan aman dan nyaman.	Peningkatan dan pemeliharaan jalan

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
a.	Perlunya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana banjir, longsor, kebakaran dengan melakukan koordinasi dengan BPBD Damkar, Dinas Sosial dan Bagian Kesra. Terkait daya wilayah rawan bencana sehingga bisa tepat sasaran.	Melakukan koordinasi dengan BPBD DAMKAR terkait SK kepala daerah tentang kawasan rawan bencana sehingga dapat dilakukan penanganan terhadap korban bencana.	Mitigasi bencana
DISNAKERTRANS			
Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
a.	Perlunya melakukan Konsultasi serta koordinasi dengan Institut terkait seperti Disnaker Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Dalam Rangka Penyusunan Kegiatan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 proyeksi Tahun 2024-2028 mengenai teknis penyusunan dan penganggaran.	Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Subbbagian Penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Dalam Rangka Penyusunan Kegiatan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 proyeksi Tahun 2024-2028 mengenai teknis penyusunan dan penganggaran.	Agar dokumen RTKD yang di usun mengikuti kaidah dan tatacara penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja serta selaras dengan Rencana Tenaga Kerja Nasional dan Rencana Tenaga Kerja Provinsi sehingga produk RTKD dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan Kabupaten Barito Timur.
b.	Perlunya Pembinaan dan Pelatihan kepada Perusahaan tentang penerapan Tata Kelola Kerja yang layak dan menyiapkan kegiatan serta pendanaan untuk penanganan Laporan dimaksud.	Pembinaan dan pelatihan sudah dilaksanakan pada tahun 2022 Pembinaan dan pelatihan secara triwulan ke perusahaan yang dihadiri perwakilan pekerja dan pengusaha serta menguatkan lembaga-lembaga ketenagakerjaan seperti LKS Bipartit dan Serikat Pekerja serta dilakukan pertemuan dengan pihak Disnaker Provinsi dalam rangka singkronisasi data.	Perselisihan dapat ditangani melalui mediasi sehingga dapat dihindari seminimal mungkin serta dipenuhinya syarat-syarat kerja di perusahaan serta terdatanya semua informasi ketenagakerjaan Hubungan Industrial Kabupaten Barito Timur sampai ketingkat pusat serta satu pandangan dalam memahami perubahan-perubahan regulasi yang ada.
c.	Perlunya melakukan	Telah dilakukan koordinasi dengan BPN	Selesainya masalah

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	koordinasi atau meminta Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan plotting Area serta perlunya melakukan mediasi antara warga ekstrasmigrasi dengan pihak yang menguasai obyek tanah tersebut.	untuk penyelesaian tumpang tindih lahan dan dilanjutkan dengan pengumpulan data dari masyarakat sebagai bahan mediasi penyelesaian masalah	tumpang tindih lahan transmigrasi tanpa ada pihak yang dirugikan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

a.	Perlunya mendata ulang serta pemisahan data secara terpilih (Data Gender dan Anak) antara laki-laki dan perempuan secara manual atau melalui aplikasi dan di Update enam bulan sekali sehingga dapat berjalan secara optimal.	Penginfutan Data dilakukan setiap bulan Maret sesuai permintaan dr pusat (Kementerian PPPA) dan dilakukan pendataan secara manual dari OPD/lembaga tetapi msh belum terpenuhi/kurang sesuai indikator yg sdh ditetapkan pusat.	Tersedianya data Gender dan Anak yang valid
----	---	--	---

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

Urusan Pangan

a.	Perlunya dibentuk Koperasi atau badan Usaha Milik Desa untuk penyediaan pupuk bersubsidi guna mempermudah daya beli masyarakat	Perlu diketahui penunjukan lembaga ataupun perorangan sebagai kios penyalur pupuk bersubsidi adalah wewenang distributor. Penunjukan sebagai kios pupuk bersubsidi pun harus melalui system. Kios penyalur resmi yang telah ada di Barito Timur masih bisa menghandel kebutuhan pupuk petani di wilayah Bartim, namun masih terkendala keterlambatan penyaluran. Terkait penyaluran Pupuk diatur oleh kementerian Perdagangan, jadi diharapkan peran serta oleh Dinas Perdagangan, karena payung hukum penyaluran diatur oleh Kementerian Perdagangan Sejauh ini ada 1 kios dan 1 koperasi telah direkomendasikan oleh Dinas, namun masih belum mendapat persetujuan dari Distributor, distributor masih mempertimbangkan kemampuan kios maupun koperasi dalam melaksanakan administrasi yang rumit dalam menyalurkan	Terpenuhinya kebutuhan pupuk masyarakat
----	--	--	---

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
		pupuk bersubsidi. Untuk wilayah lain yg belum memiliki kios pun, masih belum layak di buat kios pupuk bersubsidi karena penebusan di kecamatan-kecamatan tersebut masih kecil. Distributor tidak mau mengambil risiko apabila kios yang ditunjuk nanti mengundurkan diri karena penebusan kecil. Hal ini akan membuat kesulitan bagi ditributor karena harus mengajukan perubahan ulang ke sisitem dikarenakan ada kios yang mengundurkan diri dan Dinas juga harus mengajukan perubahan RDKK ke Pusat karena ada perubahan data di RDKK terkait kios.	
b.	Perlunya pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan serta desa bekerjasama dengan perusahaan terkait untuk penyediaan pupuk bersubsidi.	Penyaluran Pupuk bersubsidi berdasarkan Permendag Nomor 4 Tahun 2023 hanya boleh dilakukan oleh Holding BUMN, Distributor dan Kios Resmi, pihak lain diluar itu tidak dapat menyalurkan pupuk bersubsidi karena akan dikenakan sanksi. Kios Pupuk bersubsidi yang telah ada mampu menghandel kebutuhan pupuk oleh petani. Kegiatan Pengadaan Pupuk bersubsidi diatur oleh Kementerian Perdagangan, jadi diharapkan pihak Dinas Perdagangan juga aktif dalam memonitoring pnyalurannya agar berjalan tepat waktu dan lancar	Terpenuhinya kebutuhan pupuk masyarakat
c.	Peningkatan SDM tenaga penyuluh melalui bimbingan teknis dan pelatihan.	Mengikuti Pelatihan untuk Penyuluhan Pertanian, Petani dan Insan Pertanian yang diselenggarakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDA Pertanian Kementerian secara online. Penyelenggaraan Pelatihan Tematik yang dilaksanakan pada 10 BPP Se Kabupaten Barito Timur	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluhan Pertanian, Petani dan Insan Pertanian melalui pendidikan dan pelatihan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
Urusan Lingkungan Hidup			
a.	Perlunya dorongan dari pihak ke-3 untuk melaksanakan program CSR terkait bidang Pendidikan Khususnya program PBLHS.	DLH sebagai fasilitator kegiatan Adiwiyata yang mendukung PBLHS, akan terus mendorong pihak ke-3, yaitu perusahaan Perkebunan dan Pertambangan di willyah Kabupaten Bartim untuk memberikan CSR/bantuan di bidang Pendidikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kab Bartim	Meningkatnya dukungan pihak ke-3 untuk program PBLHS
b.	Perlu dilakukan sosialisasi /himbauan kepada masyarakat terkait cara membedakan antara	Megoptimalkan upaya pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan dan berupaya memberikan sanksi administrasi kepada pihak perusahaan yang tidak taat	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	sampah Organik, Sampah Non Organik dan Sampah Medis	Penanganan TPA akan terus dioptimalkan ditahun-tahun mendatang, dan untuk tempat TPS akan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan komunikasi dengan masyarakat sekitar. Selain itu pada akhir tahun 2022 dan 2023 telah menambah armada truk armroll melalui dana APBD	

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a.	Perlu dilakukannya pendataan ulang dalam terkait Data Penduduk baik untuk tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Melaksanakan Konsolidasi Data Penduduk Tingkat Kab,Kecamatan dan Desa Dalam meningkatkan keakuratan Data Penduduk	Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kabupaten Barito Timur
b.	Perlunya pelatihan dalam pelaksanaan pencetakan E-Ktp KK, KIA, dan AKTA, serta pencantuman title/gelar	Telah melakukan kegiatan bimtek online dalam penginputan Data Penduduk	Meningkatkan kemampuan SDM dalam meningkatkan Kinerja Pelayanan OPD

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a.	Perlunya pembukaan lapangan pekerja baru bagi masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan masyarakat melalui kerajinan lokal seperti pembuatan makan ringan, anyaman, mebel dan lain-lain.	Melakukan pelatihan pengolahan produk anyam-anyaman	Upaya membuka peluang usaha
b.	Perlu adanya perbaikan tata Kelola pengembangan infrastruktur Kawasan pedesaan terkhusus di daerah terpencil dan perbatasan dengan wilayah Kalimantan Selatan.	Akan lebih mendapatkan perhatian pada tahun selanjutnya melalui pengelolaan APBDes agar kedepan dapat disinergikan antara APBDes dengan APBD 1 dan APBD 2 untuk menfasilitasi dan mendorong maksimalitas penggunaannya melalui APBDes pada saat forum Musyawarah Pembangunan Desa	Perbaikan tata kelola pengembangan infrastruktur Kawasan pedesaan terkhusus di daerah terpencil dan perbatasan dengan wilayah Kalimantan Selatan.
c.	Perencanaan pengelolaan Bumdes harus melihat peluang pasar dan kondisi wilayah.	Melakukan pembinaan terhadap BUMDes. Pengelolaan BUMDes sudah berdasarkan potensi desa dan keunggulan wilayah. Untuk usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes sudah berdasarkan analisis	Perencanaan pengelolaan Bumdes yang tepat sasaran.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
		kelayakan usaha yang dibuat oleh masing-masing BUMDes dan diajukan kepada Camat untuk direkomendasikan pencairannya berdasarkan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. 10 Bumdesma di setiap Kecamatan, 14 Bumdesmart sudah terbangun. untuk 2023 Bumdesmart 12 target	
d.	OPD terkait melakukan perbaikan dan validasi data KK miskin setelah pandemi Covid 19, serta tetap melakukan penyaluran BLT masyarakat miskin khusus terdampak Covid-19 serta menumbuhkan wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pemberdayaan oleh OPD dan UMKM serta pelatihan keterampilan bagi pendidikan rendah	Verifikasi dan Validasi data tetap dilakukan melalui bidang sosial dan melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Penyaluran BLT tetap dilaksanakan sesuai update hasil verifikasi dan validasi dan dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Tahun 2023 akan dilaksanakan pelatihan peningkatan peluang usaha ekonomi kreatif yang salahsatunya melaksanakan pelatihan-pelatihan kerajinan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.	Penanggulangan kemiskinan dampak Covid-19 yang tepat sasaran

DINAS PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan

a.	Perlu dibentuk Pendirian Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Badan Usaha Pelabuhan serta pengurusan perijinan Pelabuhan sampai antar pulau.	Pendirian perusda sedang dalam proses	Pendirian Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Badan Usaha Pelabuhan serta pengurusan perijinan Pelabuhan sampai antar pulau.
b.	Perlunya disediakan angkutan Umum (Perintis) Kabupaten, Kecamatan dan Desa.	1). Melengkapi Data Dukung Usulan: - Rencana Lintasan Trayek - Panjang Lintasan - Potensi Kantong Penumpang 2). Survey Data Dukung	Tersedianya angkutan Umum (Perintis) Kabupaten, Kecamatan dan Desa

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR

Urusan Komunikasi dan Informasi

a.	Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas melalui system kontrak, dan	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur telah mengirim surat dengan Nomor : 800/04/01/Diskominfops/2023 Tanggal 03 Januari 2023 kepada Bupati Barito Timur Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan	Untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas (daftar
----	--	---	--

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	penambahan anggaran untuk pengembangan Aplikasi perlunya rekrutmen baru.	Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Timur	usulan terlampir)
b.	Perlunya pengembangan Sistem Jaringan Internet di Kawasan pedesaan yang terisolir.	<p>Pada Tahun 2022 Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik mendapatkan bantuan pembangunan menara BTS sebanyak 20 menara yang tersebar di 20 desa pada 10 wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Barito Timur. Bantuan tersebut adalah hasil dari usulan Diskominfosantik Kabupaten Barito Timur kepada BAKTI Kominfo melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Bantuan pembangunan Menara BTS N3T ini merupakan realisasi dari usulan 67 Desa yang terdiri dari 21 Desa kategori Blankspot dan 46 Desa Belum 4G hasil Survei Jaringan Seluler Tahun 2022.</p> <p>Dalam perkembangannya sampai sekarang prosentase cakupan layanan telekomunikasi seluler di Kabupaten Barito Timur telah mencapai 78% (tujuh puluh delapan persen) sedangkan prosentase cakupan layanan internet masih di angka 58% (lima puluh delapan persen). Pembangunan menara BTS N3T masih terus bergulir seiring target pemerintah dalam pemerataan akses digital. Rincian pembangunan menara BTS sebanyak 20 menara di Kabupaten Barito Timur Tahun 2022.</p>	Pengembangan Sistem Jaringan Internet di Kawasan pedesaan yang terisolir.

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Urusan Kelautan dan Perikanan

a.	Perlunya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana alat tangkap seperti klotok, tampirai, keramba apung, bubi, jaring ikan.	Mengadakan alat tangkap ikan : rengge 100 Unit dan tempirai 328 roll melalui APBD Kabupaten dan mengupayakan bantuan pengadaan alat tangkap melalui APBD Provinsi	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan
b.	Perlunya penyediaan bibit ikan dan pakan yang cukup.	Dukungan pemerintahan terhadap BBI Murung Baki dan Netampin sebagai tempat pemberian ikan yang baik dan berkualitas dengan optimalisasi pemeliharaan indukan ikan gurame jantan 80 Kg, Gurame Betina 80 Kg, Nila 2 Paket, Lele Dumbo Jantan 80 Kg, Lele Dumbo Betin 80 Kg, Patin Jantan 25 Kg, Patin Betina 30 Kg.	Penyediaan bibit ikan dan pakan yang cukup.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
c.	Perlunya dilakukan pengawasan terkait penggunaan alat setrum yang dapat merusak habitat ikan disungai, rawa, dan kolam.	Memberikan himbauan terhadap pemerintahan ditingkat desa untuk memperketat pengawasan sungai, rawa, danau, waduk dan genangan air lainnya.	Peningkatan pengawasan penangkapan ikan
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
a.	Perlu pembinaan atau pemahaman atau aturan hak dan kewajiban Anggota Koperasi juga memeriksa laporan Rapat Anggota tahunan (RAT)	Peningkatan kapasitas SDM Koperasi melalui Pelatihan sumber Dana DAK dan melakukan pengawasan secara Periodik kepada 60 Koperasi Aktif	Pembinaan anggota koperasi
b.	Memberikan pembinaan dan pengertian tentang peraturan Koperasi dan Merevitalisasi dan mengaktifkan kelembagaan Koperasi apabila ada yang tidak aktif.	Ditambahkan pembinaan Koperasi melalui Revitalisasi Koperasi aktif untuk lebih berkembang baik permodalan dan Usaha, Revitalisasi Koperasi tidak aktif dengan pemilihan pengurus dan juga penyuluhan dan perikutan anggota yang memiliki kepentingan dan usaha sama, Pembinaan dan memasyarakatkan Koperasi melalui Lomba Tangkas Terampil Koperasi kepada seluruh SLTA se Kabupaten Barito Timur	Pembinaan anggota koperasi
c.	Perlunya pembuatan MOU (mitra) dengan pihak ke-3.	Menyiapkan payung hukum agar koperasi bisa bermitra dengan pihak ke 3	
Urusan Perdagangan			
a.	Perlunya perbaikan meja tempat penjualan sayur mayur sehingga pedagang kembali dapat menggunakan fasilitas tersebut.	Meja pasar rakyat sudah di rehab melalui Dinas PUPR, dan per Januari 2023 Pasar Rakyat sudah operasional dan dalam proses penataan dan pembinaan pedagang Pasar Rakyat	Perbaikan meja tempat penjualan sayur mayur
b.	Perlunya penataan ulang tentang Kerjasama pengelolaan parkir di halaman pasar.	Semua pengelola parkir sudah berkontrak, dengan target penerimaan berdsar kotrak senilai Rp.102.000.000,-	Penataan ulang tentang Kerjasama pengelolaan parkir dihalaman pasar
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Urusan Penanaman Modal			
a.	Perlu dilakukan survey berkenaan dengan Pelayanan Penanaman Modal serta	Melaksanakan Survey IKM dengan metode survey langsung kepada penerima manfaat Pelayanan (publik atau masyarakat) melalui kuisioner dan wawancara dan yang kedua	Untuk mengetahui masalah atau kendala pelayanan agar dapat diperbaiki lebih lanjut

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	dilaksanakan pengembangan agar dapat mencapai (indeks Kepuasan Masyarakat) IKM dalam metode tersebut	melakukan survey IKM secara tidak langsung kepada publik dengan melalui media sosial baik WA, Facebook atau Instagram	sehingga meningkatkan indeks kepuasan konsumen atau publik selaku penerima jasa pelayanan
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga			
a.	Perlunya dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk kegiatan atau organisasi kepemudaan dibidang Olah Raga dan Seni Budaya		Telah dibuat rencana kegiatan untuk meningkatkan daya saing keolahragaan yaitu : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>) bagi Tenaga Pelatih Olahraga dan Praktisi Olahraga, namun dimasa Pandemi Covid 19, kegiatan ini dirasionalisasikan dan tidak diselenggarakan.
Urusan Kebudayaan			
a.	Perlu Peningkatan program pembinaan untuk pengembangan kesenian tradisional pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari Pemerintah Daerah terkait pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan permuseuman	Sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional telah dilaksanakan workshop/pelatihan kepada pelaku seni, memberikan bantuan (hibah) alat-alat musik tradisional kepada beberapa Sanggar Seni dan Budaya dan juga melaksanakan event Seni dan Budaya. - Sebagai bentuk pengawasan terkait Pengelolaan Cagar Budaya telah dilaksanakan inventarisasi dan legalisasi terhadap objek-objek di duga sebagai Cagar Budaya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Barito Timur dan pengelolaan permuseuman telah dilakukan registrasi terhadap benda-benda koleksi museum, penambahan koleksi dan mengusulkan rehab terhadap bangunan museum dan penataan/peremajaan taman.	Meningkatkan pelatihan kepada para pelaku seni, memperbanyak event-event seni dan budaya. - Terpeliharanya museum dan benda-benda koleksi terdaftar dan terregistrasi dengan baik.
b.	Perlunya meningkatkan anggaran kegiatan yang memadai serta mengkaji kegiatan peningkatan pelestrarian cagar	-Meningkatkan intensitas kegiatan inventarisasi dan legalitas terhadap objek-objek yang di duga sebagai Cagar Budaya. - Menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang kebudayaan dengan disiplin ilmu yang membidangi masalah Cagar Budaya dan Purbakala	Peningkatan pelestrarian cagar budaya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	budaya	- Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Barito Timur tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	
SEKRETARIAT DAERAH			
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
a.	Perlunya OPD terkait lebih proaktif guna percepatan pembentukan 3 UPTD dimaksud serta perlu dukungan anggaran yang memadai	Tidak Ada SOTK yang tercantum untuk mengenai tugas dan fungsi perihal pembentukan UPTD karena OPD teknis yang memiliki unit teknis	-
b.	Perlunya pengajuan keberatan ke Kemendagri dan pengajuan Judicial Review	Menyampaikan keberatan warga Desa Dambung Kecamatan Dusun Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Warga Desa Dambung diwakili oleh Damang Paku Karau dan Damang Pematang Karau Desa Dambung, Kepala Desa Dambung, Perwakilan Warga Lawangan Desa Dambung, Ormas GMTPS Desa Dambung, Perwakilan warga Dusun Ma'anyan Lawangan Desa Dambung.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (batas Desa Dambung dengan Kabupaten Tabalong).
SEKRETARIAT DEWAN			
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
a.	Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga proses program kegiatan DPRD yang sudah ditetapkan serta disesuaikan Rencana Anggaran kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan program yang dianggarkan, sehingga agar tidak menyebabkan keterlambatan melaksanakan kegiatan-kegiatan belanja daerah itu sendiri, sehingga realisasi kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan dapat	Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi Sumberdaya Manusia di Sekretariat DPRD, Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BPKAD maupun Lembaga Keuangan Lainnya yang berkaitan dengan pengeloaan dan penatausahaan keuangan, menjalin hubungan baik dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas/Badan yang mengelola keuangan dan perencanaan agar proses keuangan dan perencanaan tepat waktu dan tepat sasaran	Proses Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan tepat waktu dan tepat sasaran

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	terlaksana sesuai waktu dan target yang diharapkan		
b.	Sekretariat DPRD dapat dilibatkan dalam hal perencanaan dan pembahasan kegiatan DPRD	- Mengikuti Setiap perencanaan dan pembahasan kegiatan di DPRD	Menghindari Pembatalan Jadwal rapat mendadak di DPRD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

Capaian Kinerja Program untuk Penunjang Urusan

a.	Perlunya memperketat sinkronisasi atas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Aplikasi Dokumen Perencanaan.	Melakukan koordinasi dan asistensi kepada OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan baik dari usulan-usulan masyarakat maupun program/kegiatan masing-masing OPD	Sinkronisasi atas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta Aplikasi Dokumen Perencanaan
----	---	---	---

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan Pendapatan Daerah

a.	Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui pada Obyek Pajak Daerah yang Terdiri dari Restribusi Daerah dalam Pengelolaan PBB, peningkatan komunitas dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah.	Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan oleh Bapenda terutama dalam hal pengelolaan pajak PBB-P2. Tercatat tahun 2022 penerimaan dari sektor pajak PBB P2 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 90,40% (realisasi sebesar Rp 994.414.142) dari target pendapatan PBB-P2 setelah perubahan adalah sebesar Rp 1.100.000.000. Sedangkan informasi kepada masyarakat terus dilakukan melalui sosialisasi baik tingkat kecamatan, kelurahan, desa, perangkat desa, kolektor, masyarakat umum dan kemudahan dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah PBB-P2, 9 pajak lainnya dan juga retribusi daerah dengan kemudahan pembayaran pajak melalui mobile banking dan Qris. Banyak data wajib pajak baru yang mendaftarkan tanah/bangunan nya ke Bapenda dan dikeluarkanlah Nomor objek Pajak PBB-P2. Kemudahan melakukan transaksi pembayaran pajak melalui mobile banking dan aplikasi pembayaran pajak pbb-p2 melalui aplikasi perbankan dan agen-agen perbankan sampai ke desa menjadikan pendapatan dr sektor pajak PBB-P2 meningkat selain juga bantuan dari	Optimalisasi pendapatan daerah
----	---	---	--------------------------------

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
		setiap kolektor di tingkat perdesaan. Adanya sosialisasi langsung ke masyarakat melalui pelaksanaan penyampaian sppt-pbb,penertiban pajak daerah kerjasama dgn satpol PP,dinas teknis terkait perijinan bangunan gedung,pihak perbankan dalam sistem pembayaran pajak secara online.	
b.	Sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sehingga proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.	Sumber-sumber pendapatan lainnya akan terus diupayakan untuk ditingkatkan Dengan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dari dana transfer pusat dan bagi hasil provinsi ke daerah termasuk update informasi ttg peluang2 daerah dalam bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak melalui rakornas pendapatan ditingkat pusat dan juga informasi dari provinsi tentang dana bagi hasil dr provinsi yang akan disalurkan dan menghitung dan mencatat dana bagi hasil jika ada belum disalurkan ditahun berjalan. Menindaklanjuti keputusan pusat/provinsi ttg bagi hasil pajak ke daerah,memberikan data kepada kejaksaan tinggi negeri Barito timur ttg perusahaan yang ada di Bartim yang sudah membayar pajak daerah/royalti ke pusat agar dapat di monitor serta menyusun draf Raperda pajak dan retribusi di daerah tahun 2022 lanjut pembahasan dieksekutif tahun 2023 sampai target pembahasan didewan,dimana sesuai amanat UU Nomor 1 tahun2022 terdapat pasal yang mengatur ttg open pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh provinsi,bea balik nama kendaraan bermotor,dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).	Peningkatan sumber-sumber pendapatan lainnya

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Penunjang Urusan

a.	Pemerintah Daerah Hendaknya Dalam Pelaksanaan Dalam Pengelolaan Program Yang Terdiri Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Diharapkan Lebih Di Tingkat Serta Lebih Optimal dan diharapkan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatannya dalam Progresnya tercapai	Untuk mempercepat pencairan anggaran khususnya di akhir tahun diterbitkan Surat Kepala Daerah tentang Langkah-langkah menghadapi Akhir Tahun Anggaran	Memaksimalkan realisasi anggaran
----	---	---	----------------------------------

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	2	3	4
	100% sehingga yang sudah diprogramkan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan.		
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Capaian Kinerja Program untuk Penunjang Urusan			
a.	Perlunya melaksanakan Prajabatan untuk lulusan CPNS Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah.	Sudah dilaksanakan pelatihan dasar CPNS Tahun 2021 mulai tanggal 13 s/d 1 Sep 2022 (gelombang I) dan Tanggal 22 Juni s/d 12 September 2022 (gelombang II) di BPSPM Provinsi Kalimantan di Palangka Raya.	Pelaksanaan Prajabatan untuk lulusan CPNS Tahun 2021
b.	Perlunya peningkatan SDM melalui Diklat Kepemimpinan dan Bimbingan Teknis.	Menginformasikan kegiatan Bimtek dan Pelatihan melalui Media Elektronik	Peningkatan SDM melalui Diklat Kepemimpinan dan Bimbingan Teknis
INSPEKTORAT			
Capaian Kinerja Program untuk Penunjang Urusan			
a.	Perlunya melakukan sosialisasi tentang Program Anti Korupsi	Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan MCP-KPK. Adapun capaian nilai MCP-KPK tahun 2022 dengan skoring 83 pada 8 area Interpensi yang terdiri dari Perencanaan dan Penganggaran APBD, PBJ, Perijinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan BMD, dan Dana Desa. Di samping itu juga ada kegiatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Survei Penilaian Integritas, Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi dan kegiatan Saber Pungli	Dalam rangka percepatan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

3.4 Prestasi

Dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2022 ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Barito Timur yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
2. Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diterima Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 sebanyak 485 Piagam dari Kemendagri RI.

3. Piagam Penghargaan untuk Desa Wisata Taman Anggrek Hitam Magaran (Desa Siong) 500 besar Desa Wisata Anugerah Desa Wisata 2022.
4. Piagam Penghargaan untuk Desa Wisata Dam Turan Amis (Desa Turan Amis) 500 besar Desa Wisata Anugerah Desa Wisata 2022.
5. Piagam Penghargaan untuk Desa Wisata Putut Suku Hawa (Desa Pulau Patai) 300 besar Desa Wisata Anugerah Desa Wisata 2022.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pada Tahun 2022 Kabupaten Barito Timur tidak ada menerima Tugas Pembantuan sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas ini.

BAB V

PENUTUP

LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 disamping sebagai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Barito Timur juga berfungsi sebagai Informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama Tahun 2022. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022 saling melengkapi dengan dokumen laporan lainnya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 yang memuat tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Barito Timur selama Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur melaksanakan tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan berkoordinasi, bekerja sama serta partisipasi semua stakeholders sesuai dengan dengan fungsi dan tugas masing-masing. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2022 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama DPRD berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pelaksana pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, aparat keamanan, termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Barito Timur secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020, namun demikian kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2022 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan hikmat dan hidayah-Nya bagi kita semua baik sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana pembangunan, serta masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Barito Timur sesuai dengan cita-cita kita bersama menuju *Gumi Jari Janang kalalawah*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi APBD Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
DINAS PENDIDIKAN	235.809.369.927	214.818.592.845	91,1	99,9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	195.641.985.277	176.944.876.766	90,44	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	184.960.700	170.733.700	92,31	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.062.700	50.751.000	88,94	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.898.000	119.982.700	93,81	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	182.141.942.598	163.721.830.750	89,89	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	181.370.332.598	163.024.276.950	89,88	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	637.160.000	595.995.000	93,54	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.450.000	101.558.800	75,54	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.325.000	17.297.000	99,84	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.325.000	17.297.000	99,84	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.315.905	151.917.225	89,2	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.932.780	60.714.700	98,03	100,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	108.383.125	91.202.525	84,15	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.282.456.570	1.227.047.392	95,68	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	647.603.900	617.786.774	95,40	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.620.170	189.421.500	99,90	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.168.200	39.788.118	64,00	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.729.300	110.550.000	99,84	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.000.000	22.700.000	98,70	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	249.335.000	246.801.000	98,98	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.552.494.490	11.379.172.402	98,5	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.125.000	1.400.000	19,65	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.909.800	110.330.202	70,77	100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.859.690	117.492.200	99,69	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.271.600.000	11.149.950.000	98,92	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.490.014	276.878.297	94,66	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.898.214	39.573.200	90,15	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	119.716.500	116.177.670	97,04	100,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	128.875.300	121.127.427	93,99	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.167.384.650	37.873.716.079	94,29	99,42
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21.057.171.935	20.210.908.853	95,98	99,34
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas</i>	10.798.920.000	10.122.040.558	93,73	100,00
<i>Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>	228.147.740	211.651.460	92,77	100,00
<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>	172.333.935	172.333.935	100,00	100,00
<i>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	139.903.160	0	0,00	0,00
<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	41.697.100	31.749.900	76,14	100,00
<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	9.676.170.000	9.673.133.000	99,97	100,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15.129.591.885	13.842.583.626	91,49	100
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</i>	8.937.119.050	7.724.700.706	86,43	100,00
<i>Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>	175.258.675	159.950.500	91,27	100,00
<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>	166.439.920	166.439.920	100,00	100,00
<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	204.874.310	159.348.100	77,78	100,00
<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	119.499.930	105.744.400	88,49	100,00
<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	5.526.400.000	5.526.400.000	100,00	100,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.364.640.430	3.208.713.200	95,37	97,25
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD</i>	986.050.000	925.457.700	93,86	100,00
<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD</i>	2.239.595.000	2.236.879.000	99,88	100,00
<i>Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</i>	20.588.730	20.588.700	100,00	100,00
<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD</i>	10.715.400	10.715.400	100,00	100,00
<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</i>	92.618.900	0	0,00	0,00
<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</i>	15.072.400	15.072.400	100,00	100,00
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	615.980.400	611.510.400	99,27	100
<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan</i>	607.000.000	607.000.000	100,00	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	8.980.400	4.510.400	50,22	100,00
DINAS KESEHATAN	148.798.923.432	126.574.347.168	85,06	89,48
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.899.847.617	52.785.966.565	92,77	96,9
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.729.655	82.197.705	66,97	73,71
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.619.325	23.056.539	93,65	98,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	74.738.330	47.317.366	63,31	70,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.372.000	11.823.800	50,59	60,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.792.400.393	47.033.087.444	96,39	99,87
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.536.652.663	45.921.225.444	96,60	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.221.240.000	1.083.900.000	88,75	95,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.507.730	27.962.000	81,03	90,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	62.191.000	62.119.000	99,88	100
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	39.717.000	39.716.000	100,00	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.474.000	22.403.000	99,68	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.592.000	53.697.000	94,88	97,75
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.833.500	20.177.500	88,37	95,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.760.500	20.750.500	99,95	100,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.998.000	12.769.000	98,24	99,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	810.969.560	715.030.221	88,17	90,89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.936.600	285.638.971	87,37	95,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.293.000	26.293.000	100,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.730.840	115.845.150	82,32	90,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	103.513.120	103.352.100	99,84	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.266.000	47.065.000	99,57	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.980.000	35.728.000	96,61	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	63.000.000	57.350.000	91,03	99,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.250.000	43.758.000	66,05	75,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.125.715	194.015.500	99,94	100

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pengadaan Mebel</i>	98.500.000	98.500.000	100,00	100,00
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	95.625.715	95.515.500	99,88	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.419.690.000	4.236.427.105	65,99	75,58
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	36.490.000	34.600.000	94,82	98,00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	192.400.000	163.377.105	84,92	90,00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	6.190.800.000	4.038.450.000	65,23	75,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441.149.294	409.392.590	92,8	94,46
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	158.029.294	154.219.000	97,59	99,00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	57.120.000	29.428.690	51,52	60,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	226.000.000	225.744.900	99,89	100,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	80.909.899.517	70.417.495.081	87,03	92
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.744.637.894	7.954.702.565	81,63	89,74
<i>Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	1.000.000.000	0	0,00	0,00
<i>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	2.391.412.000	2.322.408.811	97,11	100,00
<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	3.846.696.000	3.308.491.592	86,01	100,00
<i>Pengadaan Obat, Vaksin</i>	2.506.529.894	2.323.802.162	92,71	100,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.980.510.513	62.299.566.516	87,77	92,31
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	24.999.820	15.045.410	60,18	70,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	279.077.710	57.974.710	20,77	30,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	21.182.410	19.382.410	91,50	95,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	27.061.020	24.261.020	89,65	95,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>	24.799.720	24.799.720	100,00	100,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>	17.999.715	17.699.715	98,33	100,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>	19.999.620	19.699.620	98,50	100,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>	21.760.775	21.163.475	97,26	100,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>	20.760.760	20.483.460	98,66	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i>	21.064.840	20.555.540	97,58	100,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i>	21.469.860	21.460.200	99,96	100,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>	21.010.800	21.006.400	99,98	100,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</i>	33.840.000	33.840.000	100,00	100,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	361.615.820	291.328.505	80,56	95,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	20.061.180	20.017.180	99,78	100,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	24.399.600	24.346.413	99,78	0,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>	26.855.945	25.000.950	93,09	98,00
<i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	126.416.600	104.632.590	82,77	90,00
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>	14.624.890	12.905.100	88,24	92,00
<i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	44.198.650	43.496.200	98,41	100,00
<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	3.352.592.823	200.090.696	5,97	6,00
<i>Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</i>	132.496.800	24.457.500	18,46	20,00
<i>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>	52.533.954.999	49.352.338.678	93,94	98,00
<i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	11.456.612.746	10.485.964.558	91,53	98,00
<i>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	1.597.828.000	1.134.275.441	70,99	85,00
<i>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</i>	681.812.920	211.575.400	31,03	38,00
<i>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>	52.012.490	51.765.625	99,53	100,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	184.751.110	163.226.000	88,35	92,48
<i>Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</i>	45.776.105	45.026.000	98,36	100,00
<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	138.975.005	118.200.000	85,05	90,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.639.219.418	3.058.242.845	28,74	30,52
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	40.608.230	30.638.200	75,45	80
<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	40.608.230	30.638.200	75,45	80,00
<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	49.401.660	49.381.660	99,96	100
<i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	49.401.660	49.381.660	99,96	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.549.209.528	2.978.222.985	28,23	30
<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.549.209.528	2.978.222.985	28,23	30,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	104.156.800	79.463.500	76,29	77,78
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	46.286.900	46.116.700	99,63	100
<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	46.286.900	46.116.700	99,63	100,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	57.869.900	33.346.800	57,62	60
<i>Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</i>	57.869.900	33.346.800	57,62	60,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	245.800.080	233.179.177	94,87	100
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.680.150	44.933.750	94,24	100
<i>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	47.680.150	44.933.750	94,24	100,00
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.119.930	188.245.427	95,02	100
<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	198.119.930	188.245.427	95,02	100,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	146.162.805.190	121.799.817.915	83,33	83,33
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.700.008.197	8.677.048.422	81,09	81,09
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.646.900	92.632.850	99,98	99,99
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	58.129.500	58.128.650	100,00	100,00
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	34.517.400	34.504.200	99,96	99,96
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.974.253.422	5.524.080.671	79,21	79,21
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	6.496.635.422	5.050.433.571	77,74	77,74

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	451.200.000	451.200.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.418.000	22.447.100	84,97	84,97
Administrasi Umum Perangkat Daerah	886.253.055	872.415.263	98,44	98,44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	332.871.400	330.746.439	99,36	99,36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.910.000	99,82	99,82
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.363.175	298.804.578	99,81	99,81
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.465.280	50.465.280	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.353.200	107.213.966	99,87	99,87
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	19.825.000	66,08	66,08
Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.200.000	15.450.000	95,37	95,37
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.885.100.000	1.627.566.636	86,34	86,34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.700.000	77.466.636	32,45	32,45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.634.400.000	1.538.100.000	94,11	94,11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	861.754.820	560.353.002	65,02	65,03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383.754.820	83.458.002	21,75	21,75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	478.000.000	476.895.000	99,77	99,77
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.588.381.081	4.943.788.878	88,47	88,46
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.266.266.581	3.630.396.718	85,1	85,09
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	218.023.500	217.523.500	99,77	99,77
Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.377.994.921	2.071.270.826	87,10	87,10
Normalisasi/Restorasi Sungai	1.670.248.160	1.341.602.392	80,32	80,32
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.322.114.500	1.313.392.160	99,34	99,34
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	769.724.000	769.550.200	99,98	99,98
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	552.390.500	543.841.960	98,45	98,45
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	8.439.073.726	8.271.766.486	98,02	98,02

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
PENYEDIAAN AIR MINUM				
<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	8.439.073.726	8.271.766.486	98,02	98,02
<i>Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan</i>	7.084.434.576	6.926.446.113	97,77	97,77
<i>Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</i>	1.354.639.150	1.345.320.373	99,31	99,31
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	199.349.590	156.157.400	78,33	78,33
<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	199.349.590	156.157.400	78,33	78,33
<i>Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-R/TPS</i>	199.349.590	156.157.400	78,33	78,33
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.916.830.148	5.915.647.976	99,98	99,98
<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	5.916.830.148	5.915.647.976	99,98	99,98
<i>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</i>	2.105.028.957	2.103.853.176	99,94	99,94
<i>Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman</i>	3.811.801.191	3.811.794.800	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.757.781.019	1.700.732.229	96,75	96,76
<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.757.781.019	1.700.732.229	96,75	96,76
<i>Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan</i>	1.506.961.390	1.468.825.000	97,47	97,47
<i>Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase</i>	250.819.629	231.907.229	92,46	92,46
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	8.442.041.622	8.177.798.945	96,87	96,87
<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	8.442.041.622	8.177.798.945	96,87	96,87
<i>Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	8.442.041.622	8.177.798.945	96,87	96,87
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	177.137.000	177.137.000	100	100
<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi</i>	177.137.000	177.137.000	100	100
Bangunan Gedung				
<i>Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</i>	177.137.000	177.137.000	100,00	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	20.996.550.127	20.364.311.840	96,99	96,99
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	20.996.550.127	20.364.311.840	96,99	96,99
<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota</i>	102.150.900	101.621.250	99,48	99,48
<i>Penataan Bangunan dan Lingkungan</i>	20.894.399.227	20.262.690.590	96,98	96,98
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	79.005.905.741	59.041.430.169	74,73	74,73
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	79.005.905.741	59.041.430.169	74,73	74,73
<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>	759.700.207	755.527.735	99,45	99,45
<i>Pembangunan Jalan</i>	65.865.491.680	46.385.173.074	70,42	70,42
<i>Pemeliharaan Rutin Jalan</i>	10.040.175.840	10.039.904.840	100,00	100,00
<i>Pembangunan Jembatan</i>	1.481.195.494	1.001.959.000	67,65	67,65
<i>Pemeliharaan Rutin Jembatan</i>	859.342.520	858.865.520	99,94	99,94
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	215.292.300	183.359.782	85,17	85,17
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	215.292.300	183.359.782	85,17	85,17
<i>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi</i>	215.292.300	183.359.782	85,17	85,17
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	853.196.300	671.756.279	78,73	78,74
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	748.524.600	601.781.965	80,4	80,4
<i>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota</i>	604.953.800	601.781.965	99,48	99,48
<i>Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang</i>	143.570.800	0	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	70.110.300	69.974.314	99,81	99,81
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota</i>	70.110.300	69.974.314	99,81	99,81
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	34.561.400	0	0	0
<i>Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	34.561.400	0	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	74.985.800	59.417.726	79,24	79,24
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	74.985.800	59.417.726	79,24	79,24

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	43.423.200	36.055.000	83,03	83,03
<i>Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</i>	31.562.600	23.362.726	74,02	74,02
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	177.647.300	169.029.600	95,15	95,15
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh) Ha	177.647.300	169.029.600	95,15	95,15
<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</i>	177.647.300	169.029.600	95,15	95,15
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	313.337.400	295.622.271	94,35	94,35
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	313.337.400	295.622.271	94,35	94,35
<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh) Ha</i>	313.337.400	295.622.271	94,35	94,35
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.255.039.639	2.955.514.712	90,8	90,8
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.255.039.639	2.955.514.712	90,8	90,8
<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	3.255.039.639	2.955.514.712	90,80	90,80
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.248.200	39.298.200	78,21	78,21
<i>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</i>	50.248.200	39.298.200	78,21	78,21
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil</i>	50.248.200	39.298.200	78,21	78,21
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.571.544.045	3.826.807.281	83,71	85,26
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.082.859.129	3.374.332.381	82,65	84,22
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.872.011.237	3.167.946.232	81,82	83,46
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.672.605.237	2.986.764.232	81,33	83,00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	199.406.000	181.182.000	90,86	92,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.277.960	44.277.960	100	100
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	26.378.360	26.378.360	100,00	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.499.600	12.499.600	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.599.400	19.302.657	93,7	94,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.999.000	16.951.657	94,18	95,28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.600.400	2.351.000	90,41	92,23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.970.532	142.805.532	97,83	97,91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.936.932	75.771.932	95,99	96,14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.033.600	67.033.600	100,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	488.684.916	452.474.900	92,59	93,97
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	355.427.316	347.607.400	97,8	98,89
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	138.594.966	137.656.000	99,32	100,00
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan	108.405.000	108.229.000	99,84	100,00
Kerusuhan Massa				
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	58.592.700	57.043.400	97,36	100,00
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.494.650	35.500.000	87,67	90,23
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	9.340.000	9.179.000	98,28	100,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	133.257.600	104.867.500	78,7	80,86
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	133.257.600	104.867.500	78,70	80,86
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.416.627.808	5.841.737.230	91,04	91,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.895.697.967	5.352.392.425	90,78	90,82
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.401.602.652	4.975.958.290	92,12	92,15

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.439.314.986	3.040.882.624	88,42	88,45
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.942.852.666	1.916.012.666	98,62	98,65
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.435.000	19.063.000	98,09	98,11
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.200.000	5.660.200	78,61	78,63
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.350.000	3.160.200	94,33	94,35
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.350.000	1.500.000	63,83	63,85
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000	1.000.000	66,67	66,69
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.700.000	67.257.700	95,13	95,16
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	48.200.000	48.174.000	99,95	99,98
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.500.000	19.083.700	84,82	84,85
Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.146.900	132.340.944	94,43	94,46
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.006.800	103.138.544	99,17	99,20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.608.200	6.580.000	99,57	99,60
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.564.500	6.500.000	99,02	99,05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.967.400	10.872.400	83,84	83,87
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	5.250.000	52,50	52,54
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.097.390	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.097.390	0	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.087.125	130.568.891	91,89	91,93
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.839.000	22.427.840	66,28	66,30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.248.125	108.141.051	99,90	99,94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.863.900	40.606.400	59,84	59,89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.213.900	37.207.400	57,94	58,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	3.399.000	93,12	93,15
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	200.373.343	174.585.572	87,13	87,16
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	9.540.000	9.510.000	99,69	99,7
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	9.540.000	9.510.000	99,69	99,70

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	73.380.000	71.006.400	96,77	96,79
<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	9.540.000	8.920.000	93,50	93,55
<i>Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</i>	51.800.000	50.060.400	96,64	96,67
<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	12.040.000	12.026.000	99,88	99,90
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	110.413.343	88.861.172	80,48	80,51
<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	42.255.000	40.829.670	96,63	96,65
<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	68.158.343	48.031.502	70,47	70,50
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	7.040.000	5.208.000	73,98	74
<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	7.040.000	5.208.000	73,98	74,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	320.556.498	314.759.233	98,19	98,2
<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	320.556.498	314.759.233	98,19	98,2
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</i>	320.556.498	314.759.233	98,19	98,20
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN	4.416.765.149	4.216.629.228	95,47	95,47
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.835.892.239	3.647.445.066	95,09	95,08
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	48.870.100	47.055.100	96,29	96,29
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	31.149.200	31.149.200	100,00	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	11.511.800	11.499.800	99,90	99,90
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6.209.100	4.406.100	70,96	70,96
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.079.118.467	2.959.564.609	96,12	96,11
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.920.826.167	2.807.310.797	96,11	96,11
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	138.320.000	132.320.000	95,66	95,66
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	8.367.300	8.334.812	99,61	99,61
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	11.605.000	11.599.000	99,95	99,95
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.092.400	6.044.400	99,21	99,21

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	6.092.400	6.044.400	99,21	99,21
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.093.000	14.088.000	99,96	99,96
<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	14.093.000	14.088.000	99,96	99,96
Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.872.855	163.500.696	96,25	96,25
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	94.487.800	94.403.715	99,91	99,91
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	8.634.500	8.633.550	99,99	99,99
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	22.178.055	21.290.931	96,00	96,00
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	2.841.000	2.841.000	100,00	100,00
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	11.731.500	11.731.500	100,00	100,00
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	21.600.000	16.200.000	75,00	75,00
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	8.400.000	8.400.000	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.930.000	3.807.945	96,89	96,89
	3.930.000	3.807.945	96,89	96,89
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.736.800	376.043.216	87,1	87,1
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	5.610.000	5.605.000	99,91	99,91
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	89.526.800	42.238.216	47,18	47,18
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	336.600.000	328.200.000	97,50	97,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.178.617	77.341.100	94,11	94,12
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	43.490.617	38.653.100	88,88	88,88
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	25.494.000	25.494.000	100,00	100,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	13.194.000	13.194.000	100,00	100,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	165.293.465	163.970.185	99,2	99,2
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	112.063.065	110.960.785	99,02	99,01
<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	57.841.065	57.267.465	99,01	99,01
<i>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</i>	54.222.000	53.693.320	99,02	99,02
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16.879.000	16.879.000	100	100

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16.879.000	16.879.000	100,00	100,00
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	36.351.400	36.130.400	99,39	99,39
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	36.351.400	36.130.400	99,39	99,39
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	37.309.600	37.179.000	99,65	99,65
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	27.813.600	27.683.000	99,53	99,53
Pelayanan antar Kerja	27.813.600	27.683.000	99,53	99,53
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	9.496.000	9.496.000	100	100
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	9.496.000	9.496.000	100,00	100,00
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	115.427.345	110.797.045	95,99	95,99
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.204.000	39.944.000	99,35	99,35
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	8.891.400	8.891.400	100,00	100,00
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	8.312.800	8.312.800	100,00	100,00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	22.999.800	22.739.800	98,87	98,87
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	75.223.345	70.853.045	94,19	94,19
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.766.845	39.751.845	99,96	99,96
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.456.700	15.355.400	99,34	99,34
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	7.967.800	7.967.800	100,00	100,00
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	12.032.000	7.778.000	64,64	64,64
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	76.125.900	71.506.982	93,93	93,93

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	76.125.900	71.506.982	93,93	93,93
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	30.687.200	26.125.082	85,13	85,13
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	45.438.700	45.381.900	99,87	99,87
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	155.216.600	154.722.950	99,68	99,68
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	155.216.600	154.722.950	99,68	99,68
<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)</i>	74.325.000	73.872.400	99,39	99,39
<i>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SII Nas</i>	80.891.600	80.850.550	99,95	99,95
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	31.500.000	31.008.000	98,44	98,44
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	31.500.000	31.008.000	98,44	98,44
<i>Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman</i>	11.884.000	11.744.000	98,82	98,82
<i>Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman</i>	19.616.000	19.264.000	98,21	98,21
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	8.722.766.637	7.034.844.696	80,65	80,51
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.783.005.142	3.795.348.921	79,35	79,35
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.640.700	47.543.850	97,74	97,74
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.640.700	47.543.850	97,74	97,74
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.524.171.465	2.702.789.407	76,69	76,69
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.407.531.465	2.616.749.407	76,79	76,79
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	116.640.000	86.040.000	73,77	73,77
Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.539.285	371.215.995	94,33	94,33
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	224.397.550	221.704.601	98,80	98,80
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	33.080.000	14.239.000	43,04	43,04
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	40.010.835	39.887.794	99,69	99,69
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	47.208.500	46.586.500	98,68	98,68

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.002.400	3.998.100	99,89	99,89
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.040.000	43.000.000	99,91	99,91
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.700.400	638.442.269	82,31	82,3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.700.400	46.942.269	84,28	84,28
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.000.000	591.500.000	82,15	82,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.953.292	35.357.400	86,34	86,34
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.953.292	35.357.400	86,34	86,34
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	115.775.990	115.275.990	99,57	89,5
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	23.326.400	23.326.400	100	50
	11.663.200	11.663.200	100,00	0,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.663.200	11.663.200	100,00	100,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.174.800	30.174.800	100	100
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24.499.800	24.499.800	100,00	100,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5.675.000	5.675.000	100,00	100,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	62.274.790	61.774.790	99,2	99,2
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	62.274.790	61.774.790	99,20	99,20
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	43.085.230	42.975.230	99,74	99,75
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12.525.100	12.453.100	99,43	99,43
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12.525.100	12.453.100	99,43	99,43
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.560.130	30.522.130	99,88	99,88

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.560.130	30.522.130	99,88	99,88
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	104.857.700	104.791.300	99,94	99,94
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	104.857.700	104.791.300	99,94	99,94
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.240.000	23.240.000	100,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.900.300	24.900.300	100,00	100,00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.717.400	56.651.000	99,88	99,88
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	21.280.000	21.280.000	100	100
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.280.000	21.280.000	100	100
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	21.280.000	21.280.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	72.779.000	72.007.060	98,94	98,94
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	32.671.200	32.090.660	98,22	98,22
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	22.147.200	21.975.200	99,22	99,22
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10.524.000	10.115.460	96,12	96,12
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40.107.800	39.916.400	99,52	99,52
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24.457.800	24.314.400	99,41	99,41
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.536.000	9.500.000	99,62	99,62
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.114.000	6.102.000	99,80	99,80
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	39.615.100	37.700.100	95,17	95,16

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.217.100	31.533.100	94,93	94,93
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	23.501.300	21.817.300	92,83	92,83
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	9.715.800	9.715.800	100,00	100,00
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.398.000	6.167.000	96,39	96,39
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	6.398.000	6.167.000	96,39	96,39
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	106.349.900	105.347.700	99,06	99,06
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106.349.900	105.347.700	99,06	99,06
<i>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</i>	38.217.900	37.512.000	98,15	98,15
<i>Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>	68.132.000	67.835.700	99,57	99,57
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.441.800.580	2.080.964.800	85,22	85,22
<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	513.000.000	447.540.000	87,24	87,24
<i>Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	108.000.000	62.540.000	57,91	57,91
<i>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK</i>	405.000.000	385.000.000	95,06	95,06
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	989.385.580	744.009.800	75,2	75,2
<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	218.525.480	38.000.000	17,39	17,39
<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	690.503.000	626.353.000	90,71	90,71
<i>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	8.750.000	8.184.000	93,53	93,53
<i>Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</i>	64.755.100	64.686.800	99,89	99,89
<i>Peningkatan Kesertaan KB Pria</i>	6.852.000	6.786.000	99,04	99,04
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	939.415.000	889.415.000	94,68	94,68

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	594.415.000	544.415.000	91,59	91,59
<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	345.000.000	345.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	994.217.995	659.153.595	66,3	66,3
<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	892.470.200	572.110.500	64,1	64,11
<i>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	838.880.000	518.560.000	61,82	61,82
<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	53.590.200	53.550.500	99,93	99,93
<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	101.747.795	87.043.095	85,55	85,55
<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	48.219.200	34.358.600	71,26	71,26
<i>Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</i>	53.528.595	52.684.495	98,42	98,42
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.860.970.689	9.854.943.404	90,74	90,73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.460.260.209	6.821.040.187	91,43	91,43
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	20.016.000	20.014.000	99,99	99,99
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	10.008.000	10.008.000	100,00	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	10.008.000	10.006.000	99,98	99,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.751.551.829	3.362.771.487	89,64	89,63
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.530.895.829	3.154.983.487	89,35	89,35
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	200.640.000	187.780.000	93,59	93,59
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	10.008.000	10.007.000	99,99	99,99
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	10.008.000	10.001.000	99,93	99,93
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.600.000	0	0	0

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	37.600.000	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.246.950	206.991.792	83,38	83,38
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	140.033.000	109.522.884	78,21	78,21
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	8.000.000	7.965.500	99,57	99,57
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	29.947.650	29.673.408	99,08	99,08
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	4.999.700	4.725.000	94,51	94,51
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	14.866.600	11.764.000	79,13	79,13
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	15.000.000	14.811.000	98,74	98,74
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	14.400.000	9.000.000	62,50	62,50
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	21.000.000	19.530.000	93,00	93,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.142.960	77.455.800	99,12	99,12
<i>Pengadaan Mebel</i>	78.142.960	77.455.800	99,12	99,12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.179.107.000	3.013.070.259	94,78	94,78
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	5.507.000	4.960.000	90,07	90,07
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	35.600.000	28.210.259	79,24	79,24
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	3.138.000.000	2.979.900.000	94,96	94,96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.587.470	130.729.849	96,42	96,42
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	55.497.470	52.210.500	94,08	94,08
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	9.990.000	8.775.000	87,84	87,84
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	70.100.000	69.744.349	99,49	99,49
Penataan Organisasi	10.008.000	10.007.000	99,99	99,99
<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	10.008.000	10.007.000	99,99	99,99
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.180	189.949.846	94,97	94,97
<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>	200.000.180	189.949.846	94,97	94,97
<i>Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</i>	200.000.180	189.949.846	94,97	94,97
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	255.172.900	224.102.761	87,82	87,82
<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	114.998.000	93.061.000	80,92	80,92

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	70.000.000	66.024.000	94,32	94,32
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	44.998.000	27.037.000	60,08	60,08
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60.174.900	55.279.900	91,87	91,86
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	30.174.900	29.101.200	96,44	96,44
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	30.000.000	26.178.700	87,26	87,26
Pemulihian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	80.000.000	75.761.861	94,7	94,71
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	45.000.000	41.183.161	91,52	91,52
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	35.000.000	34.578.700	98,80	98,80
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	691.220.000	668.913.680	96,77	96,77
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	691.220.000	668.913.680	96,77	96,77
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	34.996.200	22.576.200	64,51	64,51
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	656.223.800	646.337.480	98,49	98,49
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)	85.782.000	76.837.300	89,57	89,57
Penyimpanan Sementara Limbah B	85.782.000	76.837.300	89,57	89,57
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B	85.782.000	76.837.300	89,57	89,57
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	101.742.800	80.772.100	79,39	79,39
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	101.742.800	80.772.100	79,39	79,39
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	34.999.800	28.511.600	81,46	81,46
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.877.000	36.061.500	86,11	86,11

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	24.866.000	16.199.000	65,15	65,15
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	49.998.500	43.456.100	86,91	86,91
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	49.998.500	43.456.100	86,91	86,91
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	49.998.500	43.456.100	86,91	86,91
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	76.256.400	49.513.600	64,93	64,93
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.256.400	49.513.600	64,93	64,93
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	19.992.000	0	0,00	0,00
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	56.264.400	49.513.600	88,00	88,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	18.004.800	0	0	0
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.004.800	0	0	0
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18.004.800	0	0,00	0,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	53.838.900	46.665.900	86,68	86,68
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	53.838.900	46.665.900	86,68	86,68
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	33.835.900	32.963.900	97,42	97,42
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	20.003.000	13.702.000	68,50	68,50
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.868.694.000	1.653.691.930	88,49	88,49
Pengelolaan Sampah	1.868.694.000	1.653.691.930	88,49	88,49
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	334.135.200	238.899.940	71,50	71,50

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</i>	3.995.000	3.995.000	100,00	100,00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan</i>	1.530.563.800	1.410.796.990	92,17	92,17
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.427.471.323	4.003.225.190	90,42	98,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.769.814.828	3.369.750.340	89,39	98,6
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.582.226.664	2.262.759.683	87,63	100
	2.432.586.664	2.113.119.683	86,87	100,00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	149.640.000	149.640.000	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	490.099.270	482.115.607	98,37	99,63
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	180.069.100	176.866.107	98,22	99,00
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	10.010.000	9.943.000	99,33	100,00
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	229.281.670	224.876.550	98,08	100,00
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	15.623.100	15.368.950	98,37	100,00
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	12.575.400	12.552.200	99,82	100,00
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	30.600.000	30.600.000	100,00	100,00
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	11.940.000	11.908.800	99,74	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.840.000	549.670.200	94,96	95,22
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	79.040.000	49.870.200	63,09	65,00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	499.800.000	499.800.000	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.648.894	75.204.850	63,38	80,47
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	33.338.894	27.324.100	81,96	85,00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	53.690.000	25.060.900	46,68	75,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	31.620.000	22.819.850	72,17	85,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	419.933.295	401.287.050	95,56	98
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	419.933.295	401.287.050	95,56	98
<i>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk</i>	419.933.295	401.287.050	95,56	98,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	147.940.800	147.405.500	99,64	99,9
Pelayanan Pencatatan Sipil	133.372.800	133.200.000	99,87	100

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	133.372.800	133.200.000	99,87	100,00
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	14.568.000	14.205.500	97,51	99
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	14.568.000	14.205.500	97,51	99,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	40.368.400	35.368.500	87,61	93,73
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	15.037.900	14.842.000	98,7	100
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	15.037.900	14.842.000	98,70	100,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.330.500	20.526.500	81,03	90
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.330.500	20.526.500	81,03	90,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.414.000	49.413.800	100	100
Penyusunan Profil Kependudukan	49.414.000	49.413.800	100	100
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	49.414.000	49.413.800	100,00	100,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL	4.843.547.935	4.150.850.490	85,7	99,48
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.753.366.765	3.108.640.401	82,82	99,32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.032.076.861	2.444.213.419	80,61	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.912.866.861	2.327.063.419	79,89	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119.210.000	117.150.000	98,27	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.565.795	162.967.756	97,26	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.153.000	96.995.416	95,89	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.999.095	29.575.395	98,59	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.900.000	3.885.000	99,62	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.206.000	3.205.000	99,97	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.700	14.998.945	99,99	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.200.000	10.200.000	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.108.000	4.108.000	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.799.310	22.082.895	43,47	50
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.799.310	22.082.895	43,47	50,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.694.600	354.903.100	95,23	100
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.095.000	4.095.000	100,00	100,00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	34.999.600	31.158.100	89,02	100,00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	333.600.000	319.650.000	95,82	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.230.199	124.473.231	95,58	100
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	115.480.199	113.911.754	98,64	100,00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	14.750.000	10.561.477	71,60	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	159.224.000	151.535.400	95,17	100
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	159.224.000	151.535.400	95,17	100
<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	60.434.000	54.941.800	90,91	100,00
<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	60.000.000	59.000.000	98,33	100,00
<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	38.790.000	37.593.600	96,92	100,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	112.497.180	110.846.400	98,53	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	112.497.180	110.846.400	98,53	100
<i>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</i>	42.542.180	42.004.400	98,74	100,00
<i>Pemberian Layanan Rujukan</i>	69.955.000	68.842.000	98,41	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	83.700.000	69.375.000	82,89	100
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	83.700.000	69.375.000	82,89	100
<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	15.000.000	12.600.000	84,00	100,00
<i>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	68.700.000	56.775.000	82,64	100,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	78.062.950	73.477.610	94,13	100
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	42.182.950	41.592.050	98,6	100
<i>Penyediaan Makanan</i>	42.182.950	41.592.050	98,60	100,00
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	35.880.000	31.885.560	88,87	100

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	35.880.000	31.885.560	88,87	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	15.713.520	15.702.520	99,93	100
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	15.713.520	15.702.520	99,93	100
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	15.713.520	15.702.520	99,93	100,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	226.345.645	225.195.565	99,49	100
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	226.345.645	225.195.565	99,49	100
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	25.196.000	25.181.000	99,94	100,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	33.305.300	32.324.400	97,05	100,00
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	13.363.700	13.353.700	99,93	100,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	13.497.000	13.427.720	99,49	100,00
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	62.197.230	62.123.130	99,88	100,00
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	32.286.615	32.286.615	100,00	100,00
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	16.499.800	16.499.000	100,00	100,00
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	414.637.875	396.077.594	95,52	100
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	414.637.875	396.077.594	95,52	100
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9.864.000	8.933.200	90,56	100,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	24.471.900	24.451.900	99,92	100,00
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	14.494.400	14.454.400	99,72	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	6.273.700	6.263.700	99,84	100,00
<i>Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	7.186.100	7.186.100	100,00	100,00
<i>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	352.347.775	334.788.294	95,02	100,00
DINAS PERHUBUNGAN	4.919.271.663	4.368.195.901	88,8	96,83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.356.771.773	4.012.428.649	92,1	99,51
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	14.333.585	14.190.800	99	100
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8.180.050	8.129.800	99,39	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6.153.535	6.061.000	98,50	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.435.681.404	3.145.074.171	91,54	100
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.311.981.404	3.021.374.171	91,23	100,00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	123.700.000	123.700.000	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.801.263	164.392.132	82,28	92,02
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	152.540.600	120.432.998	78,95	90,00
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	5.094.813	5.028.000	98,69	100,00
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	11.349.600	11.121.534	97,99	100,00
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	4.060.000	3.305.000	81,40	97,00
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	6.956.250	6.954.600	99,98	100,00
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	11.400.000	9.150.000	80,26	95,00
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	8.400.000	8.400.000	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.717.585	55.992.396	98,72	100
<i>Pengadaan Mebel</i>	28.500.000	28.171.800	98,85	100,00
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	28.217.585	27.820.596	98,59	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.600.000	570.220.550	98,89	100
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	69.600.000	69.220.550	99,45	100,00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	504.000.000	498.000.000	98,81	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.637.936	62.558.600	84,95	92,55

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.947.441	11.798.300	84,59	95,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.662.495	44.445.300	87,73	95,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.028.000	6.315.000	69,95	75,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	562.499.890	355.767.252	63,25	76,06
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	212.515.500	149.155.920	70,19	89,72
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	200.538.000	141.696.920	70,66	90,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	11.977.500	7.459.000	62,28	85,00
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	12.880.000	12.176.700	94,54	100
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	12.880.000	12.176.700	94,54	100,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	88.855.600	62.674.600	70,54	90
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	88.855.600	62.674.600	70,54	90,00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	204.025.630	102.044.632	50,02	54,09
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	34.834.430	34.410.000	98,78	100,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	51.652.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12.500.000	12.500.000	100,00	100,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	105.039.200	55.134.632	52,49	60,00
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	0	0	0,00	0,00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.223.160	17.286.000	59,15	70
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (satu) Kabupaten/Kota	29.223.160	17.286.000	59,15	70,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	12.429.400	82,86	90
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	15.000.000	12.429.400	82,86	90,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR	5.175.964.114	4.657.086.145	89,98	89,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.193.293.649	2.756.016.502	86,31	86,31
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.839.900	36.839.900	100	100
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	18.439.900	18.439.900	100,00	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	18.400.000	18.400.000	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.456.921.550	2.057.323.228	83,74	83,74
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.268.779.950	1.869.841.628	82,42	82,42
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	148.320.000	148.320.000	100,00	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	14.427.000	13.767.000	95,43	95,43
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan</i>	25.394.600	25.394.600	100,00	100,00
<i>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.130.305	108.630.555	92,74	92,74
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	69.082.500	61.734.500	89,36	89,36
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	3.665.000	3.665.000	100,00	100,00
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	21.425.605	21.240.605	99,14	99,14
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	12.855.800	11.889.450	92,48	92,48
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	10.101.400	10.101.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.952.000	523.165.946	95,83	95,83
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	341.412.000	320.125.946	93,77	93,77
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	204.540.000	203.040.000	99,27	99,27
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.449.894	30.056.873	82,46	82,46
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	20.619.894	14.846.873	72,00	72,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	15.830.000	15.210.000	96,08	96,08
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.691.760.700	1.615.705.500	95,5	95,51

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.691.760.700	1.615.705.500	95,5	95,51
<i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	36.964.900	25.320.800	68,50	68,50
<i>Layanan Hubungan Media</i>	40.770.000	40.770.000	100,00	100,00
<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i>	1.614.025.800	1.549.614.700	96,01	96,01
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	90.607.440	86.273.975	95,22	95,22
<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	90.607.440	86.273.975	95,22	95,22
<i>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>	41.888.440	41.442.485	98,94	98,94
<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	26.242.000	22.563.000	85,98	85,98
<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	22.477.000	22.268.490	99,07	99,07
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	39.541.200	39.478.000	99,84	99,84
<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	39.541.200	39.478.000	99,84	99,84
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	28.741.200	28.678.000	99,78	99,78
<i>Pengembangan Infrastruktur</i>	10.800.000	10.800.000	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	160.761.125	159.612.168	99,29	99,29
<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	160.761.125	159.612.168	99,29	99,29
<i>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	25.800.100	25.450.000	98,64	98,64
<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	134.961.025	134.162.168	99,41	99,41
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.272.678.187	3.118.591.207	95,29	95,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.806.584.187	2.683.982.607	95,63	95,63
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	24.276.800	24.276.800	100	100
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	11.911.400	11.911.400	100,00	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	12.365.400	12.365.400	100,00	100,00
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.888.953.267	1.821.529.675	96,43	96,43
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.757.553.467	1.692.099.875	96,28	96,28

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112.800.000	110.830.000	98,25	98,25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.599.800	18.599.800	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.642.520	282.365.920	98,17	98,16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.475.200	173.198.420	98,14	98,14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.504.000	7.504.000	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.993.320	73.130.500	97,52	97,52
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.424.000	10.287.000	98,69	98,69
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.646.000	11.646.000	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000	4.800.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.330.400	533.081.713	92,18	92,17
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.540.000	5.895.100	90,14	90,14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.590.400	38.786.613	71,05	71,05
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	517.200.000	488.400.000	94,43	94,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.381.200	22.728.499	83,01	83,01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.871.200	15.218.499	76,59	76,59
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.510.000	7.510.000	100,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	14.262.000	14.262.000	100	100
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	14.262.000	14.262.000	100	100
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	14.262.000	14.262.000	100,00	100,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	30.000.000	20.147.000	67,16	67,16
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000	20.147.000	67,16	67,16
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	30.000.000	20.147.000	67,16	67,16
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	421.832.000	400.199.600	94,87	94,87
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	421.832.000	400.199.600	94,87	94,87

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	208.619.000	202.985.000	97,30	97,30
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	213.213.000	197.214.600	92,50	92,50
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.140.635.078	5.918.458.820	82,88	82,88
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.271.089.385	3.789.229.960	88,72	88,72
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.672.000	13.120.000	89,42	89,42
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	14.672.000	13.120.000	89,42	89,42
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.166.523.960	2.791.022.867	88,14	88,14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.055.823.960	2.709.952.867	88,68	88,68
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110.700.000	81.070.000	73,23	73,23
Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.047.725	184.335.234	96,99	97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.960.700	118.864.534	99,09	99,09
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.110.525	26.106.500	99,98	99,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.266.500	13.946.000	91,35	91,35
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.400.000	16.732.200	86,25	86,25
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.310.000	8.686.000	93,30	93,30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	861.182.500	768.812.559	89,27	89,27
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.082.500	61.012.559	87,06	87,06
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	791.100.000	707.800.000	89,47	89,47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.663.200	31.939.300	82,61	82,61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.313.200	15.589.300	69,87	69,87
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.350.000	16.350.000	100,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	490.308.850	485.452.240	99,01	99,01
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	490.308.850	485.452.240	99,01	99,01
	200.000.000	199.219.924	99,61	99,61
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	290.308.850	286.232.316	98,60	98,60

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	827.528.519	359.336.113	43,42	43,42
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	74.984.445	69.424.993	92,59	92,59
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</i>	74.984.445	69.424.993	92,59	92,59
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	148.499.325	86.211.120	58,05	58,05
<i>Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i>	69.918.705	8.818.500	12,61	12,61
<i>Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota</i>	78.580.620	77.392.620	98,49	98,49
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	604.044.749	203.700.000	33,72	33,72
<i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>	604.044.749	203.700.000	33,72	33,72
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	247.760.500	195.433.140	78,88	78,88
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	247.760.500	195.433.140	78,88	78,88
<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	32.630.400	28.910.400	88,60	88,60
<i>Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	55.800.000	31.750.000	56,90	56,90
<i>Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah</i>	17.609.600	9.609.600	54,57	54,57
<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan</i>	141.720.500	125.163.140	88,32	88,32
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	351.751.100	321.412.047	91,37	91,38
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	351.751.100	321.412.047	91,37	91,38
<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	311.751.100	281.412.047	90,27	90,27
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	428.858.500	339.783.500	79,23	79,23
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	428.858.500	339.783.500	79,23	79,23
<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	428.858.500	339.783.500	79,23	79,23
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	17.072.545	0	0	0
<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	0	0	0	0
<i>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	17.072.545	0	0	0
<i>Pengembangan Cagar Budaya</i>	17.072.545	0	0,00	0,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	30.001.300	30.001.300	100	100
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	30.001.300	30.001.300	100	100
<i>Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum</i>	30.001.300	30.001.300	100,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	120.503.500	46.450.850	38,55	38,55
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	50.444.200	14.930.000	29,6	29,6
<i>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	50.444.200	14.930.000	29,60	29,60
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	70.059.300	31.520.850	44,99	44,99
<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	30.041.000	25.758.850	85,75	85,75
<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	40.018.300	5.762.000	14,40	14,40
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	295.760.979	293.119.020	99,11	99,11
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	295.760.979	293.119.020	99,11	99,11
<i>Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	265.000.000	265.000.000	100,00	100,00
<i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	30.760.979	28.119.020	91,41	91,41
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	59.999.900	58.240.650	97,07	97,07
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	59.999.900	58.240.650	97,07	97,07
<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	59.999.900	58.240.650	97,07	97,07
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.650.687.250	2.513.768.832	68,86	69,37
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.605.687.350	2.468.808.932	68,47	68,98
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.646.700	40.997.700	79,38	79,38
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	38.230.000	29.733.000	77,77	77,77
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	8.028.000	5.922.000	73,77	73,77
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5.388.700	5.342.700	99,15	99,15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.853.091.300	1.875.239.164	65,73	66,28
	6.722.500	5.509.500	81,96	82,10

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.689.478.500	1.754.324.564	65,23	65,80
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.631.000	113.678.000	74,97	75,25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.259.300	1.727.100	32,84	33,50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.224.650	267.491.400	93,78	93,84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.012.000	40.012.000	100,00	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	8.500.000	77,27	77,80
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.116.150	10.000.000	66,15	66,80
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.063.500	2.063.000	99,98	99,98
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.497.000	4.497.000	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	204.966.000	195.919.400	95,59	95,59
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.570.000	6.500.000	85,87	86,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.421.800	243.627.468	67,41	68,11
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	2.400.000	72,73	73,10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.321.800	11.952.468	32,91	33,20
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.800.000	229.275.000	71,25	72,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.302.900	41.453.200	76,34	76,4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.702.900	37.428.200	76,85	77,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.600.000	4.025.000	71,88	71,20
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	29.999.900	29.959.900	99,87	100
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.999.900	24.959.900	99,84	100
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	4.499.900	4.499.900	100,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	9.005.000	8.965.000	99,56	99,99
Pengembangan Bahan Pustaka	1.995.000	1.995.000	100,00	100,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100	100

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca</i>	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	8.466.000	8.466.000	100	100
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	8.466.000	8.466.000	100	100
<i>Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	8.466.000	8.466.000	100,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	6.534.000	6.534.000	100	100
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	6.534.000	6.534.000	100	100
<i>Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	6.534.000	6.534.000	100,00	100,00
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	8.308.861.677	7.661.691.096	92,21	94,16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.372.888.193	5.877.967.147	92,23	94,09
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.369.700	227.653.845	94,71	100
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	219.669.700	206.953.845	94,21	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	20.700.000	20.700.000	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.099.735.300	4.034.081.396	98,4	100
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.905.335.300	3.839.681.396	98,32	100,00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	194.400.000	194.400.000	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.940.818	573.119.246	83,67	86,02
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	248.850.100	248.581.874	99,89	100,00
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	173.286.065	139.500.372	80,50	85,25
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	41.610.600	41.580.300	99,93	100,00
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	155.994.053	79.006.700	50,65	55,00
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	15.150.000	14.400.000	95,05	100,00
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	50.050.000	50.050.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	972.299.100	893.310.838	91,88	93,27
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	15.000.000	14.994.000	99,96	100,00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	168.899.100	98.316.838	58,21	61,25
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	788.400.000	780.000.000	98,93	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.543.275	149.801.822	39,89	42,67
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	66.323.154	55.770.092	84,09	87,10
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	249.840.121	34.656.432	13,87	17,25
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	59.380.000	59.375.298	99,99	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	52.008.000	51.887.000	99,77	100
<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	20.038.000	19.972.000	99,67	100
<i>Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan</i>	20.038.000	19.972.000	99,67	100,00
<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	31.970.000	31.915.000	99,83	100
<i>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil</i>	31.970.000	31.915.000	99,83	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	554.377.275	539.759.341	97,36	100
<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	51.686.000	47.734.700	92,36	100
<i>Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	51.686.000	47.734.700	92,36	100,00
<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	502.691.275	492.024.641	97,88	100
<i>Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	153.482.045	149.370.170	97,32	100,00
<i>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	291.619.730	287.088.971	98,45	100,00
<i>Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</i>	57.589.500	55.565.500	96,49	100,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	177.557.000	177.449.000	99,94	100
<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</i>	177.557.000	177.449.000	99,94	100
<i>Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</i>	27.432.000	27.360.000	99,74	100,00
<i>Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</i>	150.125.000	150.089.000	99,98	100,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	220.601.990	205.465.793	93,14	95,77

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	190.601.990	175.509.893	92,08	95,1
<i>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	190.601.990	175.509.893	92,08	95,10
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000	29.955.900	99,85	100
<i>Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	30.000.000	29.955.900	99,85	100,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	469.510.795	412.857.437	87,93	90,38
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	257.059.000	208.763.660	81,21	84,05
<i>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	257.059.000	208.763.660	81,21	84,05
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	69.452.600	65.134.527	93,78	97,1
<i>Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>	69.452.600	65.134.527	93,78	97,10
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	77.499.195	73.485.250	94,82	97,2
<i>Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</i>	77.499.195	73.485.250	94,82	97,20
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	65.500.000	65.474.000	99,96	100
<i>Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	65.500.000	65.474.000	99,96	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	461.918.424	396.305.378	85,8	88,35
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	346.551.900	289.417.704	83,51	86,05
<i>Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis</i>	346.551.900	289.417.704	83,51	86,05
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	84.993.324	81.107.674	95,43	98,1
<i>Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan</i>	84.993.324	81.107.674	95,43	98,10
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	30.373.200	25.780.000	84,88	87,25
<i>Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan</i>	30.373.200	25.780.000	84,88	87,25

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BARITO TIMUR,	29.010.857.601	26.110.872.618	90	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.180.807.892	15.369.889.092	89,46	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.686.720	124.802.500	98,51	100
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	98.161.720	97.950.600	99,78	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	28.525.000	26.851.900	94,13	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.079.759.928	12.701.494.535	90,21	100
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	13.692.703.183	12.348.554.202	90,18	100,00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	322.720.000	289.403.333	89,68	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	64.336.745	63.537.000	98,76	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.531.525	406.903.702	92,16	100
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	160.655.000	159.372.502	99,20	100,00
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	25.010.000	19.613.900	78,42	100,00
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	39.994.725	39.641.900	99,12	100,00
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	49.952.000	41.813.000	83,71	100,00
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	39.199.800	38.595.400	98,46	100,00
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	105.195.000	86.895.000	82,60	100,00
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	21.525.000	20.972.000	97,43	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.212.920	71.971.350	99,67	100
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	72.212.920	71.971.350	99,67	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.994.219.000	1.632.025.705	81,84	100
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12.000.000	11.039.750	92,00	100,00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	213.419.000	73.285.955	34,34	100,00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.768.800.000	1.547.700.000	87,50	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.277.999	295.343.100	96,12	100
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	93.990.839	88.170.600	93,81	100,00
<i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	99.994.000	98.103.000	98,11	100,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan</i>	113.293.160	109.069.500	96,27	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Lainnya</i>				
Penataan Organisasi	159.119.800	137.348.200	86,32	100
<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	70.249.800	66.994.200	95,37	100,00
<i>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	88.870.000	70.354.000	79,17	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	30.000.000	29.250.000	97,5	100
<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	30.000.000	29.250.000	97,5	100
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik</i>	30.000.000	29.250.000	97,50	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	478.056.520	455.081.541	95,19	100
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	145.065.080	123.412.301	85,07	100
<i>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</i>	32.730.000	32.730.000	100,00	100,00
<i>Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	52.974.750	36.116.600	68,18	100,00
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	19.959.930	17.517.930	87,77	100,00
<i>Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</i>	22.646.300	20.894.605	92,26	100,00
<i>Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan</i>	16.754.100	16.153.166	96,41	100,00
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	51.075.040	50.143.540	98,18	100
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	20.057.820	19.154.320	95,50	100,00
<i>Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal</i>	31.017.220	30.989.220	99,91	100,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	281.916.400	281.525.700	99,86	100
<i>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun</i>	15.645.800	15.255.100	97,50	100,00
<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	240.000.000	240.000.000	100,00	100,00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</i>	26.270.600	26.270.600	100,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	93.908.850	76.927.470	81,92	100
<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	40.830.150	40.829.370	100	100

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	40.830.150	40.829.370	100,00	100,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	53.078.700	36.098.100	68,01	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	36.816.900	34.851.300	94,66	100,00
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.261.800	1.246.800	7,67	100,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	154.950.000	147.710.400	95,33	100
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	154.950.000	147.710.400	95,33	100
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	54.950.000	53.650.000	97,63	100,00
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	94.060.400	94,06	100,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.217.354.965	913.217.900	75,02	100
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	866.673.480	757.145.910	87,36	100
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	421.207.315	314.012.995	74,55	100,00
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	445.466.165	443.132.915	99,48	100,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	350.681.485	156.071.990	44,51	100
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	81.277.865	50.509.160	62,14	100,00
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	199.524.860	36.610.400	18,35	100,00
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	69.878.760	68.952.430	98,67	100,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.184.706.071	7.501.641.450	91,65	100
Pengembangan Prasarana Pertanian	5.038.686.160	4.812.044.249	95,5	100
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPB, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCPB	1.915.455.145	1.745.999.299	91,15	100,00
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPB	23.284.000	21.531.000	92,47	100,00
Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan	3.099.947.015	3.044.513.950	98,21	100,00
Komoditas Perkebunan				
Pembangunan Prasarana Pertanian	3.146.019.911	2.689.597.201	85,49	100

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</i>	295.926.025	289.217.000	97,73	100,00
<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</i>	2.850.093.886	2.400.380.201	84,22	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	227.467.655	214.393.500	94,25	100
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	227.467.655	214.393.500	94,25	100
<i>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	159.802.000	158.639.600	99,27	100,00
<i>Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	53.027.220	42.525.400	80,20	100,00
<i>Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>	14.638.435	13.228.500	90,37	100,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	65.796.770	51.673.600	78,54	100
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.796.770	51.673.600	78,54	100
<i>Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian</i>	17.583.435	11.706.500	66,58	100,00
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian</i>	48.213.335	39.967.100	82,90	100,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.377.808.878	1.351.087.665	98,06	100
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.377.808.878	1.351.087.665	98,06	100
<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</i>	349.339.383	344.687.330	98,67	100,00
<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</i>	333.269.495	312.200.335	93,68	100,00
<i>Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	695.200.000	694.200.000	99,86	100,00
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.960.157.130	6.582.884.341	82,7	99,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.160.430.503	4.956.271.009	80,45	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.900.000	41.815.000	99,8	100
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	41.900.000	41.815.000	99,80	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.849.096.883	3.795.753.310	78,28	100
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.652.176.883	3.598.833.310	77,36	100,00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	196.920.000	196.920.000	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.117.740	249.194.690	98,84	100
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	141.405.400	140.029.500	99,03	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.361.500	7.347.630	99,81	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.216.540	32.830.660	98,84	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.642.000	4.596.000	99,01	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.332.300	26.230.900	95,97	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	14.400.000	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.760.000	23.760.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	923.956.000	786.233.709	85,09	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.156.000	44.333.709	69,10	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	859.800.000	741.900.000	86,29	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.359.880	83.274.300	89,2	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.844.880	40.059.600	80,37	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.940.000	17.940.000	100,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.575.000	25.274.700	98,83	100,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	60.000.000	58.225.000	97,04	100
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	60.000.000	58.225.000	97,04	100
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	29.457.000	98,19	100,00
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	28.768.000	95,89	100,00
Kewenangan Kabupaten/Kota				
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	30.000.000	29.609.500	98,7	100
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.609.500	98,7	100
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	29.609.500	98,70	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	404.200.000	371.225.000	91,84	100
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	404.200.000	371.225.000	91,84	100
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.200.000	371.225.000	91,84	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	44.999.820	44.341.820	98,54	100
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.999.820	44.341.820	98,54	100
<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	44.999.820	44.341.820	98,54	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	115.420.100	115.068.200	99,7	100
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	115.420.100	115.068.200	99,7	100
<i>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	25.000.000	24.970.000	99,88	100,00
<i>Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro</i>	25.000.000	24.926.000	99,70	100,00
<i>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</i>	25.000.000	24.944.000	99,78	100,00
<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	25.000.000	24.921.000	99,68	100,00
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	15.420.100	15.307.200	99,27	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	329.579.900	281.103.400	85,29	99,5
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	329.579.900	281.103.400	85,29	99,5
Menjadi Usaha Kecil				
<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	329.579.900	281.103.400	85,29	99,50
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	17.000.000	16.862.000	99,19	100
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	17.000.000	16.862.000	99,19	100
<i>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B) maupun Produsen B (P-B)</i>	17.000.000	16.862.000	99,19	100,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	125.769.000	120.768.890	96,02	100
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	80.000.000	75.003.890	93,75	100
<i>Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	80.000.000	75.003.890	93,75	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	45.769.000	45.765.000	99,99	100
<i>Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	22.748.000	22.744.000	99,98	100,00
<i>Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	23.021.000	23.021.000	100,00	100,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	63.981.000	51.265.400	80,13	100
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	46.031.000	33.315.400	72,38	100
<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>	21.801.000	21.530.400	98,76	100,00
<i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam (satu) Kabupaten/Kota</i>	24.230.000	11.785.000	48,64	100,00
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.950.000	17.950.000	100	100
<i>Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>	17.950.000	17.950.000	100,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	165.527.000	118.092.000	71,34	100
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (satu) Daerah Kabupaten/Kota	165.527.000	118.092.000	71,34	100
<i>Pameran Dagang Lokal</i>	165.527.000	118.092.000	71,34	100,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	63.250.000	59.900.000	94,7	100
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	63.250.000	59.900.000	94,7	100
<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang</i>	63.250.000	59.900.000	94,70	100,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	379.999.807	360.152.122	94,78	100
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	379.999.807	360.152.122	94,78	100
<i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	379.999.807	360.152.122	94,78	100,00
SEKRETARIAT DAERAH	56.783.005.899	38.431.503.070	67,68	67,79
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.178.172.194	22.324.737.693	65,32	65,47
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	607.771.005	437.362.850	71,96	72,38
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	285.891.255	247.434.140	86,55	87,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	222.186.960	141.124.435	63,52	64,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	49.731.425	36.104.655	72,60	73,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.961.365	12.699.620	25,42	25,43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.783.113.050	9.370.898.015	63,39	63,43
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.610.411.915	8.327.484.365	61,18	61,20
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.011.510.000	906.472.000	89,62	90,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	161.191.135	136.941.650	84,96	85,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	938.958.005	711.581.920	75,78	75,97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.520.000	92.285.015	88,29	88,30
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359.611.905	355.115.700	98,75	99,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	345.000.000	188.939.010	54,76	55,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	129.826.100	75.242.195	57,96	58,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.179.225.000	5.019.551.831	81,23	81,73
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.695.000	19.832.500	74,29	75,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.493.330.000	1.901.296.331	76,26	77,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.659.200.000	3.098.423.000	84,67	85,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.849.709.368	1.350.785.816	47,4	47,6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.687.204.768	922.692.115	54,69	55,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.162.504.600	428.093.701	36,83	36,85
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	570.797.289	356.072.056	62,38	62,4
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	570.797.289	356.072.056	62,38	62,40
Fasilitasi Keruماhtanggaan Sekretariat Daerah	2.573.829.862	1.383.537.400	53,75	53,82
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.387.879.862	1.249.765.600	52,34	52,40
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	185.950.000	133.771.800	71,94	72,00
Penataan Organisasi	360.016.540	226.201.188	62,83	62,9
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	144.967.460	107.994.944	74,50	74,55
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	104.590.480	47.507.200	45,42	45,50
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	110.458.600	70.699.044	64,01	64,10

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.314.752.075	3.468.746.617	65,27	65,3
<i>Fasilitasi Keprotokolan</i>	5.314.752.075	3.468.746.617	65,27	65,30
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.670.034.110	14.804.545.922	71,62	71,69
Administrasi Tata Pemerintahan	2.325.873.500	1.285.160.668	55,25	55,31
<i>Penataan Administrasi Pemerintahan</i>	187.310.200	100.052.300	53,42	53,50
<i>Pengelolaan Administrasi Kewilayah</i>	87.679.600	56.093.580	63,98	64,00
<i>Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	2.050.883.700	1.129.014.788	55,05	55,10
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	16.846.488.660	12.876.395.003	76,43	76,5
<i>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>	373.583.640	281.343.168	75,31	75,38
<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</i>	8.592.712.060	6.043.508.575	70,33	70,40
<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat</i>	7.880.192.960	6.551.543.260	83,14	83,20
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.273.548.850	522.445.151	41,02	41,08
<i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</i>	129.450.250	122.411.250	94,56	94,60
<i>Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	1.052.898.000	338.482.301	32,15	32,20
<i>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</i>	91.200.600	61.551.600	67,49	67,65
Fasilitasi Kerjasama Daerah	224.123.100	120.545.100	53,79	53,81
<i>Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>	169.672.800	101.963.700	60,09	60,10
<i>Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i>	54.450.300	18.581.400	34,13	34,20
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.934.799.595	1.302.219.455	67,31	67,35
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	305.831.100	242.598.536	79,32	79,4
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>	305.831.100	242.598.536	79,32	79,40
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	393.458.750	333.999.050	84,89	84,93
<i>Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan</i>	101.563.900	73.673.400	72,54	72,60
<i>Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>	132.180.980	123.975.395	93,79	93,85
<i>Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>	159.713.870	136.350.255	85,37	85,40
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	749.130.045	614.604.569	82,04	82,09
<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	198.435.445	133.957.284	67,51	67,60
<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik</i>	469.074.600	441.718.066	94,17	94,20
<i>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang</i>	81.620.000	38.929.219	47,70	47,75

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
dan Jasa				
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	486.379.700	111.017.300	22,83	22,85
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	428.786.500	79.223.000	18,48	18,50
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	57.593.200	31.794.300	55,20	55,25
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	33.938.289.125	30.984.164.990	91,3	91,86
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.421.302.515	19.379.126.108	90,47	91,06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.340.050	77.837.965	98,11	98,59
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	41.940.050	41.404.600	98,72	98,90
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	37.400.000	36.433.365	97,42	98,25
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.945.816.486	2.729.457.827	92,66	93,01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.350.148.016	2.227.406.723	94,78	95,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	388.200.000	299.120.000	77,05	78,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	96.778.720	94.352.179	97,49	99,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.798.700	23.490.000	98,70	99,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.124.760	19.683.600	97,81	98,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	66.766.290	65.405.325	97,96	98,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.917.952.265	2.316.242.180	79,38	80,77
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	101.860.065	86.780.500	85,20	86,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.628.000	10.753.000	85,15	85,50
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.487.428.600	1.965.602.274	79,02	80,25
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	316.035.600	253.106.406	80,09	83,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.298.149.810	2.277.601.869	99,11	99,34
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.083.000	315.037.709	95,15	96,15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	246.351.700	245.351.700	99,59	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.999.410	79.999.410	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.985.000	60.335.000	98,93	99,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.321.700	71.211.300	98,46	99,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	142.059.000	142.031.750	99,98	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	370.380.000	370.000.000	99,90	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	994.970.000	993.635.000	99,87	99,90
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.847.220	80.338.000	98,16	99
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	81.847.220	80.338.000	98,16	99,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.091.396.000	1.541.159.431	73,69	74,29
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	804.996.000	365.289.493	45,38	46,00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.286.400.000	1.175.869.938	91,41	92,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	947.171.368	876.209.678	92,51	93,06
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	417.141.768	394.905.169	94,67	95,00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	427.629.600	378.904.509	88,61	89,50
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	102.400.000	102.400.000	100,00	100,00
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	8.916.229.516	8.395.824.064	94,16	94,63
<i>Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</i>	8.501.041.516	8.060.674.384	94,82	95,25
<i>Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</i>	415.188.000	335.149.680	80,72	82,00
Layanan Administrasi DPRD	1.143.399.800	1.084.455.094	94,84	95,76
<i>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	38.399.800	22.665.600	59,03	60,00
<i>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD</i>	1.105.000.000	1.061.789.494	96,09	97,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.516.986.610	11.605.038.882	92,71	93,21
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	686.462.700	420.121.625	61,2	62,55
<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	24.473.850	14.424.955	58,94	60,00
<i>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	18.831.000	2.589.000	13,75	15,00
<i>Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan</i>	318.977.505	146.662.760	45,98	47,00
<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>	311.297.825	243.617.875	78,26	80,00
<i>Penyusunan Tata Tertib DPRD</i>	12.882.520	12.827.035	99,57	100,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran	124.819.415	90.545.115	72,54	73,93
<i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	30.816.915	25.661.315	83,27	84,50
<i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	18.388.850	16.664.050	90,62	92,00
<i>Pembahasan APBD</i>	30.685.300	24.000.700	78,22	80,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Pembahasan APBD Perubahan	14.097.400	10.739.000	76,18	77,25
Pembahasan Laporan Semester	14.138.450	3.416.050	24,16	25,00
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	16.692.500	10.064.000	60,29	62,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	135.540.185	117.349.752	86,58	87,42
<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	33.021.540	29.031.040	87,92	88,50
<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	21.448.645	20.304.745	94,67	95,00
<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	12.294.715	10.514.547	85,52	87,00
<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	29.036.345	23.818.545	82,03	83,05
<i>Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>	16.577.340	14.582.575	87,97	88,50
<i>Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>	11.580.900	10.252.900	88,53	89,50
<i>Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>	11.580.700	8.845.400	76,38	78,05
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.456.829.560	2.231.406.801	90,82	91,51
<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	1.308.471.200	1.135.057.689	86,75	87,50
<i>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	578.315.485	539.941.457	93,36	94,20
<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	264.000.000	261.000.000	98,86	99,50
<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	234.000.000	234.000.000	100,00	100,00
<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	22.545.675	13.735.715	60,92	62,00
<i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	49.497.200	47.671.940	96,31	97,00
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.255.890.740	1.922.114.245	85,2	85,95
<i>Kunjungan Kerja dalam Daerah</i>	309.929.000	175.781.700	56,72	58,25
<i>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	25.761.640	20.126.945	78,13	80,00
<i>Pelaksanaan Reses</i>	1.920.200.100	1.726.205.600	89,90	90,50
Fasilitasi Tugas DPRD	6.857.444.010	6.823.501.344	99,51	99,74
<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	5.542.742.800	5.539.516.086	99,94	100,00
<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	36.179.210	33.511.535	92,63	93,50
<i>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>	1.278.522.000	1.250.473.723	97,81	98,81
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH	6.052.709.116	5.751.330.668	95,02	96,49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.211.825.461	4.079.315.494	96,85	98,09
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	43.337.780	43.325.030	99,97	100

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.046.300	32.044.300	99,99	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.291.480	11.280.730	99,90	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.236.922.280	3.131.054.568	96,73	98,11
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.058.212.280	2.952.344.568	96,54	98,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.720.000	156.720.000	100,00	100,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	21.990.000	21.990.000	100,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.782.300	7.602.300	97,69	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.782.300	7.602.300	97,69	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.923.785	234.309.100	98,9	99,49
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.318.000	91.318.000	100,00	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.000.000	27.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.861.385	30.566.700	95,94	98,45
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.560.000	2.560.000	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.199.400	22.199.400	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	13.680.000	91,20	95,25
Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.985.000	46.985.000	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.793.500	77.806.800	97,51	99,25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.793.500	77.806.800	97,51	99,25
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.290.000	441.235.630	95,65	96,43
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.490.000	2.490.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.300.000	62.245.630	75,63	80,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	376.500.000	376.500.000	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.775.816	143.982.066	98,77	99,25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.856.466	25.102.966	97,09	99,25
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.628.250	6.588.000	86,36	88,25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.291.100	112.291.100	100,00	100,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.050.888.490	940.062.309	89,45	92,11

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	595.729.680	518.066.865	86,96	88,69
<i>Pelaksanaan Konsultasi Publik</i>	35.773.200	34.823.200	97,34	98,25
<i>Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD</i>	47.532.800	45.326.600	95,36	97,25
<i>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	112.624.180	106.342.812	94,42	96,20
<i>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	399.799.500	331.574.253	82,94	84,70
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	249.911.800	228.351.249	91,37	95,97
<i>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	9.620.000	7.087.000	73,67	75,25
<i>Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD</i>	202.587.000	191.076.949	94,32	96,20
<i>Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	37.704.800	30.187.300	80,06	100,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	205.247.010	193.644.195	94,35	97,32
<i>Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</i>	127.446.965	118.912.150	93,30	96,75
<i>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	77.800.045	74.732.045	96,06	98,25
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	632.486.865	581.811.065	91,99	92,88
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	264.613.465	222.414.765	84,05	85,57
<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	51.649.900	50.683.800	98,13	99,00
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	90.518.500	76.135.700	84,11	86,25
<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	41.471.900	28.257.000	68,14	70,20
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	80.973.165	67.338.265	83,16	84,10
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85.568.300	78.203.100	91,39	91,99
<i>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>	38.376.000	31.086.600	81,01	82,15
<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</i>	47.192.300	47.116.500	99,84	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	282.305.100	281.193.200	99,61	100
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	75.725.100	75.724.000	100,00	100,00
<i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	32.500.000	32.430.000	99,78	100,00
<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</i>	32.500.000	32.337.200	99,50	100,00
<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	109.080.000	108.202.000	99,20	99,99
<i>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</i>	32.500.000	32.500.000	100,00	100,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	157.508.300	150.141.800	95,32	97,36
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	81.257.900	78.755.100	96,92	97,99
<i>Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</i>	81.257.900	78.755.100	96,92	97,99
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	76.250.400	71.386.700	93,62	96,7
<i>Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	44.752.900	44.272.700	98,93	100,00
<i>Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>	31.497.500	27.114.000	86,08	92,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.840.226.112	3.709.627.019	96,6	96,59
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.301.997.615	3.176.332.984	96,19	96,18
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.725.000	25.536.000	99,27	99,27
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	25.725.000	25.536.000	99,27	99,27
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.105.248.096	2.022.341.593	96,06	96,06
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.905.259.496	1.824.452.993	95,76	95,76
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	188.170.000	188.170.000	100,00	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	11.818.600	9.718.600	82,23	82,23
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.363.485	50.363.200	100	100
<i>Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah</i>	39.992.000	39.992.000	100,00	100,00
<i>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	10.371.485	10.371.200	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.662.490	517.864.653	99,65	99,59

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.003.700	134.946.538	99,96	99,69
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	291.131.990	290.401.440	99,75	99,75
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.351.500	11.347.000	99,96	99,96
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.300.300	51.294.675	98,08	98,08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.875.000	11.875.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.425.000	521.695.338	92,76	92,75
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	2.700.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	49.395.338	54,88	54,88
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.725.000	469.600.000	99,97	99,97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.573.544	38.532.200	99,89	99,76
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.020.694	19.987.200	99,83	99,83
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.552.850	18.545.000	99,96	99,69
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	56.202.600	56.202.600	100	100
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	56.202.600	56.202.600	100	100
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	56.202.600	56.202.600	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	482.025.897	477.091.435	98,98	98,97
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	482.025.897	477.091.435	98,98	98,97
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	63.081.400	60.882.576	96,51	96,51
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	18.792.000	18.734.154	99,69	99,69
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	61.210.030	60.511.130	98,86	98,86
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.793.500	24.690.000	99,58	99,58
Penetapan Wajib Pajak Daerah	251.130.667	249.558.275	99,37	99,37
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12.256.600	12.256.600	100,00	100,00
Penagihan Pajak Daerah	50.761.700	50.458.700	99,40	99,40
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	266.714.335.170	116.957.563.420	43,85	43,85
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.081.437.898	24.227.759.118	65,34	65,33

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	64.970.840	99,96	99,96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000	64.970.840	99,96	99,96
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.100.365.335	19.741.402.424	61,5	61,5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.040.270.335	18.938.371.424	61,01	61,01
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.017.480.000	760.890.000	74,78	74,78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42.615.000	42.141.000	98,89	98,89
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.686.000	38.599.620	99,78	99,78
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	38.686.000	38.599.620	99,78	99,78
Administrasi Umum Perangkat Daerah	861.433.580	830.440.038	96,4	96,4
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.327.600	432.886.231	96,13	96,13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.007.000	19.692.383	98,43	98,43
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.086.480	111.364.601	99,36	99,36
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.997.000	38.743.500	99,35	99,35
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.850.500	29.775.870	99,75	99,75
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.750.000	37.290.000	89,32	89,32
Fasilitasi Kunjungan Tamu	168.415.000	160.687.453	95,41	95,41
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.810.749.525	2.580.815.475	91,82	91,82
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.662.500.000	2.435.375.400	91,47	91,47
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.249.525	145.440.075	98,10	98,10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	856.690.000	687.369.144	80,24	80,23
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	116.455.000	107.525.800	92,33	92,33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.635.000	173.643.344	70,12	70,12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.600.000	406.200.000	82,46	82,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.513.458	284.161.577	81,54	81,53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.179.798	67.341.898	77,24	77,24
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.452.700	117.905.280	83,35	83,35

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119.880.960	98.914.399	82,51	82,51
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	228.449.495.372	91.724.908.802	40,15	40,15
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.805.964.400	1.376.638.136	76,23	76,23
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	206.969.000	102.713.500	49,63	49,63
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	149.046.000	76.988.000	51,65	51,65
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	129.926.000	122.754.000	94,48	94,48
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	56.536.000	40.521.900	71,67	71,67
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	51.176.000	39.080.000	76,36	76,36
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	571.524.900	480.759.936	84,12	84,12
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	590.816.900	505.738.900	85,60	85,60
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	40.924.000	5.510.800	13,47	13,47
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	9.045.600	2.571.100	28,42	28,42
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	815.503.000	790.549.200	96,94	96,94
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	35.770.000	28.979.000	81,01	81,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	214.513.600	207.511.200	96,74	96,74
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	285.212.100	277.029.500	97,13	97,13
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait	280.007.300	277.029.500	98,94	98,94
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	671.832.899	599.098.856	89,17	89,18
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	54.999.900	38.752.000	70,46	70,46
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	412.279.750	362.096.956	87,83	87,83
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	147.553.249	141.249.900	95,73	95,73

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Kabupaten/Kota</i>				
<i>Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	57.000.000	57.000.000	100,00	100,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	225.105.287.973	88.908.371.210	39,5	39,5
<i>Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi</i>	600.000.000	600.000.000	100,00	100,00
<i>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	163.067.361.498	73.551.575.977	45,11	45,11
<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	61.437.926.475	14.756.795.233	24,02	24,02
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	50.907.100	50.251.400	98,71	98,71
<i>Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah</i>	50.907.100	50.251.400	98,71	98,71
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.183.401.900	1.004.895.500	84,92	84,91
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.183.401.900	1.004.895.500	84,92	84,91
	713.446.000	713.327.400	99,98	99,98
<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	8.378.300	8.325.000	99,36	99,36
<i>Inventarisasi Barang Milik Daerah</i>	44.699.800	44.663.800	99,92	99,92
<i>Penilaian Barang Milik Daerah</i>	310.559.800	137.546.800	44,29	44,29
<i>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	75.000.000	69.747.500	93,00	93,00
<i>Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	20.198.000	20.190.000	99,96	99,96
<i>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	11.120.000	11.095.000	99,78	99,78
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.603.746.363	6.924.453.238	91,07	91,06
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.361.232.203	2.974.201.862	88,49	88,48
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	29.135.100	29.059.100	99,74	99,74
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	20.346.100	20.320.100	99,87	99,87
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	8.789.000	8.739.000	99,43	99,43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.468.579.880	2.129.510.402	86,26	86,26
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.330.699.880	2.003.750.402	85,97	85,97
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	137.880.000	125.760.000	91,21	91,21

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.530.700	43.782.359	96,16	96,16
<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	25.557.200	24.393.059	95,44	95,44
<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	19.973.500	19.389.300	97,08	97,08
Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.109.485	213.950.699	98,09	98,1
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	145.552.800	144.774.135	99,47	99,47
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	15.408.585	14.728.464	95,59	95,59
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	6.619.000	6.619.000	100,00	100,00
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	12.429.100	12.429.100	100,00	100,00
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	15.000.000	12.300.000	82,00	82,00
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	23.100.000	23.100.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.231.800	497.548.952	96,38	96,38
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.345.000	4.210.000	96,89	96,89
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	68.286.800	62.938.952	92,17	92,17
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	443.600.000	430.400.000	97,02	97,02
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.645.238	60.350.350	72,15	72,15
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	52.649.788	29.554.900	56,13	56,13
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	19.750.200	19.550.200	98,99	98,99
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	11.245.250	11.245.250	100,00	100,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.242.514.160	3.950.251.376	93,11	93,11
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	355.307.560	127.530.333	35,89	35,89
	39.614.800	37.764.800	95,33	95,33
<i>Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>	27.000.000	23.787.865	88,10	88,10
<i>Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>	267.094.860	45.980.368	17,21	17,21
<i>Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>	18.849.500	18.113.900	96,10	96,10
<i>Fasilitasi Lembaga Profesi ASN</i>	2.748.400	1.883.400	68,53	68,53
Mutasi dan Promosi ASN	133.242.200	120.400.000	90,36	90,36
<i>Pengelolaan Mutasi ASN</i>	12.539.800	12.446.100	99,25	99,25
<i>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	29.352.900	28.390.300	96,72	96,72

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pengelolaan Promosi ASN</i>	91.349.500	79.563.600	87,10	87,10
Pengembangan Kompetensi ASN	3.690.147.100	3.648.746.144	98,88	98,88
<i>Pengelolaan Assessment Center</i>	395.917.000	364.873.294	92,16	92,16
<i>Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN</i>	2.480.032.900	2.473.661.850	99,74	99,74
<i>Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat</i>	805.862.100	803.273.500	99,68	99,68
<i>Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</i>	8.335.100	6.937.500	83,23	83,23
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	63.817.300	53.574.899	83,95	83,95
<i>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	33.394.000	27.853.159	83,41	83,41
<i>Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai</i>	24.115.800	21.577.740	89,48	89,47
<i>Pembinaan Disiplin ASN</i>	1.908.300	870.300	45,61	45,61
<i>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>	4.399.200	3.273.700	74,42	74,42
INSPEKTORAT	6.130.461.549	5.931.987.136	96,76	99,86
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.857.406.009	4.680.883.165	96,37	100
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	87.460.900	76.135.500	87,05	100
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	17.387.000	14.900.000	85,70	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	32.002.000	26.186.000	81,83	100,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	21.554.700	19.027.500	88,28	100,00
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	16.517.200	16.022.000	97,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.916.722.289	3.774.592.688	96,37	100
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.667.153.289	3.537.352.663	96,46	100,00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	84.352.000	77.070.025	91,37	100,00
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	158.160.000	158.160.000	100,00	100,00
<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	7.057.000	2.010.000	28,48	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.470.000	65.399.100	96,93	100
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	48.240.000	46.169.100	95,71	100,00
<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	19.230.000	19.230.000	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.657.415	290.079.156	99,8	100
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	129.787.000	129.364.156	99,67	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.690.900	17.685.000	99,97	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.974.015	24.974.000	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.535.000	2.520.000	99,41	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.860.000	3.860.000	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.499.500	27.490.000	99,97	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.950.000	19.825.000	99,37	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	64.361.000	64.361.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.381.000	245.149.368	97,52	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.250.000	8.150.000	98,79	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.840.000	44.942.868	88,40	100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.291.000	7.256.500	99,53	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.000.000	184.800.000	99,89	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.014.405	143.837.353	91,03	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.317.215	93.154.083	86,80	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.695.270	33.689.270	99,98	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.001.920	16.994.000	99,95	100,00
Penataan Organisasi	85.700.000	85.690.000	99,99	100
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	70.450.000	70.450.000	100,00	100,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	15.250.000	15.240.000	99,93	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.046.188.140	1.024.345.671	97,91	99,16
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	793.096.140	786.291.271	99,14	100
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70.828.000	70.823.000	99,99	100,00
Reviu Laporan Kinerja	247.158.000	244.456.300	98,91	100,00
Reviu Laporan Keuangan	42.300.000	42.000.000	99,29	100,00
Pengawasan Desa	155.858.000	155.828.000	99,98	100,00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	276.952.140	273.183.971	98,64	100,00
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	253.092.000	238.054.400	94,06	96,51
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	44.112.000	29.993.400	67,99	80,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	208.980.000	208.061.000	99,56	100,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	226.867.400	226.758.300	99,95	100
<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	226.867.400	226.758.300	99,95	100
<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</i>	226.867.400	226.758.300	99,95	100,00
<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	0	0	0	0
KECAMATAN DUSUN TENGAH	4.328.464.124	3.986.235.110	92,09	92,1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.651.613.369	3.322.170.910	90,98	90,98
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.913.628.509	2.630.837.022	90,29	90,3
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.807.068.509	2.524.277.022	89,93	89,93
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	106.560.000	106.560.000	100,00	100,00
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	210.944.710	174.300.940	82,63	82,63
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	152.365.400	115.882.000	76,06	76,06
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	2.000.000	1.992.500	99,63	99,63
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	14.996.410	14.874.460	99,19	99,19
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	9.072.900	9.071.980	99,99	99,99
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	5.400.000	5.400.000	100,00	100,00
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	27.110.000	27.080.000	99,89	99,89
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	479.753.600	470.098.548	97,99	97,99
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	51.353.600	41.698.548	81,20	81,20
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	428.400.000	428.400.000	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.286.550	46.934.400	99,26	99,25
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	28.707.300	28.441.150	99,07	99,07
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	1.020.000	934.000	91,57	91,57
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	4.830.000	4.830.000	100,00	100,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	7.998.650	7.998.650	100,00	100,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	4.730.600	4.730.600	100,00	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.730.000	19.600.000	99,34	99,34
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.730.000	12.600.000	98,98	98,98
<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	12.730.000	12.600.000	98,98	98,98
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.000.000	7.000.000	100	100
<i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	7.000.000	7.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	621.000.000	608.400.000	97,97	97,97
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	330.300.000	317.700.000	96,19	96,19
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	330.300.000	317.700.000	96,19	96,19
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	290.700.000	290.700.000	100	100
<i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	290.700.000	290.700.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	36.120.755	36.064.200	99,84	99,85
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.120.755	36.064.200	99,84	99,85
<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	32.520.755	32.464.200	99,83	99,83
<i>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00
KECAMATAN PEMATANG KARAU	4.822.840.261	1.476.997.311	30,63	30,62
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.777.721.196	1.436.133.911	30,06	30,06
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.155.228.550	1.124.329.062	27,06	27,06
	2.046.414.275	552.369.531	26,99	26,99
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.046.414.275	552.369.531	26,99	26,99
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	62.400.000	19.590.000	31,39	31,39
Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.733.080	124.818.250	58,13	58,13
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	166.774.000	93.003.800	55,77	55,77
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	2.955.000	820,000	27,75	27,75
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	26.818.880	20.589.250	76,77	76,77

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.385.200	9.505.200	58,01	58,01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	900.000	50,00	50,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.654.800	89.077.414	29,93	29,92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.254.800	6.277.414	47,36	47,36
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.400.000	82.800.000	29,11	29,11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	110.104.766	97.909.185	88,92	88,92
Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.549.766	21.073.166	71,31	71,31
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.820.000	9.156.019	71,42	71,42
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.735.000	67.680.000	99,92	99,92
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.119.065	40.863.400	90,57	90,57
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.119.065	40.863.400	90,57	90,57
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	45.119.065	40.863.400	90,57	90,57
KECAMATAN AWANG	2.648.286.414	2.261.902.861	85,41	85,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.620.293.214	2.238.707.861	85,44	85,59
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	1.800.000	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.201.954.176	1.868.927.093	84,88	84,88
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.130.074.176	1.797.047.093	84,37	84,37
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.880.000	71.880.000	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.865.875	96.602.700	77,99	77,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.832.400	59.266.700	74,24	74,24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.485.200	2.100.000	84,50	84,50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.376.275	10.000.000	96,37	96,37
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.896.000	2.636.000	91,02	91,02
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000	3.000.000	85,71	85,71
Penyediaan Bahan/Material	4.976.000	4.000.000	80,39	80,39

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	19.800.000	15.600.000	78,79	78,79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.577.330	133.536.068	99,97	100
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	14.841.780	14.800.518	99,72	100,00
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	118.735.550	118.735.550	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.330.000	134.392.000	91,22	91,22
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.120.000	3.500.000	84,95	84,95
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	16.010.000	3.692.000	23,06	23,06
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	127.200.000	127.200.000	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.765.833	3.450.000	29,32	61,58
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	5.925.833	2.130.000	35,94	100,00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	5.840.000	1.320.000	22,60	22,60
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.998.200	15.200.000	76,01	76,01
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19.998.200	15.200.000	76,01	76,01
<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	19.998.200	15.200.000	76,01	76,01
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.995.000	7.995.000	100	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.995.000	7.995.000	100	100
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	7.995.000	7.995.000	100,00	100,00
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI	2.249.330.315	1.924.701.605	85,57	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.197.819.315	1.887.904.605	85,9	100
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.775.169.732	1.484.096.145	83,6	100
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.704.442.932	1.414.169.345	82,97	100,00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	70.726.800	69.926.800	98,87	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.752.885	112.542.885	93,98	100
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	72.222.000	65.012.000	90,02	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.030.965	17.030.965	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.431.920	11.431.920	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.568.000	15.568.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.098.798	272.236.475	97,19	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.198.798	10.336.475	56,80	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.400.000	260.400.000	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.797.900	19.029.100	83,47	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.016.800	9.723.400	88,26	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000	1.054.600	29,88	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.987.200	4.987.200	100,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.263.900	3.263.900	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.000.000	7.000.000	100	100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.000.000	7.000.000	100	100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.000.000	7.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.011.000	13.297.000	47,47	100
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	28.011.000	13.297.000	47,47	100
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	28.011.000	13.297.000	47,47	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.500.000	2.500.000	100	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.500.000	2.500.000	100	100
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.000.000	12.000.000	100	100

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.000.000	12.000.000	100	100
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000	2.000.000	100	100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	100	100
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
KECAMATAN DUSUN TIMUR	3.747.998.325	1.395.936.347	37,24	37,24
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.246.301.725	1.077.718.147	33,2	33,2
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.679.942.114	790.352.820	29,49	29,49
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.587.182.114	767.162.820	29,65	29,65
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.760.000	23.190.000	25,00	25,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.600.000	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.481.446	79.567.011	68,31	68,31
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	975.000	0	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.688.306	37.662.251	99,93	99,93
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.422.140	16.623.960	41,13	41,13
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.736.000	16.816.000	65,34	65,34
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.660.000	8.464.800	72,60	72,60
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.389.000	194.022.066	46,37	46,37
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	170.785.000	117.335.800	68,70	68,70
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.404.000	31.386.266	57,69	57,69
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.200.000	45.300.000	23,45	23,45
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.889.165	13.776.250	49,4	49,4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.749.165	7.438.750	39,68	39,68
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.140.000	6.337.500	69,34	69,34

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.069.600	49.987.200	61,66	61,66
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	81.069.600	49.987.200	61,66	61,66
<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	81.069.600	49.987.200	61,66	61,66
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	195.095.000	180.000.000	92,26	92,26
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	195.095.000	180.000.000	92,26	92,26
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	195.095.000	180.000.000	92,26	92,26
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.000.000	4.000.000	100	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.000.000	4.000.000	100	100
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.000.000	2.000.000	100	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.000.000	2.000.000	100	100
<i>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	219.532.000	82.231.000	37,46	37,46
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	219.532.000	82.231.000	37,46	37,46
<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	219.532.000	82.231.000	37,46	37,46
KECAMATAN BENUA LIMA	1.646.536.207	1.433.099.233	87,04	89,74
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.646.536.207	1.433.099.233	87,04	89,74
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.168.240	24.171.400	92,37	95
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	26.168.240	24.171.400	92,37	95,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.620.367.967	1.408.927.833	86,95	89,66
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.508.887.967	1.334.607.833	88,45	90,00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	111.480.000	74.320.000	66,67	85,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	0	0
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0	0	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	0	0
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0	0
KECAMATAN PAKU	2.514.794.280	2.231.335.221	88,73	88,73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.457.342.545	2.174.183.686	88,48	88,48
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.249.000	9.939.000	96,98	96,98
	0	0	0,00	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.454.000	5.300.000	97,18	97,18
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.795.000	4.639.000	96,75	96,75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.966.857.660	1.688.593.540	85,85	85,85
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.900.357.660	1.622.093.540	85,36	85,36
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.500.000	66.500.000	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.567.600	161.603.661	99,41	99,41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.142.700	92.029.861	99,88	99,88
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.525.000	3.525.000	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.008.000	15.008.000	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.759.500	23.758.600	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.137.400	6.137.200	100,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.995.000	21.145.000	96,14	96,14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.930.000	181.563.485	98,71	98,71
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.330.000	9.963.485	80,81	80,81
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.600.000	171.600.000	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.738.285	132.484.000	99,06	99,07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	12.923.400	11.874.500	91,88	91,88

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>				
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	2.920.000	2.920.000	100,00	100,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	117.894.885	117.689.500	99,83	99,83
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.081.560	32.081.560	100	100
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	32.081.560	32.081.560	100	100
<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	32.081.560	32.081.560	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	25.370.175	25.069.975	98,82	98,82
DESA				
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	25.370.175	25.069.975	98,82	98,82
<i>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	25.370.175	25.069.975	98,82	98,82
KECAMATAN PAJU EPAT	1.939.068.030	1.764.673.647	91,01	91,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.900.058.030	1.726.357.047	90,86	91,8
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.388.305.443	1.251.824.442	90,17	91
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.388.305.443	1.251.824.442	90,17	91,00
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	0	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.842.105	271.680.605	94,71	95,53
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	186.302.000	184.936.700	99,27	100,00
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	47.411.105	47.411.105	100,00	100,00
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	31.296.200	17.500.000	55,92	59,00
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	18.832.800	18.832.800	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.180.000	12.180.000	100	100
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	12.180.000	12.180.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.156.200	163.693.000	88,41	90,24
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	5.355.000	5.355.000	100,00	100,00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	14.201.200	7.138.000	50,26	52,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.600.000	151.200.000	91,30	93,20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.574.282	26.979.000	97,84	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.574.282	26.979.000	97,84	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.010.000	38.316.600	98,22	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	39.010.000	38.316.600	98,22	100
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.010.000	38.316.600	98,22	100,00
KECAMATAN RAREN BATUAH	2.133.058.063	1.923.506.543	90,18	90,17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.095.673.063	1.890.636.543	90,22	90,22
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.654.388.730	1.502.207.373	90,8	90,8
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.600.508.730	1.448.327.373	90,49	90,49
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.880.000	53.880.000	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.808.900	178.307.670	99,72	99,72
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.118.000	131.784.000	99,75	99,75
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.132.100	4.118.000	99,66	99,66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.611.000	16.603.705	99,96	99,96
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.551.500	2.406.000	94,30	94,30
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.081.300	4.080.965	99,99	99,99
Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.315.000	19.315.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.178.000	198.831.500	79,16	79,16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.778.000	14.631.500	61,53	61,53
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.400.000	181.200.000	80,75	80,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.297.433	11.290.000	99,93	99,93
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.787.433	5.780.000	99,87	99,87
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.750.000	2.750.000	100,00	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	2.760.000	2.760.000	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.385.000	32.870.000	87,92	87,92
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	37.385.000	32.870.000	87,92	87,92
<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	37.385.000	32.870.000	87,92	87,92
KECAMATAN KARUSEN JANANG	2.281.422.642	1.813.487.780	79,49	79,49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.233.878.642	1.768.474.780	79,17	79,17
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6.086.700	6.020.900	98,92	98,92
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6.086.700	6.020.900	98,92	98,92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.917.365.086	1.470.097.590	76,67	76,68
	65.660.000	65.250.000	99,38	99,38
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.851.705.086	1.404.847.590	75,87	75,87
Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.345.190	92.918.290	96,44	96,44
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	57.042.800	55.799.200	97,82	97,82
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	1.625.000	1.617.500	99,54	99,54
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	10.824.390	10.824.390	100,00	100,00
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	5.898.000	4.520.000	76,64	76,64
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	4.305.000	4.282.200	99,47	99,47
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	14.850.000	14.075.000	94,78	94,78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.500.000	136.033.000	96,82	96,82
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	10.000.000	5.533.000	55,33	55,33
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	126.000.000	126.000.000	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	73.581.666	63.405.000	86,17	86,17
Daerah				
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	19.851.666	18.190.000	91,63	91,63

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	8.730.000	2.280.000	26,12	26,12
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	45.000.000	42.935.000	95,41	95,41
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.247.000	11.960.000	90,28	90,28
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	13.247.000	11.960.000	90,28	90,28
<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	13.247.000	11.960.000	90,28	90,28
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.487.000	16.586.000	94,85	94,85
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	17.487.000	16.586.000	94,85	94,85
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	17.487.000	16.586.000	94,85	94,85
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.810.000	16.467.000	97,96	97,96
<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	16.810.000	16.467.000	97,96	97,96
<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	16.810.000	16.467.000	97,96	97,96
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.548.181.590	4.122.234.221	90,63	90,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.579.338.235	2.351.383.991	91,16	91,16
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10.000.000	10.000.000	100	100
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.129.416.243	1.917.019.876	90,03	90,02
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.989.376.243	1.776.979.876	89,32	89,32
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	140.040.000	140.040.000	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.163.240	48.131.683	84,2	84,2
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	28.944.200	28.944.200	100,00	100,00
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	7.914.040	7.732.483	97,71	97,71
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	4.295.000	4.295.000	100,00	100,00
<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	2.390.000	2.390.000	100,00	100,00
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	9.600.000	750.000	7,81	7,81
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	4.020.000	4.020.000	100,00	100,00

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.405.900	301.909.100	97,89	97,89
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3.755.000	1.620.000	43,14	43,14
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	17.909.400	13.547.600	75,65	75,65
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	286.741.500	286.741.500	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.352.852	74.323.332	99,96	99,96
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	13.103.332	13.103.332	100,00	100,00
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	7.060.000	7.060.000	100,00	100,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	54.189.520	54.160.000	99,95	99,95
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	38.999.800	28.236.900	72,4	72,4
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	38.999.800	28.236.900	72,4	72,4
<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	14.499.900	14.499.900	100,00	100,00
<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	24.499.900	13.737.000	56,07	56,07
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	988.862.965	951.773.340	96,25	96,25
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	988.862.965	951.773.340	96,25	96,25
<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	923.686.830	919.568.000	99,55	99,55

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	28.670.795	0	0,00	0,00
<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	36.505.340	32.205.340	88,22	88,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	15.978.830	15.978.830	100	100
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15.978.830	15.978.830	100	100
<i>Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	8.669.415	8.669.415	100,00	100,00
<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	7.309.415	7.309.415	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	161.999.700	124.905.300	77,1	77,1
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	161.999.700	124.905.300	77,1	77,1
<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	19.999.800	19.999.800	100,00	100,00
<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,</i>	141.999.900	104.905.500	73,88	73,88
<i>Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	763.002.060	649.955.860	85,18	85,18
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	763.002.060	649.955.860	85,18	85,18

Lanjutan Lampiran 1 :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	29.302.560	29.302.560	100,00	100,00
<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	714.597.555	601.551.355	84,18	84,18
<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	19.101.945	19.101.945	100,00	100,00
Total	4.548.181.590	4.122.234.221	90,63	90,63



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

*Jln. Jend. Achmad Yani No.49
Tamiang Layang 73611*

RISALAH RAPAT PARIPURNA

TAHUN SIDANG : 2022

MASA SIDANG : II

JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA

SIFAT RAPAT : TERBUKA

RAPAT PARIPURA KE : VIII (DELAPAN)

HARI : RABU

TANGGAL : 30 MARET 2022

WAKTU PEMBUKAAN : 10:00 WIB

WAKTU PENUTUPAN : 11:25 WIB

AGENDA RAPAT : PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN RAPAT : NUR SULISTIO.S. Pd. I (Ketua DPRD)

SEKRETARIS RAPAT : MULYADI, SH, M M (Plt. Sekretaris DPRD)

JUMLAH ANGGOTA DPRD

YANG HADIR : SESUAI DAFTAR HADIR TERLAMPIR

ESEKUTIF, PENINJAU DAN

UNDANGAN LAIN : SESUAI DAFTAR HADIR TERLAMPIR

Pimpinan Rapat :

Risalah Rapat Paripurna VIII MS II TS 2022 : Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Akhir Tahun 2021 : Rabu 30 Maret 2022

Assalammualaikum Wr.Wb Salam Sejahtera dan selamat Siang.
Yth. Sdr. Bupati Barito Timur;
Yth. Sdr.Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur;
Yth. Sdr.Sekretaris Daerah beserta, Assisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Unit Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur,
Yth. Sdr.Pejabat Eselon III Unit Satuan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur,
Yth. Tim Ahli dan Staf Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Barito Timur;

Pimpinan Rapat :

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat, kasih dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna VIII Masa Sidang II Tahun Sidang 2022 DPRD Kabupaten Barito Timur.

Pelaksanaan Rapat Paripurna hari ini berdasarkan :

1. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Jadual Perubahan kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Maret 2022;
3. Undangan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 005/133/DPRD/2022 tanggal 29 Maret 2022;

Kami atas nama Pimpinan berserta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Barito Timur beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Timur serta undangan lainnya untuk mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara online menggunakan Aplikasi Zoom Cloud Meeting dikarenakan adanya pandemi Covid – 19 di Kabupaten Barito Timur.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Sebelum Rapat Paripurna ini dibuka secara resmi, disilahkan kepada Sekretaris DPRD untuk membacakan daftar hadir Dewan

Sekretaris DPRD :

Terima kasih Pimpinan Rapat,
Salam sejahtera dan selamat siang

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur berjumlah 25 orang.

- Hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 5 orang
- Hadir melalui Zoom Cloud Meeting berjumlah 12 orang

Risalah Rapat Paripurna VIII MS II TS 2022 : Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Akhir Tahun 2021 : Rabu 30 Maret 2022

Lanjutan Lampiran 2:

- Berhalangan hadir 7 orang

Dengan Keterangan :

- Ijin orang
- Belum hadir 6 orang

Demikian pembacaan daftar hadir Dewan, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan daftar hadir Dewan, Dari jumlah 25 orang, yang terdiri dari 3 orang Unsur Pimpinan dan 22 orang Anggota DPRD, hadir dan telah menandatangani daftar hadir berjumlah 5 orang, Hadir melalui Zoom Cloud Meeting berjumlah 12 orang dan berhalangan hadir orang

Dengan Keterangan :

- Ijin orang
- Belum hadir 6 orang

Dengan demikian sesuai Pasal 124 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur, maka kuorum terpenuhi dan Rapat Paripurna VIII Masa Sidang II Tahun Sidang 2022 DPRD Kabupaten Barito Timur, dapat dilaksanakan.

Pimpinan Rapat :

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas sejalan kita yang hadir dan mengikuti pada saat ini, Rapat Paripurna VIII Masa Sidang II Tahun Sidang 2022 DPRD Kabupaten Barito Timur dengan agenda Penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021 hari ini Rabu tanggal 30 maret 2022, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

-----Ketuk Palu 3 kali-----

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Sebelum masuk pada acara selanjutnya terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara yaitu sebagai berikut :

1. Pembacaan Daftar Hadir
2. Pembukaan Sidang;
3. Penyampaian Kepala Daerah LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021;
4. Pembacaan Do'a;
5. Penutup

Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada persidangan hari ini.

Pimpinan Rapat :

Lanjutan Lampiran 2:

Sidang Dewan dan hadirin yang kami Hormati,
 Selanjutnya Acara ke-3, Penyampaian Kepala Daerah tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada Yth. Bupati Barito Timur, disilahkan.

Bupati Barito Timur : ----- Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Terlampir -----

Pimpinan Rapat :

Demikian tadi telah kita Dengarkan Penyampaian Kepala Daerah terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021, terima kasih kepada Bupati Barito Timur yang telah menyampaikan penjelasannya.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,
 Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pimpinan Rapat :

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah wajib membuat :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran; dan
3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran;

Pimpinan Rapat :

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentuk Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

Selanjutnya DPRD Kabupaten Barito Timur akan membahas LKPJ yang telah disampaikan secara internal melalui Panitia Khusus, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima maka DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ maka DPRD Kabupaten Barito Timur akan memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan Jadual yang telah disepakati.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya Rapat Paripurna pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dibawakan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur, disilahkan.

Petugas Do'a : ----- *Teks Do'a Terlampir* -----.

Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur yang telah memimpin kita dalam Do'a

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sinergitas antara DPRD Kabupaten Barito Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang terukur dan transparan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Bupati Barito Timur segera menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan melampirkan laporan keuangan

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Ini semua merupakan tanggungjawab dan menjadi perhatian serius kita bersama untuk mempertahankan hasil Audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2020, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Besar harapan kita bersama, Opini hasil pemeriksaan BPK-RI Pewakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 dapat dipertahankan.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum Rapat Paripurna ini ditutup secara resmi, perkenankanlah kami selaku Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Barito Timur beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Timur serta hadirin sekalian dalam mengikuti acara Rapat Paripurna hari ini hingga berakhir dengan tertib dan lancar, dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya.

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas seijin kita yang hadir pada saat ini maka Rapat Paripurna VIII Masa Sidang II Tahun Sidang 2022 DPRD Kabupaten Barito Timur, kami nyatakan ditutup dengan resmi.

-----Ketuk palu 3 kali-----

Wasalammualaikum... Wr.. Wb... , Salam Sejahtera dan selamat siang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO TIMUR

Pimpinan Rapat,



Plt. SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN BARITO TIMUR,

SETWAN
MULYADI, SH,MM
PEMBINA TKT I (IV/b)
NIP.19640821199203 1009



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**
*Jln. Jend. Achmad Yani No.49
Tamiang Layang 73611*

RISALAH RAPAT PARIPURNA

TAHUN SIDANG	: 2022
MASA SIDANG	: II
JENIS RAPAT	: RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA I
SIFAT RAPAT	: TERBUKA
RAPAT PARIPURNA KE	: I (SATU)
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 28 APRIL 2022
WAKTU PEMBUKAAN	: 13.25 WIB
WAKTU PENUTUPAN	: 15.00 WIB
PIMPINAN RAPAT	: NUR SULISTIO, S. Pd. I (KETUA DPRD)
AGENDA RAPAT	: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
SEKRETARIS RAPAT	: MULYADI, SH., MM (Pit. SEKRETARIS DPRD)
JUMLAH ANGGOTA DPRD YANG HADIR	: SESUAI DAFTAR HADIR TERLAMPIR -----
EKSEKUTIF, DAN UNDANGAN LAIN	: SESUAI DAFTAR HADIR TERLAMPIR -----

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022: Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021

Plt. Sekretaris DPRD : :

Mohon perhatian, kepada seluruh undangan disilahkan mengambil tempat yang telah disediakan karena Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Barito Timur akan segera dimulai.

Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Timur, Bupati Barito Timur beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Timur memasuki ruangan, (hadirin dimohon untuk berdiri hadirin disilahkan duduk kembali).

Plt. Sekretaris DPRD : :

Salam Sejahtera dan Selamat Siang.

Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022 dengan agenda Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan Rapat oleh Pimpinan Rapat.
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
3. Laporan Panitia Khusus terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021.
4. Pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021.
5. Penyerahan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur kepada Bupati Barito Timur.
6. Sambutan Bupati Barito Timur.
7. Pembacaan Do'a.
8. Menyanyikan Lagu Padamu Negeri.
9. Penutup.

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022: Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021

Plt. Sekretaris DPRD:

Hadirin yang kami hormati,

Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022 akan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, kepada Yth. Bapak Nur Sulistio, S. Pd. I disilahkan.

Pimpinan Rapat :

Assalammualaikum Wr. Wb Salam Sejahtera dan Selamat Siang ...

Yth. Saudara Bupati Barito Timur;

Yth. Saudara Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur;

Yth. Saudara Kapolres Barito Timur atau yang mewakili;

Yth. Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur atau yang mewakili;

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau yang mewakili;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Assisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

Yth. Saudara Tim Ahli dan Staf Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Barito Timur;

Yth. Saudara Camat se Kabupaten Barito Timur;

Yth. Rekan – rekan Wartawan Media Cetak maupun Elektronik yang berkenan hadir pada saat ini.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Kami atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yth. Saudara Bupati Barito Timur dan jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Timur, serta undangan lainnya yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti acara Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022 dengan agenda Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022: Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021

Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021. Sebelum Rapat Paripurna Istimewa ini dibuka secara resmi, terlebih dahulu kita awali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

----- Hadirin dimohon untuk berdiri -----

Hadirin : --- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ---

Pimpinan Rapat : ---- Hadirin disilahkan duduk kembali ----

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Rapat Paripurna Istimewa merupakan Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan, sehingga Rapat Paripurna Istimewa saat ini tidak menggunakan kuorum.

Pimpinan Rapat :

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas seijin kita yang hadir pada saat ini, maka Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022 hari ini Kamis, 28 April 2022 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- Ketuk Palu 3 Kali -----

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa pada hari ini berdasarkan :

1. Pasal 127 ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur;

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022: Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021

2. Perubahan Kedua Jadual Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Timur bulan April 2022;
3. Undangan Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 005/203/DPRD/2022, perihal Undangan Rapat Paripurna Istimewa I Masa sidang II Tahun Sidang 2022, tanggal 26 April 2022.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan merupakan tugas dan wewenang DPRD untuk membahas dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.

Dalam Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD harus melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan memperhatikan:

- a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
- b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

Kemudian berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam :

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 telah disampaikan oleh Yth. Saudara Bupati Barito Timur pada Rapat Paripurna VIII Masa Sidang II Tahun Sidang 2022 dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 hari Rabu, 30 Maret 2022. Untuk menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021, DPRD Kabupaten Barito Timur telah membentuk Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 188.4/ 6 /DPRD/2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 5 April 2022, dan telah melaksanakan Rapat Kerja Panitia Khusus terkait Pembahasan Program Kerja Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 pada hari Selasa, 11 April 2022 serta yang terakhir dengan Rapat Kerja Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 pada hari Jumat, 22 April 2022 untuk menyusun Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus berupa Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, dan pada Rapat Paripurna Istimewa ini akan diserahkan secara resmi kepada Yth. Saudara Bupati Barito Timur, dengan harapan agar Rekomendasi tersebut, dapat dilaksanakan dengan

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022: Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021

baik dan proporsional, dan melalui Rekomendasi ini juga sebagai landasan DPRD untuk melaksanakan fungsi – fungsi sebagai wakil rakyat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya kita masuk pada acara yang ke 3, yaitu Penyampaian Laporan hasil Rapat Kerja Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 yang akan dibacakan secara bergantian oleh Anggota Panitia Khusus :

1. Yth. Saudara Hadi Santoso, ST;
2. Yth. Saudara Raran A,md; dan

dengan hormat disilahkan.

Anggota Pansus : ----- *Laporan Pansus LKPJ Terlampir* -----

Pimpinan Rapat :

Terima Kasih kepada Anggota Panitia Khusus yang telah menyampaikan laporannya, acara selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur, untuk itu kepada Yth. Plt. Sekretaris DPRD dengan hormat disilahkan.

Plt. Sekretaris DPRD :

Terima Kasih Pimpinan Rapat, kami akan bacakan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :

Plt. Sekretaris DPRD : ----- *Keputusan DPRD Terlampir* -----

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022: Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021

Demikian Pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur, selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pimpinan Rapat, Terima Kasih.

Pimpinan Rapat :

Terima Kasih kepada Yth. Plt. Sekretaris DPRD yang telah membacakan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur.

Plt. Sekretaris DPRD :

Selanjutnya penyerahan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur kepada Bupati Barito Timur, untuk itu kepada Yth. Unsur Pimpinan DPRD dan Yth. Saudara Bupati Barito Timur disilahkan mengambil tempat di depan,

..... Hadirin dimohon berdiri

Penyerahan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur oleh
Ketua DPRD kepada Bupati Barito Timur

Pimpinan Rapat :

(Setelah selesai, hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali)

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disampaikannya Keputusan DPRD ini kepada Yth. Saudara Bupati Barito Timur, maka selesai juga tugas Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021, saya atas nama DPRD Kabupaten Barito Timur mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi – tinggi kepada Yth. Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur yang tergabung dalam Panitia Khusus pada tahun ini.

Selanjutnya kita akan masuk pada acara yang ke 6 yaitu Sambutan Bupati Barito Timur, kepada Yth. Saudara Bupati Barito Timur disilahkan.

Risalah Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022: Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021

Bupati Barito Timur : ----- *Sambutan Bupati Barito Timur Terlampir* -----

Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada Yth. Saudara Bupati Barito Timur yang telah menyampaikan sambutan, selanjutnya sebagai ungkapan syukur atas terlaksananya acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdo'a yang akan dipimpin oleh Petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur, kepada petugas yang telah ditunjuk, dengan hormat disilahkan,

Pembaca Do'a : ----- *Teks Do'a Terlampir* -----

Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada Petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur yang telah memimpin kita dalam Do'a.

Plt. Sekretaris DPRD :

Selanjutnya marilah kita bersama – sama menyanyikan Lagu Padamu Negeri,
(Hadirin dimohon berdiri -----)
(Setelah selesai, hadirin dipersilahkan duduk kembali).

Pimpinan Rapat :

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,
Sebelum Rapat Paripurna Istimewa ini ditutup secara resmi, perkenankanlah kami selaku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Yth. Saudara Bupati Barito Timur beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Timur serta hadirin sekalian dalam mengikuti acara Rapat Paripurna Istimewa hari ini hingga

berakhir dengan tertib dan lancar serta kami mohon maaf atas segala kekurangannya.

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas sejalan kita yang hadir pada saat ini maka Rapat Paripurna Istimewa I Masa Sidang II Tahun Sidang 2022, kami nyatakan ditutup dengan resmi.

----- *Ketuk Palu 3 Kali* -----

Wasalamualaikum Wr... Wb, Selamat Sore, Syalom.

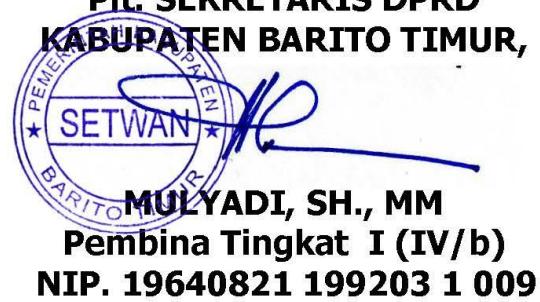
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO TIMUR
Pimpinan Rapat,



NUR SULISTIO, S. Pd, I
Ketua

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BARITO TIMUR,



MULYADI, SH., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640821 199203 1 009



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/ 7 /DPRD/2022**

TENTANG

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 sudah disampaikan di Rapat Paripurna VIII Masa Sidang II Tahun Sidang 2022 pada hari Rabu, 30 Maret 2022;

c. bahwa untuk lebih teliti, cermat dan fokus dalam rangka menelaah Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 telah dibentuk Panitia Khusus Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021;

d. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 telah dibahas dalam Rapat Kerja Pansus pada hari Senin, 11 April 2022 dan telah disimpulkan beberapa rekomendasi;

- e. bahwa hasil Rapat Kerja Pansus sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Rekomendasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruayan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaawran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 63);
15. Peraturan Daerah kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 68);

17. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Mewenangkan

KEDUA : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Rekomendasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan DPRD ini;

KETIGA : Menyampaikan Keputusan DPRD ini kepada Bupati Barito Timur sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran berikutnya;

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 28 April 2022



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/ 7 /DPRD/2022
TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021**

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

1. Angka Kemiskinan

a. Catatan

1. Yang mempengaruhi bertambahnya penduduk miskin di Barito Timur, faktor sisi kemampuan keuangan faktanya belum bisa terealisasi sepenuhnya.
2. Berkurangnya jumlah penduduk miskin tidak seirama dengan jumlah pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sehingga berdampak untuk ekonomi bagi masyarakat Miskin dan kurangnya daya beli masyarakat pada Produk Lokal dan Lambatnya Perkembangan bagi UKM Kecil dalam kegiatan usaha Produk Lokal

b. Rekomendasi

OPD terkait Melakukan perbaikan dan Validasi data KK miskin setelah Pandemi Covid-19, serta tetap melakukan Penyaluran BLT Masyarakat Miskin khusus terdampak Covid 19 serta Menumbuhkan wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pemberdayaan oleh OPD dan UMKM serta Pelatihan ketrampilan bagi Pendidikan rendah.

A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN.

Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi terlaksananya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Catatan

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurun pada komponen obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Obyek PBB. Dan ini dapat mempengaruhi dasar Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah.

b. Rekomendasi

1. Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui pada Obyek Pajak Daerah yang Terdiri dari Restribusi Daerah dalam Pengelolaan PBB, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah.
2. Disamping itu sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sehingga proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

2. Pengelolaan Belanja Daerah

a. Catatan

1. Sebagaimana diketahui Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Secara keseluruhan, Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.1.041.625.545.101,63 (**Satu Triliun, Empat Puluh Satu Milyar, Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta, Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu, Seratus Satu Rupiah, Enam Puluh Tiga Sen**). Terealisasi sebesar Rp. 920.557.700.398,83 (**Sembilan Ratus Dua Puluh Milyar, Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta, Tujuh Ratus Ribu, Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah, Delapan Puluh Tiga Sen**). Dengan Uraian Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 sebagai berikut :
 - Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp. 690.087.045.102,63 terealisasi sebesar Rp. 614.066.974.595,02
 - Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 Sebesar RP. 134.361.450.899,00 terealisasi sebesar Rp. 122.377.243.903,81
 - Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp. 50.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 25.108.799.846,00
 - Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp. 167.177.049.100,00 terealisasi sebesar Rp. 159.004.682.054,00

Pada Tahun 2021 Keuangan Daerah mengalami surplus sebesar Rp. 41.474.202.372,27 (**Empat Puluh Satu Milyar, Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu, Dua Ratus Dua Ribu, Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah, Dua Puluh Tujuh Sen**), sehingga sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA) Kabupaten Barito Timur sebesar Rp.179.994.576.934,52 (**Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta, Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu, Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu, Lima Puluh Dua Sen**)

2. Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 setelah Refocusing sebesar Rp. 1.041.625.545.101,63 (**Satu Triliun, Empat Puluh Satu Milyar, Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta, Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu, Seratus Satu Ribu, Enam Puluh Tiga Sen**) naik sebesar Rp. 17.950.608.745,63 (**Tujuh Belas Milyar, Sembilan Ratus Lima Puluh Juta, Enam Ratus Delapan Ribu, Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah, Enam Puluh Tiga Sen**) atau 1,75 % dari APBD Murni yang dianggarkan sebesar Rp. 1.023.674.936.356,00 (**Satu Triliun, Dua Puluh Tiga Milyar, Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta, Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu, Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah**).

b. Rekomendasi

1. Pemerintah Daerah hendaknya Dalam Pelaksanaan dalam Pengelolaan Program Yang terdiri Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung diharapkan Lebih di tingkat

serta Lebih Optimal dan di harapkan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatannya dalam Progresnya tercapai 100 % sehingga yang sudah diprogramkan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan.

B. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan ✓

a. Catatan

1. Perhatian Pemerintah Daerah dalam DAPODIK sarana dan prasana yang dikelola oleh sekolah tidak sesuai dengan kondisi dilapangan sekolah, sehingga adanya perbedaan Dapodik sekolah yang ada di pusat berbeda dengan data usulan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan DAK Fisik sarana dan prasarana sekolah, terutama Baik jaringan Internet untuk Sekolah Dasar dan PAUD khusus Daerah terpencil.

b. Rekomendasi

1. Perlu tambahan Kurikulum baik disekolah untuk Pelajaran yang berbasis Budaya serta adanya dibentuk sekolah dengan Basis Budaya demi memperkenalkan Budaya yang ada di Bumi Jari Janang Kalalawah seperti (Bengkel Budaya Tumet Leut).
2. Perlunya Peningkatan SDM Tenaga Administrasi dengan melalui pelatihan untuk operator sekolah agar bisa menguasai cara mengisi data DAPODIK agar bisa masuk ke Aplikasi Krisna.

2. Urusan Kesehatan ✓

a. Catatan

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan di RSUD serta pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, dan ketersediaan terutama Dokter spesialis masih kurang sarana Prasarana dan Akreditasi unit-unit kesehatan yang belum memberikan jaminan Pelayanan Kesehatan Belum Optimal.

b. Rekomendasi

1. Perlunya Perhatian Pemerintah terhadap pengembangan dan peningkatan mutu SDM kesehatan, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). Dengan adanya pelatihan maka akan meningkatkan SDM kesehatan yang lebih bermutu.
2. Serta memperlancar pelayanan di bidang Kesehatan baik di RSUD, Puskesmas, Polindes, dan Pustu maka perlu ditambahkan Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Bidan.

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ✓

a. Catatan

1. Kiranya Diperjelas Pemetaan luasan kawasan banjir yang menjadi kewenangan Kabupaten terutama dipermukiman yang rawan banjir belum tersedianya.
2. Belum terlayani oleh jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.

b. Rekomendasi

1. Perlunya meningkatkan rasio dan letak luas kawasan pemukiman rawan banjir dan meningkatkan rasio luas daerah irigasi.

2. Persentase pada titik jalan yang vital yang merupakan akses utama yang digunakan masyarakat umum Perlu peningkatan.

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ✓

a. Catatan

1. Belum tercapainya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi penduduk miskin, permukiman kumuh dan korban bencana.

b. Rekomendasi

1. Perlunya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana banjir, longsor, kebakaran dengan melakukan koordinasi dengan BPBD-Damkar, Dinas Sosial dan Bagian Kesra. Terkait Data Wilayah Rawan Bencana sehingga bisa tepat sasaran.

C. URUSAN WAJIB YANG BERKENAAN DENGAN PELAYANAN NON DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja ✓

a. Catatan

1. Belum tersusun dokumen Kegiatan yang mengacu kepada Dokumen Rencana Kerja Daerah (RTKD)
2. Tidak efektifnya perusahaan dalam menerapkan tata kelola kerja yang layak dan belum efektifnya penyampaian laporan kepada pemerintah, sehingga kegiatan tersebut Dinas Tenaga Kerja melakukan pengambilan data laporan ke perusahaan-perusahaan.

b. Rekomendasi

1. Perlunya melakukan Konsultasi serta Koordinasi dengan Instansi terkait seperti Disnaker Provinsi Kalteng dan Kemenaker RI untuk Teknis dan Penganggaran Kegiatan Penyusunan RTKD.
2. Perlunya Pembinaan dan Pelatihan kepada Perusahaan tentang penerapan Tata Kelola Kerja yang layak dan menyiapkan kegiatan serta pendanaan untuk penanganan Laporan dimaksud.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga ✓

Berencana

a. Catatan

1. Masih belum optimalnya data Gender dan Anak.

b. Rekomendasi

1. Perlunya Mendaftar Ulang serta pemisahan data secara terpisah (Data Gender dan Anak) antara Laki – laki dan Perempuan secara manual atau melalui Aplikasi dan di Update enam bulan sekali sehingga dapat berjalan secara optimal.

3. Urusan Pangan ✓

a. Catatan

1. Ketersediaan pupuk Subsidi maupun Non subsidi sulit didapat mengakibatkan produksi padi menurun.
2. Belum optimalnya ketersediaan pangan segar.

b. Rekomendasi

1. Perlunya dibentuk Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa untuk penyediaan Pupuk bersubsidi guna mempermudah daya beli masyarakat.
2. Perlunya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan serta Desa bekerjasama dengan Perusahaan terkait untuk penyediaan Pupuk Bersubsidi.
3. Peningkatan SDM tenaga penyuluh Melalui bimbingan teknis dan Pelatihan.

4. Urusan Lingkungan Hidup ✓

a. Catatan

1. Belum optimalnya penanganan sampah di TPA dan lokasi TPS yang tidak tepat.
2. Pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan belum dapat teratasi secara optimal.
3. Belum semua sekolah mendapatkan Program PBLHS karena belum ada sokongan dari pihak ke-3.
4. Tidak optimalnya sarana dan prasarana angkutan sampah.

b. Rekomendasi

1. Perlunya dorongan dari pihak ke-3 untuk melaksanakan program CSR terkait bidang pendidikan Khususnya program PBLHS.
2. Perlu dilakukan sosialisasi/himbauan kepada masyarakat terkait cara membedakan antara sampah Organik, Sampah Non Organik dan Sampah Medis.

5. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ✓

a. Catatan

1. Perlu Ketelitian dalam Optimal dalam Pemutahiran Data Kependuduk baik KTP KK, Akte Kelahiran Akte Nikah serta KTA.

b. Rekomendasi

1. Perlu dilakukannya pendataan ulang terkait Data Penduduk baik untuk tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
2. Perlunya pelatihan dalam pelaksanaan pencetakan E-KTP, KK, KIA, dan Akta, serta pencantuman titel/gelar.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ✓

a. Catatan

1. Persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, hingga kesenjangan infrastruktur kawasan pedesaan menyebabkan kesulitan dalam pengembangan tata pemerintah desa.
2. Perlunya perhatian khusus Bagi Unsur Perangkat Desa serta Penyuluh bagi pengembangan program desa-desa di perbatasan dengan Provinsi Kalimantan selatan.

Lanjutan Lampiran 4:

3. Peningkatan SDM perangkat desa dalam pengelolaan Bumdes.

b. Rekomendasi

1. Perlunya pembukaan lapangan pekerja baru bagi masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan masyarakat melalui kerajinan lokal seperti pembuatan makanan ringan, anyaman, mebel dan lain – lain.
2. Perlu adanya perbaikan tata kelola pengembangan infrastruktur kawasan pedesaan terkhusus di daerah terpencil dan perbatasan dengan wilayah Kalimantan Selatan.
3. Perencanaan pengelolaan Bumdes harus melihat peluang pasar dan kondisi wilayah.

7. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ✓

a. Catatan

1. Belum tersedianya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan walaupun Balai Penyuluhan sudah tersedia disetiap kecamatan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti Program KB dari Pemerintah.

b. Rekomendasi

1. Perlunya peningkatan SDM bagi tenaga ahli yang membidangi tentang fungsi PPKS di Balai sehingga dapat berjalan secara maksimal.
2. Memberikan infomasi dan pemahaman melalui sosialisasi dan penyuluhan bagi masyarakat mengenai program KB.

8. Urusan Perhubungan ✓

a. Catatan

1. Perlu Perhatian Pemerintah Daerah dalam Sektor Perhubungan yang terdiri dari Belum beroperasinya rencana pelabuhan perintis di Telang Baru terealisasinya Ijin Operasional Pelabuhan Telang Baru
2. Kurangnya optimalisasi dalam Panataan parkiran di Marka pinggiran jalan Umum.

b. Rekomendasi

1. Perlu dibentuk pendirian Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Badan Usaha Pelabuhan serta pengurusan perlindungan pelabuhan sampai antar pulau.
2. Perlunya disediakan angkutan Umum (Perintis) Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

9. Urusan Komunikasi Dan Informatika ✓

a. Catatan

1. Tidak optimalnya layanan publik secara online dan terintegrasi Baik Desa- Desa serta daerah terpencil

b. Rekomendasi

1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas melalui sistem kontrak, dan penambahan anggaran untuk pengembangan Aplikasi perlunya rekrutmen baru.

2. Perlunya pengembangan Sistem Jaringan Internet di kawasan Pedesaan yang terisolir.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah ✓

a. Catatan

1. Belum ada koperasi aktif yang berkualitas.
2. Koperasi belum memiliki produksi yang berkualitas.
3. Belum ada koperasi yang bermitra dengan perusahaan.

b. Rekomendasi

1. Perlu pembinaan atau pemahaman atau aturan hak dan kewajiban Anggota Koperasi juga memerlukan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Memberikan pembinaan dan pengertian tentang peraturan Koperasi dan Merevitalisasi dan mengaktifkan kelembagaan Koperasi apabila ada yang tidak aktif.
3. Perlunya pembuatan MOU (mitra) dengan pihak ke-3.

11. Urusan Penanaman Modal ✓

a. Catatan

1. Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal dan perijinan.

b. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan survei berkenaan dengan Pelayanan Penanaman Modal serta dilaksanakan pengembangan agar dapat mencapai (Indeks Kepuasan Masyarakat) IKM dalam metode tersebut.

12. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga ✓

a. Catatan

1. Kegiatan ekonomi mandiri, organisasi pemuda dan sosial kemasyarakatan serta prestasi olah raga belum optimal.
2. Belum optimalnya pengembangan kesenian tradisional dan pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan permuseuman.
3. Perlunya perhatian dan dukungan pendanaan dan pembinaan dari pemerintah daerah.

b. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk kegiatan atau organisasi kepemudaan dibidang Olah Raga dan Seni Budaya.
2. Perlunya dukungan pendanaan dan pembinaan dari pemerintah daerah.

13. Urusan Kebudayaan ✓

a. Catatan

1. Belum optimalnya pengembangan kesenian tradisional dan pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan permuseuman.

b. Rekomendasi

1. Perlu peningkatan program pembinaan untuk pengembangan kesenian tradisional dan perlunya kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan dari Pemerintah Daerah terkait pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan permuseuman.

2. Perlunya meningkatkan anggaran kegiatan yang memadai serta mengkaji kegiatan peningkatan pelestarian cagar budaya.

D. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Kelautan Dan Perikanan ✓

a. Catatan

1. Produksi perikanan tangkap tidak optimal.
2. Kurang difungsikannya balai benih ikan di Murung Bakik dan Netampin.

b. Rekomendasi

1. Perlunya peningkatan penyediaan sarana dan prasana alat tangkap seperti klotok, tampirai, keramba apung, bubu, jaring ikan.
2. Perlunya penyediaan bibit ikan dan pakan yang cukup.
3. Perlunya dilakukan pengawasan terkait penggunaan alat setrum yang dapat merusak habitat ikan disungai, rawa, dan kolam.

2. Urusan Pariwisata ✓

a. Catatan

1. Kunjungan Wisatawan belum mencapai target mengakibatkan tingkat hunian akomodasi rendah.

b. Rekomendasi

1. Perlunya meningkatkan tempat wisata yang memadai untuk daya tarik wisatawan dari dalam dan luar daerah serta mancanegara.

3. Urusan Peternakan ✓

a. Catatan

1. Meningkatnya kasus yang disebabkan oleh penyakit hewan menular.

b. Rekomendasi

1. Perlunya penyuluhan dan sosialisasi terkait penanganan penyakit hewan menular.
2. Diperlukan upaya penyembuhan hewan yang sakit melalui obat-obatan yang tepat, oleh OPD yang menanganiinya.

4. Urusan Perdagangan ✓

a. Catatan

1. Belum berfungsinya aset Dinas Perdagangan lokasi dibelakang terminal ampah.
2. Tidak optimalnya pemanfaatan pertokoan bertingkat di pasar beringin ampah.
3. Tata kelola parkir dan lapak dagang di pasar ampah perlu diperbaiki.

b. Rekomendasi

1. Perlunya perbaikan meja tempat penjualan ikan dan sayur – mayor sehingga pedagang kembali dapat menggunakan fasilitas tersebut.
2. Perlunya penataan ulang tentang kerjasama pengelolaan parkir di halaman pasar.

5. Urusan Transmigrasi ✓

a. Catatan

1. Pertanahan transmigrasi termasuk didalam HGU Perkebunan sawit terutama lahan usaha II di Wilayah Desa Lagan dan Desa Sumber Rejo.

b. Rekomendasi

1. Perlunya melakukan koordinasi atau meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan Plotting Area serta perlunya melakukan mediasi antara warga ekstransmigrasi dengan pihak yang menguasai objek tanah tersebut.

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

a. Catatan

1. Kebijakan terkait organisasi pemerintah daerah sebagai tindak lanjut pembentukan 3 UPTD belum terealisasi.
2. Permasalahan Batas Daerah Penerbitan Permendagri Nomor 40/2018 mengakibatkan berkurangnya wilayah Bartim dan Wilayah Desa Dambung beralih kewilayah Kabupaten Tabalong.
3. Pengelolaan PJU yang belum maksimal.

b. Rekomendasi

1. Perlunya OPD terkait lebih proaktif guna percepatan pembentukan UPTD dimaksud serta perlu dukungan anggaran yang memadai.
2. Perlunya pengajuan keberatan ke Kemendagri dan pengajuan Judicial Review.

2. Sekretariat DPRD

a. Catatan

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD kurang optimal koordinasi terfasilitasi kinerjanya

b. Rekomendasi

1. Sekretariat DPRD dalam Pelaksanaan kegiatan perlu di tingkatkan kinerjanya sehingga proses Program kegiatan DPRD yang sudah ditetapkan serta sesuaikan Rencana Anggaran kegiatan yang sesuai Perencanaan dan Program yang dianggarkan, sehingga agar tidak menyebabkan keterlambatan melaksanakan kegiatan-kegiatan Belanja Daerah itu sendiri, sehingga realisasi kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan dapat terlaksana sesuai waktu dan target yang diharapkan.
2. Sekretariat DPRD dapat dilibatkan dalam hal perencanaan dan pembahasan kegiatan DPRD.

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah

a. Catatan

1. Perubahan kebijakan pemerintah pusat akibat pandemi covid-19 dan implementasinya ke daerah.

b. Rekomendasi

1. Perlunya memperketat sinkronisasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta aplikasi dokumen perencanaan.
2. **Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** ✓

a. Catatan

1. Belum dilaksanakannya prajabatan untuk lulusan CPNS Tahun 2021.
2. Tidak optimalnya kinerja pegawai negeri sipil.

b. Rekomendasi

1. Perlunya melaksanakan Prajabatan untuk lulusan CPNS 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Perlunya peningkatan SDM melalui Diklat Kepemimpinan dan Bimbingan Teknis.

3. Inspektorat Daerah ✓

a. Catatan

1. Belum adanya sosialisasi program anti korupsi

b. Rekomendasi

1. Perlunya Melakukan Sosialisasi tentang Program anti korupsi

4. Unsur Kewilayahan ✓

a. Catatan

1. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa belum optimal.
2. Pelayanan masyarakat terutama dalam hal perijinan dan non perijinan belum optimal.
3. Usulan masyarakat dalam kegiatan pembangunan belum semuanya terakomodir.

b. Rekomendasi

1. Perlunya ditingkatkan pelaksanaan berupa pelatihan-pelatihan teknis di bidang keuangan dan administrasi Desa.
2. Perlunya mengupayakan hasil musyawarah rencana pembangunan sehingga dapat terakomodir seluruhnya serta menambahkan anggaran dana untuk kegiatan tersebut.

5. Unsur Pemerintahan Umum ✓

a. Catatan

1. Kebijakan teknis tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial belum terlaksana.

b. Rekomendasi

1. Perlunya menyusun pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan sosialisasi dalam pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan komfik.

